

**ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN MEDIA ONLINE TIRTO.ID  
TERHADAP KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI RIAU TAHUN 2019**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi Pada  
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik**



**Disusun oleh:**

**Nabila Aulia Fahira**

**NIM. 165120207111058**

**JURUSAN ILMU KOMUNIKASI**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**MALANG**

**2019**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Praktis	8
BAB II	9
2.1 Berita dan Ideologi Media	9
2.2 Konstruksi Realitas Sosial di Media	12
2.3 Jurnalisme dan Media Online	14
2.4 Analisis Framing	16
2.5 Penelitian Terdahulu	20
2.6 Kerangka Pemikiran	24
BAB III	25
3.1 Jenis Penelitian	25
3.2 Paradigma Penelitian	26
3.3 Teknik Pengumpulan Data	28
3.4 Teknik Analisis Data	30
BAB IV	34
4.1 Gambaran Umum	34
4.1.1 Sejarah Tirto.id	34

4.1.2	Tirto.id Sebagai Media Online	36
4.1.3	Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau	37
4.2	Analisis Data	40
a.	Hasil dan Pembahasan	200
BAB V		259
5.1	Kesimpulan	259
5.2	Saran	260
DAFTAR PUSTAKA		261
LAMPIRAN		267



## DAFTAR TABEL

<u>Tabel 1. Framing menurut para ahli</u>	17
<u>Tabel 2. Kerangka pemikiran penelitian</u>	24
<u>Tabel 3. Perangkat Framing Entman</u>	31
<u>Tabel 4. Analisis Framing "Asap Karhutla Pekanbaru Mulai Ganggu Kesehatan dan Aktivitas Warga"</u>	40
<u>Tabel 5. Analisis Framing "Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera"</u>	41
<u>Tabel 6. Analisis Framing "Polisi Cari Keterkaitan 23 Terduga Pelaku Karhutla dengan Korporasi"</u>	43
<u>Tabel 7. Analisis Framing "Iduladha 2019: Sumatera &amp; Kalimantan Masih Dikepung Karhutla"</u>	45
<u>Tabel 8. Analisis Framing "Polri: PT Sumber Sawit Sejahtera Jadi Tersangka Kebakaran hutan dan lahan Riau"</u>	46
<u>Tabel 9. Analisis Framing "60 Orang dan 1 Korporasi Tersangka Karhutla di Riau Hingga Kalteng"</u>	49
<u>Tabel 10. Analisis Framing "Kapolri dan Panglima TNI Tinjau Pemadaman Karhutla Riau"</u>	51
<u>Tabel 11. Analisis Framing "Soal Karhutla, Menteri LHK: Pemegang Konsesi Lahan Jangan Main-main"</u>	52
<u>Tabel 12. Analisis Framing "Polri Lakukan Evaluasi Penanganan Karhutla Setiap Bulan"</u>	54
<u>Tabel 13. Analisis Framing "Satgas Karhutla Evaluasi Penanganan Perkara Pemadaman Api"</u>	56
<u>Tabel 14. Analisis Framing "Kemenkes: 9630 Warga Alami ISPA Akibat Karhutla di Riau"</u>	57
<u>Tabel 15. Analisis Framing "Polri Kini Tangani 100 Kasus Karhutla dengan Tersangka"</u>	59
<u>Tabel 16. Analisis Framing "Polisi Tak Tahan Bos PT Sumber Sawit Sejahtera"</u>	60
<u>Tabel 17. Analisis Framing "BMKG: 260 Titik Panas tersebar di Sumatera pada Senin Pagi"</u>	63
<u>Tabel 18. Analisis Framing "Wiranto: Penanganan Karhutla Tak Hanya Tanggung Jawab Pusat"</u>	64
<u>Tabel 19. Analisis Framing "Dampak Kabut Asap Karhutla Riau: Warga Kena Iritasi Kulit dan Mata"</u>	66
<u>Tabel 20. Analisis Framing "Beda Data Kebakaran Hutan BNPB vs KLHK: Riau Paling Terdampak"</u>	68

<u>Tabel 21. Analisis Framing "Menteri Siti Nurbaya Protes ke Malaysia Soal Kabut Asap Karhutla"</u>	70
<u>Tabel 22. Analisis Framing "Kabut Asap Bikin Biaya Hidup Warga Pekanbaru Meningkat"</u>	72
<u>Tabel 23. Analisis Framing "Karhutla Riau: Daftar Penerbangan yang Terdampak 13 September 2019"</u>	73
<u>Tabel 24. Analisis Framing "Karhutla Riau Bikin Pekanbaru Menguning dan Warga Mulai Mengungsi"</u>	74
<u>Tabel 25. Analisis Framing "Kabut Asap Pekanbaru Makin Tebal, Ratusan Warga Jatuh Sakit"</u>	76
<u>Tabel 26. Analisis Framing "Lahan Perusahaan Sawit Malaysia yang Diduga Dibakar Disegel KLHK"</u>	77
<u>Tabel 27. Analisis Framing "KLHK Segel 42 Perusahaan Diduga Pelaku Pembakaran Hutan"</u>	79
<u>Tabel 28. Analisis Framing "BNPB Sebut Minim Peran Pemda Jadi Hambatan Penanganan Karhutla"</u>	81
<u>Tabel 29. Analisis Framing "Penanganan Karhutla dan Cerita Warga Saat Kabut Asap Merajalela"</u>	83
<u>Tabel 30. Analisis Framing "Kebakaran hutan dan lahan Riau: 27 Titik Api Kategori Tinggi Terdeteksi"</u>	84
<u>Tabel 31. Analisis Framing "Dampak Karhutla: Seperti Dikurung dalam Ruangan Bersama Tungku Api"</u>	86
<u>Tabel 32. Analisis Framing "Tersangka Perorangan Karhutla di Sumatera dan Kalimantan Jadi 185"</u>	88
<u>Tabel 33. Analisis Framing "Kendala Pemadaman Kebakaran hutan dan lahan versi Polri: Air dan Lokasi"</u>	90
<u>Tabel 34. Analisis Framing "Tersangka Karhutla di Sumatera dan Kalimantan Jadi 218 Orang"</u>	92
<u>Tabel 35. Analisis Framing "Penyebab dan Akibat Kebakaran Hutan di Kalimantan Hingga Sumatera"</u>	93
<u>Tabel 36. Analisis Framing "Pemprov DKI Kirim 65 Orang SKPD Bantu Tangani Karhutla di Riau"</u>	95
<u>Tabel 37. Analisis Framing "3 Penyakit Akibat Kabut Asap Kebakaran Hutan di Kalimantan-Sumatera"</u>	96
<u>Tabel 38. Analisis Framing "BMKG Sebut Asap Karhutla Riau Sampai Singapura dan Malaysia"</u>	98
<u>Tabel 39. Analisis Framing "Yang Keliru dari Pernyataan Moeldoko soal Korban Karhutla Riau"</u>	100

<u>Tabel 40. Analisis Framing "Wiranto Klaim Asap Akibat Kebakaran hutan dan lahan Tak Separah Pemberitaan di Media"</u>	102
<u>Tabel 41. Analisis Framing "Walhi Sebut Hujan Buatan Sengaja Diturunkan Saat Jokowi ke Riau"</u>	104
<u>Tabel 42. Analisis Framing "Apa Itu Karhutla yang Sebabkan Kabut Asap di Sumatera &amp; Kalimantan?"</u>	105
<u>Tabel 43. Analisis Framing "Spotify Buat Playlist "Hazed and Confused" Singgung Bencana Asap"</u>	107
<u>Tabel 44. Analisis Framing "Karhutla: Malaysia Kirim Surat ke Jokowi, Singapura Tawari Bantuan"</u>	108
<u>Tabel 45. Analisis Framing "Saat Wiranto Ditantang Tinggal Lebih Lama di Lokasi Karhutla"</u>	110
<u>Tabel 46. Analisis Framing "Pemerintah Tak Sigap, Akankah Bencana Karhutla 1997-1998 Terulang?"</u>	112
<u>Tabel 47. Analisis Framing "Kualitas Udara Pekanbaru dan 4 Kota Terdampak Asap Kebakaran Hutan"</u>	114
<u>Tabel 48. Analisis Framing "Cara Atasi Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan-Sumatera Versi Jokowi hingga BNPB"</u>	115
<u>Tabel 49. Analisis Framing "Pernyataan-Pernyataan Kontroversial Pejabat Indonesia soal Karhutla"</u>	117
<u>Tabel 50. Analisis Framing "KLHK Segel 52 Lahan di Kalimantan dan Sumatera Terkait Karhutla"</u>	120
<u>Tabel 51. Analisis Framing "Pembakaran Hutan: Elite yang Untung, Peladang yang Disalahkan"</u>	122
<u>Tabel 52. Analisis Framing "Greenpeace: Paru-Paru Warga Lebih Kotor daripada Sepatu Jokowi"</u>	124
<u>Tabel 53. Analisis Framing "BMKG: Kualitas Udara Jambi, Palembang &amp; Pekanbaru Masih Tak Sehat"</u>	125
<u>Tabel 54. Analisis Framing "Pemprov Riau Tetapkan Status Darurat Pencemaran Udara Kebakaran hutan dan lahan"</u>	126
<u>Tabel 55. Analisis Framing "Tumpulnya Penegakan Hukum Penyebab Karhutla Terulang"</u>	128
<u>Tabel 56. Analisis Framing "Kebakaran hutan dan lahan: Konspirasi Elite dan Dugaan Korupsi Sumur Bor"</u>	131
<u>Tabel 57. Analisis Framing "Omong Kosong Pejabat Soal Karhutla yang Tak Perlu Dipercaya"</u>	132
<u>Tabel 58. Analisis Framing "Cegah Karhutla, Badan Restorasi Gambut Ajak Warga Ternak Lebah"</u>	135

<u>Tabel 59. Analisis Framing "Kabut Asap Pekat Kembali Menyelimuti Beberapa Wilayah di Sumatera"</u>	136
<u>Tabel 60. Analisis Framing "Polda Riau Segera Tetapkan Korporasi sebagai Tersangka Karhutla"</u>	138
<u>Tabel 61. Analisis Framing "345 Orang dan 17 Korporasi Ditetapkan Sebagai Tersangka Karhutla"</u>	140
<u>Tabel 62. Analisis Framing "Polri Tetapkan 4 Orang dan 2 Korporasi Tersangka Karhutla"</u>	142

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam memberitakan sebuah peristiwa, media memiliki kemampuan untuk mengonstruksi sebuah realitas. Artinya, peristiwa yang sama memiliki kemungkinan dikonstruksi secara berbeda dari media yang berbeda pula. Hal itu bergantung pada ideologi dan motivasi masing-masing media dalam menyampaikan berita, entah berorientasi pada pemerintah, pasar, atau bahkan kepentingan umum (Hamad, 2004). Mengenai hal tersebut, salah satu peristiwa yang dikonstruksikan oleh media adalah pemberitaan mengenai peristiwa kebakaran hutan dan lahan di Riau tahun 2019.

Kebakaran hutan dan lahan (kebakaran hutan dan lahan) terparah melanda Indonesia pada tahun 1997. Kabut asap yang tidak hanya menyelimuti Indonesia, tetapi juga negara tetangga seperti Brunei, Singapura, Malaysia, bahkan Thailand dan Vietnam ini disebabkan oleh pembakaran dan lahan yang salah satunya terjadi di pulau Sumatera. Peristiwa iklim El Nino memperparah situasi dan kondisi yang saat itu sudah kalut (Purnomo, et al., 2019). Riau pada saat itu sempat mengalami kerusakan kebakaran hutan dan lahan paling parah sebelum digeser dengan Sumatera Selatan, dengan luas lahan terbakar sebesar 26 ribu hektar (tirto.id, 2019).

Tren membakar hutan sudah dimulai sejak tahun 1980 saat rezim Suharto masih berkuasa. Pemerintahan saat itu memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian bangsa dengan menjadi eksportir kayu terbesar. Di saat yang bersamaan, pemerintah mengambil alih hutan nasional untuk dikonversi menjadi lahan penanaman kelapa sawit dengan melakukan konsensi lahan untuk kepentingan komersil. Pembakaran hutan dan lahan dilakukan secara sengaja guna membersihkan

lahan pada akhirnya berujung dengan kekeringan dan kebakaran besar yang tidak terkontrol (Rosul, 2015).

Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), selama sepuluh tahun terakhir, sejak tahun 2009 sampai tahun 2019, Indonesia telah mengalami sebanyak 1.226 kejadian kebakaran hutan dan lahan. Pada tahun 2019, BNPB mencatat sebanyak 141 kejadian kebakaran hutan dan lahan (Katadata, 2019). Peristiwa kebakaran hutan dan lahan menjadi sorotan nasional. Dilansir dari tempo.co (2019), kebakaran terjadi di 28 provinsi sepanjang tahun 2019 dan 6 di antaranya masuk kategori siaga darurat kebakaran, seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau.

CNN Indonesia (2019) melaporkan bahwa adanya peningkatan jumlah *hotspot* dan meluasnya api yang melahap area dan lahan di Riau. Menurut BMKG Riau, peningkatan *hotspot* menjadi 167 titik. Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Kecang Rusmadya, dikutip dari iNews.id (2019), mengatakan luasnya area yang telah habis terbakar menjadi alasan kuat mengapa peristiwa kebakaran hutan dan lahan seharusnya ditetapkan menjadi bencana nasional.

Riau tercatat memiliki area lahan perkebunan kelapa sawit sebesar 2.4 hektare dengan produksi sebanyak 7.5 ton minyak kelapa sawit dan menjadikannya provinsi penyumbang perekonomian nasional terbesar di Indonesia. Pembukaan lahan baru untuk kemudian dijadikan perkebunan kelapa sawit dilakukan dengan melakukan pembakaran hutan yang mengakibatkan kabut asap yang tidak hanya berdampak di Riau sendiri, namun juga negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura (Laili, 2018).

Kendati demikian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menyegel 42 perusahaan dan 1 lahan milik masyarakat yang diduga menjadi oknum pembakaran hutan, 5 di antaranya terdapat di Riau (tirto.id, 2019). Selain itu, metrotvnews.com (2019) juga melaporkan bahwa pemerintah melakukan modifikasi hujan buatan dengan menyemai 1,6 ton garam di kabupaten Siak dan kabupaten Bengkalis, Riau untuk memadamkan api dengan menggunakan satu pesawat khusus

teknologi modifikasi cuaca yang diterbangkan dari Lanud Abdul Rachman Saleh, Malang ke Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru.

Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga memastikan Polri akan menindak hukum oknum-oknum yang terlibat dalam disegelnya 10 lahan konsesi perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan di Riau oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sebagaimana dilansir dari CNN Indonesia.com (2019). Dikutip dari Tirto.id (2019), yang disayangkan dari peristiwa tahunan ini adalah tidak adanya perubahan, baik dari pencegahan sampai penanganan oleh pemerintah, seolah-olah pemerintah tidak belajar dari peristiwa sebelum-sebelumnya. Reaksi tidak masuk akal yang diutarakan oleh Moeldoko, selaku Kepala Staf Kepresidenan periode 2014-2019 bahwa kebakaran hutan dan lahan merupakan musibah dari Tuhan semakin menambah ironi dari peristiwa ini.

Perbedaan *framing* pemberitaan dari masing-masing media dalam menyoroti peristiwa kebakaran hutan dan lahan menjadi alasan mengapa penelitian ini dilakukan. Penelitian ini kemudian akan melihat bagaimana Tirto.id, sebagai sebuah media online nasional yang baru lahir pada tahun 2016 mbingkai pemberitaan terkait kebakaran hutan dan lahan di Riau tahun 2019. Berita pada dasarnya merupakan hasil konstruksi realitas oleh media. Melalui berita tersebut, ia dapat menciptakan opini publik di masyarakat, bagaimana masyarakat hendak memandang peristiwa yang diberitakan (Hamad, 2004). Interpretasi jurnalis dalam memaknai sebuah peristiwa pun berbeda, dan hal itu tertuang dalam sebuah teks berita. Artinya, realitas yang dikonstruksikan dalam berita merupakan hasil subjektivitas jurnalis. Isi dari sebuah berita telah dikonstruksi terlebih dahulu sesuai dengan kepentingan jurnalis dan lembaga media (Fianto & Aminulloh, 2014).

Berdasarkan penelitian milik Junaidi (2013) yang berjudul “*Coverage Framing Haze On Online Media Selected In Indonesia, Malaysia, and Singapore*” yang meneliti tentang bagaimana tiga media online yang berbeda dari tiga negara

berbeda, yaitu kompas.com, Utusan Malaysia Online, dan TheStraightTimes.com, yang mengonstruksikan peristiwa kebakaran hutan dan lahan dengan *frame* pemberitaan dengan cara yang berbeda. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode analisis *framing* milik Entman. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori analisis *framing*. Kompas.com selaku media online dari Indonesia membingkai penyebab peristiwa kabut asap yang terjadi disebabkan oleh faktor alam, bukan ulah tangan manusia. Tak hanya itu, Kompas.com juga membingkai bahwa penyebab dari kebakaran hutan dan lahan ialah ulah perusahaan kelapa sawit milik Malaysia dan Singapura. Berbeda dengan media online Malaysia, Utusan Malaysia Online mengonstruksikan perusahaan kelapa sawit milik Malaysia tidak terlibat sebagai penyebab kebakaran hutan dan lahan dan mengatakan bahwa kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh ulah warga lokal. Media online Singapura, The Strait Times.com mengonstruksikan pentingnya kerjasama antara Singapura dan Indonesia untuk mengatasi peristiwa kabut asap yang terjadi.

Sementara, penelitian yang dilakukan oleh Indrayani, Sari, & Vidyarini (2016) yang berjudul Merebut Citra Pemerintah Indonesia dalam Online News (Studi Komparasi Konstruksi Pemberitaan Bencana Kabut Asap di Kompas.Com dan Website Kementerian Kesehatan) menunjukkan adanya perbedaan *frame* pemberitaan yang dilakukan antara media online kompas.com dan website Kementrian Kesehatan yang merupakan representasi dari pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode analisis *framing* milik Entman dan merupakan penelitian kualitatif. Selain itu, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *framing* media dan *public relations*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompas.com membingkai peristiwa kabut asap disebabkan oleh kegagalan pemerintah dalam mengelola sumber daya alam, yang juga berdampak pada kualitas generasi masa depan. Selain itu, kompas.com menyebutkan jumlah penderita ISPA di beberapa area yang terdampak kabut asap. Berbeda dengan *website* Kementrian Kesehatan yang hanya cenderung menampilkan pemberitaan mengenai bantuan yang dikerahkan oleh pemerintah bagi korban

terdampak. Perbedaan bingkai pemberitaan antara kompas.com dan *website* Kementerian Kesehatan merupakan cerminan ideologi yang dianut masing-masing lembaga, di mana *website* Kementerian Kesehatan RI dianggap tidak transparan dalam memberitakan peristiwa terkait kabut asap, yakni cenderung menjaga citra pemerintah.

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis mengenai bagaimana Tirto.id, sebagai media online nasional, mengonstruksi dan membingkai pemberitaan mengenai kebakaran hutan dan lahan di Riau pada tahun 2019. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif yang menggunakan teori konstruksi realitas sosial di media dan analisis *framing*. Metode yang digunakan peneliti adalah analisis *framing* milik Entman.

*Framing* oleh media digunakan untuk menyederhanakan realitas agar mudah dipahami oleh khalayak. Hal itu dilakukan dengan cara menonjolkan hal-hal yang dianggap penting bagi media untuk diberitakan untuk menarik perhatian khalayak. Pendekatan *framing* berfungsi untuk menelaah bagaimana realitas dikonstruksi oleh media, apa teknik dan cara yang digunakan untuk menekankan suatu peristiwa. Hal itu bisa terlihat dari apa unsur yang dihilangkan, sehingga peristiwa dimaknai dengan bentuk tertentu (Eriyanto, 2002).

Menurut Entman, *framing* pada dasarnya melibatkan penyeleksian dan penonjolan. *Framing* bertujuan untuk *define problems*, yaitu menentukan masalah yang terjadi dalam teks berita berikut. Sebuah masalah tentu disebabkan oleh suatu hal, maka dari itu, media mencoba untuk membingkai penyebab terjadinya masalah dengan *diagnosing causes*. Kemudian, media menjatuhkan penilaian benar atau salah atas penyebab permasalahan yang terjadi atau *make moral judgements*. Terakhir, media memberikan *treatment recommendation*, solusi atas permasalahan yang terjadi (Entman, 1993).

Peneliti memilih untuk menggunakan analisis *framing* milik Entman dalam penelitian ini, karena analisis *framing* milik Entman dapat menjelaskan peristiwa kontroversial melalui elemen *define problems* yang dimilikinya. *Define problems* adalah elemen utama yang menentukan bagaimana sebuah peristiwa dilihat dan dipahami secara berbeda oleh jurnalis yang berbeda, sebagai masalah apa. Interpretasi jurnalis bersifat subjektif, sehingga sebuah peristiwa dapat dikonstruksi dan dibingkai secara berbeda oleh jurnalis yang berbeda pula. Analisis *framing* milik Entman membantu peneliti dalam memahami bingkai pemberitaan mengenai kebakaran hutan dan lahan oleh media online Tirto.id (Eriyanto, 2002)

Dalam penelitian ini, peneliti memilih media online Tirto.id untuk dianalisis, karena Tirto.id, dalam kurun 2 tahun setelah kemunculannya pada tahun 2016, berhasil menjadi salah satu media online Indonesia yang lolos verifikasi *International Fact-Checking Network* (IFCN). Tirto dinilai mampu untuk memberikan data yang kredibel, akurat, serta mampu dipertanggung jawabkan dalam menyajikan pemberitaan. Tirto juga terbuka atas koreksi, kritik dan tanggapan, sehingga Tirto.id sekiranya berkomitmen untuk mengurangi berita palsu dalam menyajikan pemberitaan melalui periksa data (tirto.id, 2018). Peneliti ingin melihat bagaimana pemberitaan mengenai kebakaran hutan dan lahan di Riau tahun 2019 dikonstruksikan dan dibingkai oleh Tirto.id itu sendiri, apakah Tirto.id menyajikan pemberitaan melalui pemeriksaan data yang akurat dan kredibel sesuai dengan fakta lapangan. Selain itu, Tirto.id juga menyebutkan bahwa dirinya merupakan media yang berdiri untuk semua golongan tidak berafiliasi dengan kepentingan politik manapun. Dengan demikian, peneliti ingin melihat bahwa pemberitaan terkait kebakaran hutan dan lahan di Riau tahun 2019 apakah sesuai dengan *tagline* yang diakuinya tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti memiliki keinginan untuk melihat *framing* pemberitaan mengenai kebakaran hutan dan lahan di Riau tahun 2019 di media online Tirto.id.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana *framing* pemberitaan tentang kebakaran hutan dan lahan di Riau tahun 2019 di media online Tirto.id?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana *framing* pemberitaan tentang kebakaran hutan dan lahan di Riau tahun 2019 di media online Tirto.id.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh penulis dari pelaksanaan dan penulisan skripsi ini, antara lain:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pengembangan ilmu komunikasi, khususnya penelitian mengenai analisis *framing*.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Referensi bagi pihak-pihak yang ingin meneliti mengenai *framing* dalam jurnalisme online.
2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam memahami *framing* pemberitaan dan dapat menyeleksi dengan baik berita yang disajikan oleh media yang ada, khususnya media online.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Berita dan Ideologi Media**

Charles Dana (dalam McKane, 2006) mendefinisikan berita sebagai semua hal yang disajikan yang belum pernah menarik perhatian komunitas besar (khalayak) sebelumnya. Hal ini memunculkan 2 poin, apabila khalayak telah mengetahui hal yang diberitakan, maka hal tersebut bukanlah berita. Maka dari itu, jurnalis harus secara cerdas menciptakan berita yang khalayak sebelumnya tidak ketahui. Poin kedua adalah skala dari peristiwa. Segala hal mulai dari munculnya ular di area perumahan sampai peristiwa kebakaran bisa dijadikan sebuah berita. Namun, apa yang kemudian menjadi poin penting adalah seberapa menarik berita tersebut sampai bisa menarik perhatian banyak pembaca.

Terdapat kriteria-kriteria tertentu untuk menceritakan peristiwa menjadi sebuah berita. Pertama, berhubungan dengan kejadiannya peristiwa tersebut. Sebuah peristiwa setidaknya harus terjadi baru-baru ini, maksimal sehari sebelum berita tersebut diterbitkan. Kedua, skala peristiwa. Semakin besar skala peristiwa, maka semakin menarik berita mengenai peristiwa tersebut di mata khalayak.

Ada 6 kategori yang dianggap patut untuk dijadikan berita yang dapat dijabarkan sebagai berikut, konflik, seperti politik, bencana alam, kejahatan, konflik di suatu tempat; selebritis, selebritis yang dimaksud ialah cerita mengenai orang-orang yang terkenal, seperti contohnya kasus hukum yang menimpa salah satu orang terkenal, meskipun cerita yang diangkat bukan cerita-cerita yang layak untuk dijadikan berita, namun orang terkenal inilah yang membuatnya layak untuk dijadikan sebuah berita; *human interest* mengenai hal-hal yang relevan dengan

kehidupan banyak orang sehari-hari, seperti perpajakan, perkiraan cuaca, cerita mengenai kesehatan, harga rumah,

merupakan hal-hal yang relevan bagi banyak orang di kehidupan sehari-hari; *human interest* mengenai hal-hal yang tidak biasa terjadi di kehidupan sehari-hari, seperti berita pasangan suami istri bunuh diri; kejanggalan, seperti kejadian-kejadian yang tidak sering ditemukan di kehidupan sehari-hari, peristiwa hujan darah, hujan kodok; dan penemuan saintifik sebuah riset, seperti penemuan obat baru.

Sumadiria (dalam Yahya, 2016) menjelaskan bahwa ada 3 jenis berita, *elementary*, *intermediate*, dan *advance*. Masing-masing jenis berita tersebut memiliki jenis berita masing-masing. Jenis-jenis berita *elementary* yaitu *straight news report*, *depth news*, dan *comprehensive news*. *Straight news report* adalah laporan berita dari suatu peristiwa yang terjadi dalam waktu singkat, yang biasanya ditulis dengan unsur 5W+1H. *Depth news* adalah laporan berita mendalam yang berisikan fakta-fakta tambahan dari peristiwa yang diberitakan. *Comprehensive news* adalah laporan berita yang disajikan secara menyeluruh.

Menurut Sumadiria (dalam Yahya, 2016) *intermediate news* berisikan *interpretative news story* dan *feature story*. *Interpretative news story* merupakan laporan berita interpretatif yang membahas tentang peristiwa kontroversial. Jenis berita ini mempertimbangkan nilai dan fakta, yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan ‘mengapa’. Sedangkan, *feature story* adalah berita yang kontennya difokuskan untuk menarik perhatian pembaca. Jenis berita ini mengutamakan *style* dan humor penulis dibandingkan informasi penting yang disajikan.

Sumadiria (dalam Yahya, 2016) juga menjelaskan bahwa *advance news* terdiri atas 3 jenis berita, *depth reporting*, *investigative report*, dan *editorial news*. *Depth reporting* adalah laporan mendalam mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Melalui *depth reporting*, khalayak dapat mengetahui inti permasalahan dari berbagai perspektif. *Investigative report* berisikan hasil laporan investigatif para jurnalis mengenai suatu permasalahan atau kontroversi. *Editorial news* adalah berita-berita yang berisikan opini yang mampu menciptakan opini publik.

Berita tidak hadir dengan sendirinya. Berita hadir sebagai hasil konstruksi dari media di tengah-tengah realitas sosial, nilai-nilai, serta ideologi. Berita merupakan cerminan dari realitas sosial dengan nilai ideologi yang berlaku yang dikonstruksikan oleh media. Berita merefleksikan ideologi dan keyakinan lembaga yang mendominasi di kelompok masyarakat (Mahdi, 2015).

Ideologi didefinisikan sebagai sebuah sistem keyakinan atau gagasan yang mengandung pengetahuan, norma, dan nilai yang diperjuangkan oleh sekelompok orang dalam kehidupan sosialnya (Karomani, 2004). Paradigma konstruksionisme mengenalkan konsep ideologi untuk menjelaskan bagaimana jurnalis berpihak kepada suatu pihak dibanding pihak yang lainnya dalam mengemas berita. Kecenderungan atau ideologi tersebut yang menentukan bagaimana fakta dipahami, diambil, dan dibuang (Saragih, 2012).

Ideologi adalah sebagai seperangkat kesadaran palsu yang digunakan oleh kelompok yang berkuasa untuk mendominasi kelompok lain. Dominasi inilah yang membuat perangkat ideologi yang disebarkan terlihat sangat natural dan diterima sebagai kebenaran oleh masyarakat. Ideologi ini disebarkan melalui institusi pendidikan bahkan media (Mahdi, 2015).

Media memiliki fungsi untuk menyampaikan nilai, norma, atau gagasan, juga menjembatani dialog antar masyarakat mengenai nilai, norma, dan gagasan (Pawito, 2014). Media sebagai alat sosialisasi berperan penting dalam menciptakan opini publik. Erat kaitannya dengan kekuasaan, media kerap kali digunakan oleh penguasa untuk mengontrol publik dengan menyajikan berita-berita yang dimanipulasi untuk kepentingan penguasa. Ideologi sering dihubungkan dengan relasi kekuatan sosial dan latar belakang ekonomi politik. Namun, ideologi tidak akan efektif tanpa adanya praktik dan hal itu terwujudkan dalam praktik konstruksi realitas oleh media (Yilmaza & Kirazoluğu, 2014).

Media dilihat sebagai instrumen ideologi yang memberi pengaruh dan mendominasi kelompok lain. Media tidak dilihat sebagai institusi yang netral, di mana ia tidak lepas dari adanya kepentingan-kepentingan tokoh di dalamnya. Media berperan sebagai 2 hal penting, yakni sumber dari hegemoni atau dominasi terhadap suatu kelas dan sumber legitimasi bagi penguasa untuk terus dapat berkuasa karena dianggap benar oleh publik melalui media (Saragih, 2012).

Ideologi media memiliki sangkut paut dengan bagaimana realitas yang ada di masyarakat, dikonstruksi dan ditampilkan oleh media untuk khalayak dengan cara atau lambang tertentu. Pada dasarnya, ideologi media adalah nilai-nilai dasar yang dianut media melalui pesan yang disampaikan, khususnya dalam bentuk berita. Ideologi media dapat menentukan bagaimana khalayak meyakini realitas yang ada berdasarkan berita yang disajikan. Konsep-konsep seperti keyakinan, pemikiran, sudut pandang, dan nilai lekat hubungannya dengan ideologi media (Pawito, 2014).

## **2.2 Konstruksi Realitas Sosial di Media**

Realitas menurut Arintowati (dalam Suryadi, 2011) diartikan sebagai kualitas yang terdapat dalam peristiwa, yang diakui keberadaannya oleh manusia. Realitas sosial terbentuk atas proses dialektika manusia dalam mengeksternalisasikan dan mengobjektivikasi makna dan pengalaman ke dalam dirinya. Melalui tindakan dan interaksi, manusia tanpa henti menciptakan kenyataan yang dimiliki dan dialami dengan penuh arti.

Media memiliki fokus untuk menceritakan kembali peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita. Proses menceritakan tersebut adalah proses konstruksi realitas. Setiap berita yang dilaporkan adalah hasil konstruksi realitas. Dalam mengonstruksikan realitas, bahasa menjadi unsur penting agar tercipta narasi yang dapat dimengerti dan dimaknai. Pilihan kata dan penggunaan gambar dapat menentukan makna yang muncul pada benak khalayak terhadap cerminan realitas atau bahkan menciptakan realitas baru (Hamad, 2004).

Syahputra (dalam Yahya, 2016) menyatakan, media tidak dianggap netral dalam menyajikan laporan dari suatu peristiwa. Penyajian berita dan informasi dilihat sebagai produksi dan pertukaran makna dari realitas. Media memiliki kemampuan untuk menciptakan citra dari suatu realitas melalui berita-berita yang diproduksinya.

McQuail (2010) dalam bukunya menyebutkan bahwa media memiliki enam fungsi mediasi dalam menyampaikan realitas. Pertama, sebagai *window*, yakni menceritakan realitas secara apa adanya tanpa ada campur tangan pihak manapun. Kedua, sebagai *mirror*, sebagai pantulan dari peristiwa yang terjadi. Ketiga, *gatekeeper*, yakni menyeleksi realitas untuk kemudian dijadikan pusat perhatian publik. Dalam hal ini, realitas tidak lagi utuh. Keempat, sebagai *interpreter*, atau melaporkan peristiwa sesuai dengan apa yang menurutnya perlu untuk disampaikan. Kelima, sebagai *forum*, yakni laman untuk berdiskusi atau bahkan berdebat. Terakhir, sebagai *barrier*, yaitu penghalang antara publik dan realitas yang sebenarnya. Apa yang disampaikan media bisa saja menyimpang dari kenyataan yang sebenarnya.

Bungin (dalam Chairani & Kania, 2014) menjelaskan, media berada di posisi di mana ia mengoreksi dan melengkapi substansi konstruksi sosial atas realitas. Hal itu tentunya melalui beberapa proses atau tahap penting. Konten konstruksi sosial media dan proses lahirnya konstruksi sosial media dijelaskan dalam tahap-tahap berikut ini:

1. Tahap Menyiapkan Materi Konstruksi

Dalam tahap ini, media menyiapkan materi konstruksi sosial media untuk didistribusikan kepada *desk editor*. Terdapat 3 hal penting dalam mempersiapkan materi konstruksi sosial, yakni media berpihak pada kapitalisme, media berpihak semu kepada rakyat, dan media berpihak pada kepentingan umum.

## 2. Tahap Sebaran Konstruksi

Pada tahap ini, semua informasi yang dianggap penting oleh media, juga harus dianggap penting oleh khalayak. Persebarannya harus mencakup setiap pembaca.

## 3. Tahap Pembentukan Konstruksi Realitas

Setelah sampai kepada khalayak atau pembaca, terdapat pembentukan konstruksi masing-masing pada khalayak secara berbeda berdasarkan hasil sebaran yang dilakukan oleh media. Selain itu, dibentuk juga konstruksi citra oleh media yang terdiri dari 2 model, yaitu *good news* dan *bad news*. *Good news* mengonstruksikan suatu pemberitaan sebagai pemberitaan yang baik. Sedangkan, *bad news* menggambarkan pemberitaan yang buruk.

## 4. Tahap Konfirmasi

Pada tahap ini, khalayak memberikan argumentasi terhadap konstruksi sosial yang diberitakan oleh media.

Isi media merupakan hasil konstruksi realitas yang menggunakan bahasa, seperti teks dan gambar, untuk menceritakan kembali peristiwa yang ada. Bahasa-bahasa yang digunakan tersebut mampu mempengaruhi bagaimana sebuah realitas dipersepsikan oleh khalayak. Media memiliki peluang besar untuk mempengaruhi bagaimana realitas akan digambarkan dan dimaknai melalui konstruksi realitas tersebut (Chairani & Kania, 2014).

## 2.3 Jurnalisme dan Media Online

Jurnalisme adalah aktivitas mengumpulkan, menilai, membuat, dan menyajikan berita dan informasi. Jurnalisme merupakan lambang demokrasi dari sebuah negara. Semakin demokratis sebuah masyarakat, maka semakin banyak informasi dan berita yang dihasilkan (American Press Institute, 2019). Media yang

independen dan bertanggung jawab diperlukan untuk menciptakan demokrasi yang sehat. Publik mengandalkan media sebagai sumber informasi, baik dari politik sampai olahraga. Jurnalis berperan penting dalam menginformasikan kegiatan-kegiatan pemerintahan dan institusi yang memiliki kuasa. Informasi seperti hukum, kebijakan publik sekiranya dapat membantu publik dalam mengambil keputusan (Evans, 2012).

Banyaknya informasi yang tersebar perlu disortir, diorganisir, dan diinterpretasikan. Hal itu merupakan tugas dari seorang jurnalis. Peristiwa penting yang terjadi di masyarakat dikumpulkan dan diseleksi. Setelah informasi telah dikumpulkan, fakta-fakta telah dipertimbangkan, cerita telah dituliskan, kemudian dilahirkan menjadi apa yang dikenal dengan nama berita. Ada kaidah, etik, serta standar moral tertentu yang harus dipenuhi seseorang untuk menjadi seorang jurnalis. Kemunculan teknologi dan internet menciptakan kesempatan baru bagi jurnalis (Glencoe, 2005).

Berita-berita yang ada di internet merupakan kombinasi atas jurnalisisme cetak, audio, dan video, sekaligus berita-berita yang disajikan secara mendalam (*in-depth*). Jurnalisisme yang tadinya hanya bertumpu pada media tradisional seperti koran, kini menapakinya internet untuk mengembalikan lonjakan penjualan dan menggandeng lebih banyak audiens. Terlebih, jurnalisisme online kini juga membuka ruang diskusi bagi publik mengenai topik-topik yang ada. Adanya transformasi jurnalisisme dari tradisional menuju online menunjukkan bahwa jurnalisisme berusaha untuk beradaptasi terhadap perkembangan teknologi sekaligus untuk tetap mempertahankan sekaligus menarik perhatian audiens (Fleming, Hemmingway, Moore, & Welford, 2006).

Media online pada dasarnya adalah kumpulan dari berita-berita dan informasi yang dapat diakses dengan teknologi bernama internet. Internet didesain dengan teknologi dua arah yang dapat memproduksi teks interaktif sekaligus menjadi wadah berdiskusi (Hall, 2001). Media online sebagai bagian dari *new media* dengan

teknologi pemberitaan berbasis komputer menjadi hal baru dalam dunia jurnalistik. Terlebih, adanya media online memunculkan 3 keuntungan dalam waktu yang bersamaan, yakni kecepatan, kedalaman berita, serta interaktivitas publik. Sebuah peristiwa dapat segera diberitakan secara langsung dengan teknologi internet. Publik bisa segera mengetahui apa yang sedang terjadi di luar sana. Dalam menuliskan berita, media online tidak memiliki jumlah batas halaman. Berbeda dengan media tradisional, seperti halnya koran. Di media online, jurnalis dapat menuliskan berita seinvestigatif dan sedalam mungkin untuk digali dan didiskusikan oleh publik dalam *platform* tersebut (Allan, 2006).

Menurut Foust (2005), keuntungan-keuntungan dari munculnya media *online* yaitu:

1. *Audience control*: audiens dapat memilih tipe informasi seperti apa yang ingin mereka ketahui.
2. *Time and place access*: audiens dapat mengakses kapanpun dan dimanapun informasi yang ingin diketahui.
3. *Nonlinearity*: teks informasi yang ada di media *online* dapat disampaikan tidak secara runut.
4. *Storage and retrieval*: kemampuannya untuk menyimpan banyak informasi dan data.
5. *Unlimited space*: tidak ada keterbatasan waktu dan tempat sebagaimana koran.
6. *Immediacy*: audiens dapat langsung mengakses berita yang diinginkan.
7. *Multimedia capability*: dapat mengakses gambar, video, audio, dan media lain.
8. *Audience participation*: audiens dapat secara bebas terlibat dalam berita yang disajikan.

#### **2.4 Analisis Framing**

*Framing* adalah proses media menceritakan realitas. Proses menceritakannya dilakukan dengan cara menonjolkan salah satu aspek dan membesar-besarkannya. Sehingga, dari realitas yang sudah diseleksi dan ditonjolkan tersebut dapat lebih mudah diingat oleh khalayak. *Framing* membuat dunia lebih mudah dimengerti, karena realitas yang ada disederhanakan dalam kategori tertentu sehingga mudah dimaknai. Namun, sebuah realitas yang sama dapat dimaknai secara berbeda apabila dikonstruksi dengan menggunakan *frame* yang juga berbeda (Eriyanto, 2002).

Nugroho, Eriyanto, dan Surdiasis (dalam Saragih, 2012) menyatakan, *framing* adalah cara jurnalis menafsir pesan dengan melibatkan pengalaman hidupnya dan kecenderungan psikologisnya. Hal itu yang kemudian menciptakan wacana yang berbeda dari jurnalis yang berbeda. *Framing* pada dasarnya adalah proses konstruksi sosial. Media secara aktif menciptakan *framing* agar bisa diinterpretasikan dan didiskusikan oleh para pembacanya (Scheufele, 1999).

Eriyanto (2002) dalam bukunya menjabarkan beberapa definisi *framing* oleh para ahli sebagai berikut,

Tabel 1. *Framing* menurut para ahli

Robert N. Entman	Penyeleksian beberapa aspek dari realitas sehingga aspek tersebut lebih menonjol dibanding aspek yang lainnya. Penempatan sebuah informasi berdampak pada seberapa besar ia akan tersorot atau diperhatikan oleh pembaca.
William A Gamson	Skema pemahaman individu yang digunakan untuk mengonstruksi makna pesan yang disampaikan dan menafsirkan makna pesan yang diterima.
Todd Gitlin	Strategi bagaimana realitas dibentuk dan disederhanakan untuk ditampilkan kepada

	khalayak dengan menyeleksi, mengulang, menekankan suatu aspek dari realitas agar tampak menonjol dan menarik perhatian khalayak.
David Snow dan Robert Sanford	Memaknai peristiwa yang diwujudkan dengan <i>framing</i> melalui kata kunci tertentu, sumber informasi, dan kalimat tertentu.
Amy Binder	Individu menginterpretasi peristiwa dengan menempatkan, menafsirkan, mengidentifikasi, dan melabeli peristiwa secara langsung. <i>Frame</i> berfungsi untuk memudahkan khalayak memahami suatu peristiwa.
Zhongdang Pan dan Gerald Kosicki	Strategi mengonstruksi dan memproses berita. Rutinitas dan konvensi pembentukan berita digunakan untuk mengkode informasi dan menafsir peristiwa.

Sumber: Eriyanto, 2002

D'Angelo (dalam McQuail, 2010) menyebutkan bahwa *framing* memiliki tiga paradigma. Pertama, paradigma kognitif, di mana jurnalis menuliskan teks beritanya sesuai dengan apa yang ia rasakan terhadap realitas tersebut. Kedua, paradigma konstruktivis, yang melihat jurnalis menyajikan berita sesuai dengan posisi dari sponsor berita. Ketiga, paradigma kritis yang melihat *framing* adalah hasil akhir dari proses pengumpulan berita dan sudah tercampur tangan elit atau pejabat. Hegemoni mempengaruhi *framing*.

Terdapat dua aspek dalam *framing*, memilih realitas dan menuliskannya. Dalam memilih realitas, ada dua kemungkinan yang terkandung, yakni apa yang hendak ditekankan atau ditonjolkan, serta apa yang akan dihilangkan. Dalam

menekankan suatu aspek, dilakukanlah proses pemilihan *angle* pemberitaan. Oleh karena itu, realitas yang sama dapat dipahami dan dikonstruksi secara berbeda oleh media yang berbeda. Dalam menuliskan realitas, proses seperti penempatan gambar, penulisan judul, pemilihan kata menjadi aspek-aspek yang diperhatikan agar unsur yang ingin ditonjolkan bisa diperhatikan, dimaknai, dan diingat oleh khalayak (Eriyanto, 2002).

Entman sendiri berpendapat, *framing* melibatkan seleksi dan penekanan, artinya, *framing* adalah memilih beberapa aspek dari realitas dan membuatnya menonjol dalam sebuah teks komunikasi, baik secara pengulangan atau penempatan kata, atau mengasosiasikannya dengan simbol-simbol tertentu. Metode *framing* bergantung pada pembaca mengartikan teks beritanya sesuai dengan konsep yang telah lebih dulu ada di dalam pikirannya dan situasinya (Entman, 1993). Oleh sebab itu, agar tercipta pemahaman yang sama antara pembaca dan penulis, perlu adanya kesamaan ideologi, latar belakang antara jurnalis dan pembaca (Anggraeni, 2014).

Ada 4 unsur yang harus diteliti apabila menggunakan analisis *framing* milik Entman. Unsur pertama adalah *define problems*, yaitu menentukan permasalahan yang diberitakan dalam teks berita. Kedua, *diagnose cause*, menentukan penyebab masalah dari permasalahan yang diberitakan dalam teks berita. Ketiga, *moral judgement*, yaitu memberikan penilaian atas benar atau salah terhadap masalah yang terjadi, dan keempat adalah *suggest remedies*, solusi yang disarankan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Entman menyatakan bahwa kultur memegang peran penting dalam proses *framing*, karena komunikator, secara disadari maupun tidak, membuat *framing* sesuai dengan sistem kepercayaan mereka dan hal itu termanifestasi dalam teks yang ada atau tiada kata kuncinya, gambar stereotip, ataupun frase (Entman, 1993).

Konsep *framing* mendapat pengaruh dari bidang psikologi dan sosiologi. Pendekatan psikologi yaitu berupa bagaimana individu mencoba untuk melihat dan memaknai peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitarnya. *Framing* dalam hal ini berupaya untuk membuat pesan lebih menonjol dan dapat dimaknai dengan dimensi

tertentu. Sebuah teks berita akan dimaknai berbeda oleh khalayak akibat dari adanya *framing*. Sedangkan, dalam pendekatan sosiologi, berita merupakan hasil *framing* dari institusi sosial atau organisasi yang menempatkan, mencari, dan menyebarkan berita melalui praktik profesional (Eriyanto, 2002).

Dalam penelitian ini, peneliti memilih untuk menggunakan analisis *framing* milik Entman karena analisis *framing* milik Entman dapat menjelaskan fenomena atau realitas kontroversial melalui elemen *define problems* yang dimilikinya. *Define problems* adalah elemen utama yang dilihat dalam melakukan analisis *framing*. Elemen ini menentukan bagaimana sebuah peristiwa dipahami secara berbeda oleh jurnalis yang berbeda, bagaimana sebuah peristiwa dilihat, sebagai masalah apa. Mengingat interpretasi jurnalis bersifat subjektif, maka dari itu, sebuah peristiwa yang sama dapat dibingkai secara berbeda dari jurnalis yang berbeda (Eriyanto, 2002).

## 2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan dua jurnal. Jurnal pertama merupakan jurnal milik Junaidi (2013) yang berjudul “*Coverage Framing Haze On Online Media Selected In Indonesia, Malaysia, and Singapore.*” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tiga media yang berbeda dari tiga negara yang berbeda, yaitu Kompas.com (Indonesia), Utusan Malaysia Online (Malaysia), dan The StraitsTimes.com (Singapura) mengonstruksikan dan membingkai pemberitaan terkait kabut asap yang terjadi di Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan konstruksi realitas dalam teks berita yang dibentuk oleh ketiga media berbeda dari negara yang berbeda juga. Dalam *define problems*, Kompas.com selaku media dari negara Indonesia mengonstruksikan bahwa kabut asap merupakan sebuah bencana alam, bukan bencana yang disebabkan oleh manusia, serta adanya keterlibatan perusahaan kelapa sawit milik Malaysia dan Indonesia yang menyebabkan bencana kabut asap ini semakin membesar. Berbeda dengan media online milik Malaysia yang membingkai

bencana kabut asap di Indonesia bukan disebabkan oleh perusahaan kelapa sawit yang ada di Indonesia, melainkan media Malaysia mengatakan bahwa penyebab bencana kabut asap ini adalah kesalahan dari masyarakat lokal itu sendiri serta menyarankan untuk melakukan kerjasama antar negara terkait guna mengatasi bencana ini. Media Singapura membingkai isu ini dengan menawarkan bantuan berupa kerjasama antara Singapura-Indonesia untuk menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan.

Dalam membingkai penyebab masalah (*diagnose causes*), Kompas.com membingkai bahwa peristiwa kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh faktor alam dan perusahaan-perusahaan asing terkait. Utusan Malaysia Online membingkai peristiwa kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh masyarakat Indonesia. TheStraitsTimes.com membingkai penyebab kebakaran hutan dan lahan bukan karena faktor alam, melainkan kegiatan masyarakat lokal. Data-data ini menunjukkan bahwa setiap media dari negara yang berbeda mencoba untuk membela negaranya masing-masing dalam membingkai pemberitaan terkait kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

Dalam memberi penilaian moral (*make moral judgement*), Kompas.com menyatakan bahwa pemerintah Indonesia telah mencoba untuk mengatasi permasalahan kebakaran hutan dan lahan, namun hal tersebut sia-sia karena perusahaan kelapa sawit milik asing yang terlibat dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan dirasa tidak memiliki aturan disiplin untuk menghentikannya. Media Malaysia mengonstruksikan bahwa perusahaan yang terlibat tidak menyalahi aturan yang ada dan Malaysia secara terbuka menawarkan bantuan untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Tidak jauh berbeda dengan media Singapura yang juga menawarkan bantuan untuk menanggulangi kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi.

Terkait saran dan rekomendasi yang diberikan oleh ketiga media online tersebut mengenai peristiwa kabut asap (*suggest remedies*), media online Malaysia dan Singapura sama-sama menawarkan bantuan untuk mengatasi kasus kebakaran hutan dan lahan. Namun, berbeda dengan media dari Indonesia yang mengatakan bahwa apa yang perlu digalakkan dari kasus ini adalah hukum dan aturan yang harus lebih tegas bagi perusahaan asing terkait.

Penelitian ini menjadi referensi untuk penelitian sekarang dalam melihat bagaimana Tirto.id sebagai sebuah media online yang berasal dari Indonesia, membingkai dan mengonstruksikan peristiwa kebakaran hutan dan lahan di Riau tahun 2019, apakah Tirto.id sama-sama mengonstruksikan peristiwa kebakaran hutan dan lahan akibat dari faktor alam dan kegiatan pembakaran yang dilakukan oleh perusahaan kelapa sawit milik asing layaknya bagaimana kompas.com mengonstruksikannya atau justru sebaliknya. Selain itu, peneliti juga ingin melihat, apakah dengan perbedaan negara asal antara Tirto.id dengan Utusan Malaysia Online dan TheStraitsTimes.com, juga menghasilkan perbedaan konstruksi dan bingkai mengenai peristiwa kebakaran hutan dan lahan di Riau tahun 2019. Penelitian ini juga menggunakan konsep analisis *framing* milik Entman yang menggunakan empat elemen seperti, *define problems*, *diagnose causes*, *make moral judgement*, dan *suggest remedies*

Penelitian kedua merupakan penelitian milik Indrayani, Sari, & Vidyarini (2016) yang berjudul Merebut Citra Pemerintah Indonesia dalam Online News (Studi Komparasi Konstruksi Pemberitaan Bencana Kabut Asap di Kompas.Com dan Website Kementerian Kesehatan). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode analisis *framing* milik Entman.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan hasil pembingkai antara kedua website tersebut. Kompas.com cenderung membingkai bencana kabut asap sebagai kelalaian pemerintah dalam mengelola sumber daya alam

yang berdampak negatif pada rencana jangka panjang generasi masa depan. Berbeda dengan pemberitaan yang disajikan oleh website Kementerian Kesehatan yang cenderung memberitakan penerangan bantuan serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi permasalahan kabut asap. Dalam hal ini, Kementerian Kesehatan hanya melakukan pemberitaan untuk menjaga citra pemerintah tanpa menjalankan fungsi *public relations* secara benar karena pemberitaan yang ditampilkan bersifat sepihak dan tidak transparan dalam menanggulangi kasus kabut asap.

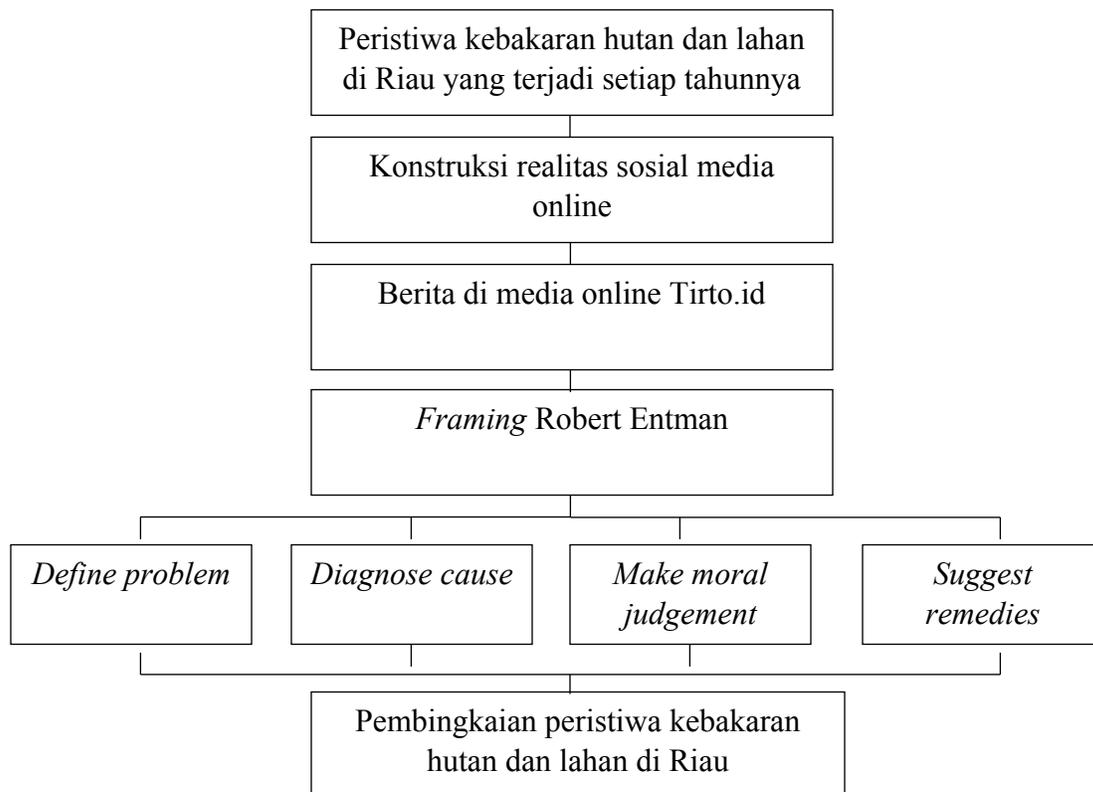
Penelitian ini menjadi referensi untuk penelitian sekarang dalam melihat perbedaan pbingkaiian pemberitaan yang dilakukan kompas.com dan *website* Kementerian Kesehatan terkait pemberitaan kebakaran hutan dan lahan. Seperti yang diketahui, Kementerian Kesehatan adalah perwakilan pemerintah yang berkepentingan dalam memberitakan peristiwa kebakaran hutan dan lahan di Riau dan cenderung mengupayakan pemberitaan bernada positif mengenai upaya pemerintah dalam menanggulangi peristiwa kebakaran hutan dan lahan tersebut. Hal ini tercermin dari judul-judul pemberitaan yang diangkat, seperti salah satu berita yang diterbitkan pada tanggal 18 September 2015 di laman depkes.go.id yang berjudul “Kemenkes Kirim Bantuan Untuk Tanggulangi Dampak Kesehatan Akibat Asap”. Berita ini berisikan upaya yang dilakukan Kementerian Kesehatan dalam menanggulangi krisis kesehatan dengan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan, seperti pendistribusian masker dan obat ke beberapa wilayah terdampak. Pemberitaan ini juga hanya bersumber dari Menteri Kesehatan periode 2014-2019, Prof. dr. Nila F Moelok, Sp.M (K).

Berbeda dengan Tirto.id yang mengklaim dalam *website*-nya bahwa ia berdiri di atas kepentingan umum dan tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Penelitian ini ingin melihat apakah hal tersebut tercermin dari hasil konstruksi peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang dilakukannya, seperti mengungkap fakta-

fakta atau kebenaran yang tidak diutarakan oleh Kementerian Kesehatan atau justru sebaliknya. Apakah sumber-sumber pemberitaan berasal dari beragam narasumber dan menjadikan beritanya kredibel, sebagaimana yang diklaim dalam *website* nya.

## 2.6 Kerangka Pemikiran

Tabel 2. Kerangka pemikiran penelitian



Sumber: Data peneliti, 2019



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif. Hal itu disebabkan karena peneliti menganalisis teks berita Tirto.id dalam mengonstruksikan peristiwa kebakaran hutan dan lahan di Riau tahun 2019. Penelitian kualitatif memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan penelitian lain. Seperti yang disebutkan Creswell (2009), penelitian kualitatif memiliki karakteristik seperti, peneliti terlibat sepenuhnya. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dan informasi sendiri dengan mengumpulkan dan mengkaji dokumen-dokumen berupa teks berita mengenai kebakaran hutan dan lahan di media online Tirto.id pada periode Agustus-September 2019. Peneliti tidak menggunakan kuesioner dalam mengumpulkan data penelitian. Lalu, menurut Neuman (2014) dalam bukunya juga menjelaskan karakteristik dari penelitian kualitatif seperti, mengonstruksikan realitas sosial dan kebudayaan. Penelitian ini menganalisis bagaimana media online Tirto.id mengonstruksikan dan membingkai peristiwa kebakaran hutan dan lahan di Riau tahun 2019 melalui teks berita yang disajikannya. Kemudian, penelitian kualitatif juga berfokus pada peristiwa. Dalam hal ini, peristiwa yang disorot adalah peristiwa kebakaran hutan dan lahan di Riau pada tahun 2019. Sementara, menurut Miles, Huberman, & Saldana (2013) kekuatan dari penelitian kualitatif ialah pertanyaan berupa “mengapa” dan “bagaimana”, bukan hanya sekedar “apa”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana media online Tirto.id mengonstruksikan dan membingkai berita tentang kebakaran hutan dan lahan di Riau.

Riset kualitatif berfokus pada bagaimana sekelompok orang memiliki cara yang berbeda-beda dalam mempersepsikan sebuah realitas, sehingga, data yang

digunakan dalam penelitian kualitatif adalah laporan dari pengalaman, bukan data numerik.

Penelitian kualitatif berfokus untuk mengembangkan pemahaman dari suatu realitas sosial (Hancock, Ockleford, & Windridge, 2009). Penelitian kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan data-data dalam bentuk teks, gambar, atau suara (Guest, Namey, & Mitchell, 2013). Tujuan dari riset kualitatif adalah untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan isu atau fenomena secara sistematis berdasarkan sudut pandang dari individu atau populasi yang diteliti (Mohajan, 2018).

Ada karakteristik-karakteristik tertentu yang membedakan penelitian kualitatif dengan penelitian lainnya. Pertama, penelitian kualitatif mempelajari makna dari hidup sekelompok orang di bawah realitas yang sebenarnya. Kedua, penelitian kualitatif memiliki kemampuan untuk merepresentasikan perspektif dari subjek yang diteliti. Ketiga, penelitian kualitatif selalu mencakup kondisi-kondisi seperti sosial, institusional, lingkungan yang semuanya berhubungan dan mempengaruhi kehidupan orang-orang. Keempat, penelitian kualitatif tidak hanya cerita-cerita mengenai kehidupan sehari-hari. Penelitian kualitatif didorong akibat adanya keinginan untuk menjelaskan sebuah peristiwa dengan konsep-konsep tertentu yang telah ada, bahkan bertujuan untuk mengembangkan konsep baru. Kelima, penelitian kualitatif mengumpulkan, mengintegrasikan, dan menampilkan data dari berbagai sumber untuk menguatkan penelitian yang sedang dikerjakan. Tujuan dari penggunaan beragam data ini adalah meningkatkan kredibilitas dan reliabilitas dari penelitian (Mason, 2002).

### **3.2 Paradigma Penelitian**

Paradigma adalah sebuah kerangka berpikir yang menjelaskan bagaimana peneliti memandang dan menyikapi sebuah realitas (Amanda, 2014). Paradigma menjelaskan bagaimana penelitian dimaknai dan dikonstruksikan berdasarkan data-data yang didapat dari pengalaman individu, sehingga penting bagi peneliti untuk menjelaskan paradigma apa yang digunakan (Kivunja & Kuyini, 2017).

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivis. Konsep konstruktivis pertama kali diperkenalkan oleh Peter L. Berger. Berger menyatakan bahwa realitas tidak terbentuk secara alami, melainkan dibentuk dan dikonstruksi. Setiap orang dapat memiliki konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas dan hal tersebut bergantung pada pengalaman, lingkungan sosial, dan pendidikan tertentu. Dalam pemilihan dan pembuatan berita, paradigma konstruktivis memandang bahwa teks berita adalah hasil konstruksi aktif oleh jurnalis dan media (Eriyanto, 2002)

Asumsi dasar dari paradigma konstruktivis menurut Schwandt (dalam Mertens, 2010) adalah kenyataan bahwa ilmu pengetahuan merupakan hasil konstruksi oleh orang-orang yang secara aktif terlibat dalam proses penelitian dan mencoba untuk memahami serta memaknai kenyataan tersebut berdasarkan sudut pandangnya. Oleh karena itu, mengonstruksikan dapat diartikan sebagai proses belajar (Adom, Yeboah, & Ankrah, 2016).

Paradigma konstruktivis memiliki penilaian tersendiri dalam memandang media, wartawan, dan berita. Terdapat dua karakteristik penting dalam paradigma konstruktivis yang dapat dijabarkan seperti berikut,

1. Paradigma konstruktivis menekankan bagaimana seseorang memaknai dan menggambarkan realitas. Makna adalah proses aktif yang diartikan seseorang dalam suatu pesan.
2. Dalam paradigma konstruktivis, komunikasi diyakini sebagai sebuah proses yang dinamis. Dalam menyampaikan pesan, komunikator tentu merangkai ucapan tertentu mengenai gambaran tentang realitas (Eriyanto, 2002).

Dalam penelitian ini, paradigma konstruktivis digunakan untuk melihat bagaimana media online Tirto.id memaknai dan mengonstruksikan peristiwa kebakaran hutan dan lahan di Riau tahun 2019 melalui teks-teks berita yang

dihasilkan. Teks-teks berita tersebut berisikan kata, kalimat, maupun gambar untuk menggambarkan dan menekankan makna dari realitas yang digambarkan.

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi. Metode ini merupakan prosedur sistematis yang bertujuan untuk mengkaji dan mengevaluasi dokumen-dokumen yang ada, baik dokumen cetak maupun elektronik. Kemudian, dokumen-dokumen yang ada tersebut dijadikan sumber data untuk diuji dan diinterpretasikan untuk menghasilkan pengetahuan empiris (Bowen, 2009). Peneliti mengumpulkan pemberitaan mengenai kebakaran hutan dan lahan di Riau sepanjang bulan Juli-Oktober 2019 di media online Tirto.id untuk kemudian dijadikan *sample* penelitian untuk diuji.

Dalam penelitian ini, *sample* penelitian dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan *sample* yang sesuai dengan kriteria tertentu dengan menggunakan berbagai metode. Dalam *purposive sampling*, *sample* yang dipilih jarang sekali merepresentasikan populasi keseluruhan dari penelitian. Penggunaan *purposive sampling* juga bertujuan untuk mengidentifikasi kasus-kasus tertentu melalui *in-depth investigation* agar mendapat pemahaman mendalam mengenai objek yang diteliti (Neuman, 2014).

Peneliti dalam hal ini memilih pemberitaan mengenai kebakaran hutan dan lahan di Riau tahun 2019 di media online Tirto.id sepanjang bulan Agustus-Oktober 2019 sebagai *sample* untuk digunakan sebagai bahan penelitian. Pemilihan periode ini dipilih berdasarkan pada meningkatnya jumlah pemberitaan mengenai kebakaran hutan dan lahan di Riau tahun 2019. berdasarkan data dari SiPongi Kebakaran hutan dan lahan Monitoring Sistem (2019), sepanjang bulan Agustus dan September 2019, terdapat 594 dan 1.055 *hotspot* tersebar di Riau yang merupakan persebaran *hotspot* terbanyak dibandingkan sebaran *hotspot* pada bulan lainnya. Sementara, sepanjang bulan Oktober, jumlah *hotspot* sempat mengalami penurunan menjadi 15, namun

kabut asap terpantau tetap mengganggu sepanjang dua kilometer karena masih terjadinya kebakaran lahan gambut di daerah pinggiran Pekanbaru (tirto.id, 2019) Berita yang peneliti analisis yaitu:

1. 12 Agustus 2019: Polri: PT Sumber Sawit Sejahtera Jadi Tersangka Karhutla Riau
2. 15 Agustus 2019: Polisi Tak Tahan Bos PT Sumber Sawit Sejahtera
3. 14 September 2019: Lahan Perusahaan Sawit Malaysia yang Diduga Dibakar Disegel KLHK
4. 15 September 2019: Karhutla Riau: 27 Titik Api Kategori Tinggi Terdeteksi
5. 16 September 2019: Kendala Pemadaman Karhutla versi Polri: Air dan Lokasi
6. 17 September 2019: Yang Keliru dari Pernyataan Moeldoko soal Korban Karhutla Riau
7. 18 September 2019: Wiranto Klaim Asap Akibat Karhutla Tak Separah Pemberitaan di Media
8. 18 September 2019: Walhi Sebut Hujan Buatan Sengaja Diturunkan Saat Jokowi ke Riau
9. 20 September 2019: Cara Atasi Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan-Sumatera Versi Jokowi hingga BNPB
10. 20 September 2019: Pernyataan-Pernyataan Kontroversial Pejabat Indonesia soal Karhutla
11. 22 September 2019: Greenpeace: Paru-Paru Warga Lebih Kotor daripada Sepatu Jokowi
12. 23 September 2019: Pemprov Riau Tetapkan Status Darurat Pencemaran Udara Karhutla
13. 7 Oktober 2019: Tumpulnya Penegakan Hukum Penyebab Karhutla Terulang
14. 7 Oktober 2019: Karhutla: Konspirasi Elite dan Dugaan Korupsi Sumur Bor
15. 8 Oktober 2019: Omong Kosong Pejabat Soal Karhutla yang Tak Perlu Dipercaya

16. 11 Oktober 2019: Kabut Asap Pekat Kembali Menyelimuti Beberapa Wilayah di Sumatera

17. 21 Oktober 19: Polda Riau Segera Tetapkan Korporasi sebagai Tersangka Karhutla

### 3.4 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data selesai dalam periode tertentu. Miles dan Huberman menyebutkan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus (Saragih, 2012). Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *framing* Robert M. Entman.

Eriyanto (2002) dalam bukunya menjelaskan bahwa konsep *framing* milik Entman bertujuan untuk menggambarkan penyeleksian dan penonjolan aspek tertentu dari realitas oleh media. *Framing* menekankan pada teks berita yang dianggap penting dan ditonjolkan oleh pembuat jurnalis. Menonjol maksudnya adalah membuat informasi terlihat jelas dan dapat diingat dan dipahami oleh khalayak. Bentuk penonjolannya pun beragam, bisa pada penempatan beritanya di tempat-tempat yang mencolok, melakukan pengulangan informasi karena dianggap penting sehingga lebih diingat oleh pembaca.

Entman (dalam Eriyanto, 2002) melihat *framing* dalam dua dimensi besar, yaitu:

1. Seleksi isu: aspek ini menekankan pada penyeleksian dan pemilihan fakta dari realitas yang kompleks untuk kemudian ditampilkan atau bahkan dihilangkan dalam pemberitaan.
2. Penonjolan aspek: aspek ini berfokus pada penulisan fakta. Aspek yang telah diseleksi dan dipilih kemudian ditulis dengan menggunakan kata, kalimat, atau gambar tertentu yang nantinya dapat mempengaruhi bagaimana khalayak

mempersiapkan berita tersebut, juga mengarahkan khalayak dengan cara berpikir tertentu.

Model analisis *framing* milik Entman menekankan pada 4 hal, yaitu pemberian definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi terhadap realitas yang diwacanakan dengan kerangka berpikir tertentu. Ada sebagian yang ditekankan, ada sebagian lain yang hilang.

Tabel 3. Perangkat Framing Entman

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian masalah)	Bingkai utama yang menekankan bagaimana peristiwa dipahami oleh jurnalis dan menentukan konstruksi realitas yang berbeda dari jurnalis yang berbeda juga. Dalam hal ini, jurnalis melihat bagaimana sebuah peristiwa dilihat, sebagai masalah apa.
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan penyebab suatu masalah)	Bingkai yang digunakan untuk menentukan aktor permasalahan dari suatu peristiwa. Jurnalis menentukan siapa atau apa penyebab dari masalah tersebut.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Bingkai yang berguna untuk memberikan argumentasi terhadap permasalahan yang dibahas untuk memperkuat argumen yang ada. Jurnalis menggunakan suatu nilai moral untuk membenarkan atau menyalahkan suatu permasalahan.
<i>Suggest Remedies</i> (Memberikan penyelesaian)	Bingkai ini bertujuan untuk menilai apa yang dikehendaki jurnalis. Jurnalis dalam hal ini memberikan saran untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Sumber: Eriyanto, 2002

Konsep *framing* milik Entman dipilih karena konsep ini mampu menggambarkan secara holistik bagaimana realitas dimaknai oleh jurnalis. *Define problems* (pendefinisian masalah) adalah elemen utama atau *master frame* yang menekankan bagaimana suatu realitas dipersepsikan dan dimaknai oleh jurnalis. Suatu realitas akan dimaknai berbeda oleh jurnalis yang berbeda pula. Maka dari itu, *framing* yang berbeda tersebut akan menghasilkan bentuk realitas yang juga berbeda.

*Diagnose causes* (memperkirakan penyebab masalah) adalah elemen *framing* yang bertujuan untuk menentukan siapa aktor dibalik dari suatu realitas. Hal ini bisa dalam bentuk apa (*what*) atau juga siapa (*who*). Ketika sebuah realitas terjadi dan dimaknai oleh jurnalis, ia menentukan apa dan siapa yang menjadi sumber penyebab masalah. Sebuah realitas yang dimaknai berbeda, tentu akan menghasilkan pemahaman mengenai aktor penyebab masalah yang berbeda pula.

*Make moral judgement* (membuat pilihan moral) merupakan elemen *framing* yang digunakan untuk membenarkan argumen dari definisi masalah yang telah dibentuk. Argumentasi yang kuat dibutuhkan untuk mendukung gagasan yang telah dibentuk. Nilai moral disertakan untuk memberikan penilaian benar atau salah atas permasalahan yang terjadi.

Elemen *framing* terakhir dari Entman ialah *treatment recommendation* (menekankan penyelesaian). Dalam hal ini, jurnalis memilih jalan keluar seperti apa yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Hal itu tentu saja bergantung pada bagaimana masalah tersebut dipandang dan siapa yang dianggap sebagai penyebab masalah.

Konsep *framing* milik Entman memandang teks berita sebagai tempat di mana pihak-pihak yang berkepentingan dalam permasalahan yang terjadi berperang secara simbolik. Setiap pihak memberikan perspektif sekaligus menonjolkan argumentasinya masing-masing dalam memaknai sebuah permasalahan agar kemudian diterima oleh khalayak (Handayani, 2019). Konsep ini dipilih karena ingin

mengetahui bagaimana taraf objektivitas media, khususnya Tirto.id, dalam memberitakan peristiwa kebakaran hutan dan lahan di Riau tahun 2019. Dalam penelitian ini, *framing* digunakan untuk melihat berita yang disajikan berasal dari realitas yang sebenarnya terjadi, bukan berdasarkan pilihan jurnalis, serta aspek apa yang ditonjolkan oleh media Tirto.id.



## **BAB IV PEMBAHASAN HASIL**

### **4.1 Gambaran Umum**

#### **4.1.1 Sejarah Tirto.id**

Seperti yang dilansir dari laman Tirto.id (2016), Tirto.id didirikan pada tanggal 12 Mei 2016 oleh Sapto Anggoro. Tirto.id lahir sebagai bentuk jurnalisme online yang tidak hanya mengandalkan kecepatan sebagai fitur utama yang bertujuan untuk mengejar klik dan *page views* sebanyak-banyaknya, tanpa mengandalkan adanya aktualisasi dan verifikasi pemberitaan. Nama Tirto yang diambil dari kata ‘tirta’ yang berarti air. Air mengalir untuk mengisi ceruk atau lubang yang juga bertujuan untuk menjernihkan serta menunjukkan kedalaman. Diibaratkan seperti air, Tirto.id memiliki tujuan untuk menjadi sebuah jurnalisme online yang mampu menjernihkan pikiran melalui kedalaman pemberitaan untuk mengisi ceruk pemikiran.

Selain itu, nama Tirto juga diambil dari salah seorang Pahlawan Nasional, Tirto Adhi Soerjo (1880-1918) yang ditetapkan sebagai Bapak Pers pada tahun 1973. Tirto yang kritis menggunakan kecerdasannya untuk melakukan perlawanan menggunakan surat kabar terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda. Selain itu, almarhum berjasa dalam penerbitan Medan Prijaji, Putri Hindia, dan Soenda Berita, juga pembentukan Sarekat Dagang Islam. Oleh Pramoedya Ananta Toer, Tirto dijuluki sebagai “Sang Pemula” sebagai penanda jasanya untuk mengupayakan pencerahan, berupa kesadaran kebangsaan melalui jurnalisme di Indonesia. Penggunaan *domain \*.id* juga bersangkutan dengan semangat berbangsa.

Tirto.id memiliki visi untuk menyajikan tulisan-tulisan yang jernih (*clear*), mencerahkan (*enlighten*), berwawasan (*insightful*), memiliki konteks (*contextual*),

mendalam (*indepth*), investigatif, serta faktual, yang didukung dengan data kuantitatif dan kualitatif, baik primer dan sekunder, dan dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu, penggunaan logo yang menggunakan paduan warna biru yang melambangkan air jernih dan dalam, serta penggunaan huruf kecil sebagai bentuk wujud jati diri yang rendah hati dan terbuka, untuk tidak merasa paling benar.

Gambar 1 Logo Tirto.id



Sumber: Website Tirto.id

Menggendeng sejumlah awak yang terampil dan berpengalaman di bidang ilmu sosial, jurnalistik, riset, dan statistik, Tirto.id melaju pada jurnalisme presisi yang mengandalkan data berupa foto, kutipan, rekaman peristiwa, dan data statistic yang ditunjukkan melalui infografik dan video infografik. Tak hanya itu, Tirto.id juga melengkapi laporan pemberitaannya dengan menggunakan hasil analisis ratusan media massa di Indonesia yang diubah ke dalam bentuk tiMeter, yakni pengukuran sentiment atas tokoh, lembaga, dan kasus yang dibicarakan dalam tiap laporan pemberitaannya yang mendalam. Tirto mempercayai bahwa laporan yang tercipta dan bersumber dari kekuatan data, disampaikan secara baik, dan tetap mengutamakan kecepatan adalah sumber informasi yang layak diperoleh oleh masyarakat Indonesia sebagai pengambil keputusan dan pengendali perubahan. Berdiri di atas semua golongan dan non-partisan, Tirto.id tidak berafiliasi dengan partai maupun kepentingan politik apapun.

Tirto kini telah terdaftar sebagai media online di Dewan Pers Indonesia. Sapto Anggoro selaku pendiri sekaligus pemimpin redaksi dan penanggung jawab, bersama dengan Teguh Budi Santoso sebagai *Chief Content Officer*, dan Nur Samsi sebagai

*Chief Technology Officer*, melakukan pendanaan secara mandiri untuk Tirto.id. Sejak tahun 2016, nilai perusahaan ini diperkirakan akan mencapai lebih dari Rp 400 miliar.

#### 4.1.2 Tirto.id Sebagai Media Online

Sejak kemunculannya pada tanggal 12 Mei 2016, Tirto.id hadir sebagai wajah baru dalam dunia media online. Pemberitaan yang ditulis, dikumpulkan dan disebarluaskan melalui *website page* nya, [www.tirto.id](http://www.tirto.id). Mengantongi visi “jernih, mengalir, mencerahkan” membuat Tirto.id berkembang pesat akibat menghadirkan tulisan-tulisan panjang dan mendalam, yang juga menjadi pembeda antara Tirto.id dengan media online lain. Selain itu, kecepatan juga menjadi poin penting dari kesuksesan Tirto.id dalam merintis namanya di dunia media online (tirto.id, 2016).

Tirto.id memiliki tiga rubrikasi yang menjadi ciri khasnya, yakni *mild report*, *current issue*, *indepth*, dan opini. *Mild report* termasuk sebagai *feature*, artinya berita-berita yang ditulis berfokus untuk menarik perhatian pembaca. Selain menekankan pada konteks, Tirto.id juga menekankan pada data pemberitaan. Rujukan data primer dan sekunder menjadi syarat penulisan pemberitaan kategori *mild report*. Rubrik *mild report* menerima tulisan dari kontributor lepas. Selain rubrik *mild report*, Tirto.id juga menerima tulisan dari kontributor lepas dalam rubrik *indepth*. Rubrik *indepth* berisikan hasil laporan investigatif para jurnalis mengenai suatu permasalahan atau kontroversi yang laporannya ditulis dengan minimal 1.000 kata. Kolom opini oleh Tirto.id juga menerima dan memuat tulisan dari kontributor lepas. Kolom ini berisikan dengan kumpulan tulisan yang berisi pendapat, ide, ataupun pemikiran dari seorang penulis. Kolom ini terbuka untuk berbagai macam kajian dan disiplin ilmu. Tirto.id memprioritaskan isu-isu jangka panjang yang krusial untuk publik. Berbeda dengan rubrik *current issue*, rubrik ini berisikan tentang isu dan berita terkini mengenai kejadian yang sedang ramai diperbincangkan khalayak, baik dalam maupun luar negeri. Dalam rubrik ini, Tirto.id tidak menerima kontribusi dari para kontributor lepas (tirto.id, 2018).

Keterlibatan audiens dalam berita yang disajikan merupakan salah satu keuntungan dari hadirnya media *online*. Selain itu, ciri dari media online adalah *multimedia capability*, yakni penyajian pemberitaan tidak hanya berbentuk teks berita, melainkan juga dalam bentuk foto, video, hingga infografik. Sejak kemunculannya sampai sekarang, sebagai sebuah media online, Tirto.id mampu menyimpan (*storage and retrieval*) semua berita, informasi, dan data yang pernah diterbitkannya di dalam *website* nya yang tidak memiliki keterbatasan waktu dan tempat (*unlimited space*) selayaknya media konvensional. Selain itu, berita lamanya pun tetap dapat diakses kapanpun dan dimanapun (*time and place access*) (Foust, 2005).

#### **4.1.3 Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau**

Pada tahun 2015, sekitar 2.6 juta hektar area hutan dan lahan habis terbakar akibat dari pengeringan dan konversi lahan gambut untuk pembukaan lahan produksi minyak kelapa sawit. Sebanyak 139 ribu hektar lahan di Riau habis terbakar akibat kegiatan pembukaan lahan tersebut. Kerugian yang ditanggung mencapai angka fantastis, yakni Rp 221 triliun rupiah yang tidak hanya berdampak pada sektor pertanian, namun juga kesehatan. Pembakaran lahan di Indonesia didasari oleh beberapa alasan, seperti pembukaan dan persiapan lahan, harganya yang murah, serta metodenya yang mudah mengusir penduduk yang berada di lahan tersebut. Penegakan hukum yang tidak efektif tidak mampu mengendalikan kuasa para aktor, sehingga, keuntungan dari hasil penanaman kelapa sawit secara ilegal ini tetap berlanjut. Minimnya tata kelola lahan dan lemahnya kebijakan yang mengatur mampu merusak lingkungan (The World Bank, 2016).

Pasalnya, pembakaran hutan dan lahan tidak hanya terjadi pada lahan milik sendiri, tetapi juga pada kawasan hutan negara yang diatur oleh undang-undang. Pengklaiman lahan yang ilegal ini menyebabkan hilangnya sumber penghasilan sebagian masyarakat dan menguntungkan pihak yang berkuasa di balik itu semua, seperti kelompok tani yang menyiapkan lahan, pengusaha, serta investor kelapa sawit.

Herry dan timnya pada tahun 2015 silam menemukan sejumlah bukti terkait orang-orang dibalik peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Riau, baik dari pihak masyarakat, pengusaha sawit, kelompok tani, bahkan pihak pemerintah yang di dalamnya menerima keuntungan dari pembakaran hutan (Purnomo, et al., 2015).

Prof. Bambang Sahardjo, seorang guru besar di Fakultas Perhutanan IPB mengatakan, pembukaan lahan tanpa pembakaran akan memakan biaya yang banyak, sekitar Rp 40-50 juta per hektarnya. Sebaliknya, pembersihan lahan dengan menggunakan api dengan cara dibakar hanya memerlukan Rp 1-2 juta saja per hektarnya. Terlebih, tanah yang telah habis dibakar tersebut mengandung banyak mineral yang bermanfaat untuk perkebunan sawit (Trinirmalaningrum, et al., 2015). Hal ini tentu saja menjadi pilihan bagi perusahaan, mengingat jauhnya perbedaan harga yang ditawarkan dari 2 cara pembukaan lahan yang berbeda.

Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), selama sepuluh tahun terakhir, sejak tahun 2009 sampai tahun 2019, Indonesia telah mengalami sebanyak 1.226 kejadian kebakaran hutan dan lahan. Pada tahun 2019, BNPB mencatat sebanyak 141 kejadian Kebakaran hutan dan lahan, dengan 26 kejadian terjadi di Riau (Katadata, 2019). SiPongi mencatat sekitar 75 ribu hektare area habis terbakar dan pada bulan September, berdasarkan satelit Terra dan Aqua milik LAPAN, sebanyak 1.055 *hot spot* terdeteksi di Riau (SiPongi, 2019).

Komposisi gas yang terkandung dalam asap hasil pembakaran seperti karbon monoksida, timbal, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan hidrokarbon aromatik polisiklik itulah yang mengakibatkan adanya penyakit pada saluran pernapasan. Tetapi, kekhawatiran utama bukan ada pada kandungan-kandungan gas yang ada di udara akibat dari asap pembakaran hutan, melainkan pada partikel-partikel udara yang terkandung di dalam gas tersebut. Partikel yang berukuran kurang dari 2.5 mikrometer ( $\mu\text{m}$ ) dapat menembus ke dalam paru-paru dan mengalir dalam darah, sehingga dapat diangkut ke dalam jaringan tubuh. Paparan langsung terhadap

partikel-partikel ini mampu meningkatkan risiko kematian (Frankenberg & Thomas, 2004). Tidak hanya berujung pada penyakit pernapasan, asap bekas pembakaran menyebabkan meningkatnya penderita penyakit mata dan bahkan kematian dini pada orang-orang yang lemah, seperti orang sakit dan bayi (Rosul, 2015).

Pada 14 September 2019, tingkat kualitas udara berdasarkan nilai indeks polusi di Riau mencapai angka 353 dan dikategorikan dalam status “berbahaya”. Per 1-15 September 2019, sebanyak 15.346 orang di Riau menderita penyakit ISPA akibat dari asap yang dihasilkan dari bencana kebakaran hutan dan lahan yang menimpa (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2019).

Sebagaimana diketahui bahwa penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan merupakan ulah manusia, Polda Riau akhirnya menetapkan perusahaan kelapa sawit, PT Teso Indah di Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai tersangka terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan. Hal itu dilakukan setelah adanya pengukuran dan pemetaan luas lahan yang terbakar di area milik PT Teso Indah. Tidak hanya itu, PT Sumber Sawit Sejahtera per 25 Oktober 2019 juga masih ditangani lebih lanjut oleh Polda Riau. Tersangka dijerat pasal terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan diancam pidana penjara dan denda (tirto.id, 2019). PT Teso Indah juga pernah terjerat kasus kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 silam pada lahan sawit tidak produktif seluas 300 hektar. Pembakaran dilakukan sebagai bentuk upaya ganti rugi (asuransi) (Eyes On The Forest, 2015).

Kendati demikian, kebakaran hutan dan lahan masih menjadi pekerjaan rumah dan pertanyaan besar dari 20 tahun yang lalu. Beragam kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan belum sepenuhnya mampu memecahkan permasalahan yang ada. Bencana kebakaran hutan dan lahan masih terus berlanjut dan menjadi agenda rutin setiap tahunnya (Cahyono, 2019). Adanya kepentingan ekonomi-politik di dalamnya juga menyadarkan publik bahwa adanya praktik korupsi dalam peristiwa ini (Trinirmalaningrum, et al., 2015).

Terjadinya kebakaran hutan dan lahan tidak semata-mata hanya didalangi oleh aktor-aktor yang berkepentingan, seperti halnya pemilik lahan, perusahaan kelapa sawit, konsumen, dan bahkan pemerintah. Ada faktor-faktor eksternal yang turut bersumbangsih dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan. Salah satu faktor eksternal tersebut ialah media. Media terlibat untuk menciptakan opini publik, memberi legitimasi untuk menggugat siapa yang bersalah dan berdampak pada preferensi kebijakan yang nantinya akan publik pilih. Media memiliki 3 peran besar dalam menciptakan *frame* pemberitaan mengenai kebakaran hutan dan lahan. Pertama, mengevaluasi konten dari pemberitaan yang disajikan dengan diskursus tertentu untuk menginformasikan fenomena yang terjadi. Melalui analisis diskursus media, publik dapat mengetahui ke mana media itu berpihak. Kedua, *frame* yang digunakan media dalam memberitakan media mengenai kebakaran hutan dan lahan dapat menunjukkan relasi ekonomi politik pemangku kepentingan penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Ketiga, mengidentifikasi ketidaksinambungan penyebab dan solusi yang selama ini ditawarkan, baik dari pemerintahan regional, nasional, maupun ASEAN sekalipun, sehingga media dapat berfokus pada penyelesaian solutif untuk permasalahan kebakaran hutan dan lahan. (Carmenta & Porter-Jacobs, 2017).

#### 4.2 Analisis Data

##### 1. Berita Tirto.id pada 4 Agustus 2019

Judul: Asap Karhutla Pekanbaru Mulai Ganggu Kesehatan dan Aktivitas Warga

Tabel 4. Analisis Framing "Asap Karhutla Pekanbaru Mulai Ganggu Kesehatan dan Aktivitas Warga"

<i>Define problems</i>	Asap karhutla dikeluhkan warga karena mengganggu kesehatan dan menghambat aktivitas.
<i>Diagnose causes</i>	Asap dari kebakaran hutan lahan di

	Riau dan daerah sekitarnya yang berkumpul di Riau.
<i>Make moral judgement</i>	Sekitar 700 orang menderita ISPA akibat karhutla di Riau.
<i>Treatment recommendation</i>	Ditangkapnya pembakar lahan

Sumber: Data olahan peneliti

***Define problems:*** Pendefinisian masalah yang dilakukan oleh Tirto.id dalam pemberitaan ini adalah warga yang mengeluhkan kedua anaknya terjangkit penyakit batuk-batuk. Penyakit batuk yang diderita kedua anaknya disinyalir disebabkan oleh asap karhutla di Riau.

***Diagnose causes:*** Penyebab yang dibingkai oleh Tirto.id adalah asap kebakaran hutan dan lahan di Riau dan daerah sekitar yang berkumpul menjadi satu di Riau. Hal ini diperkuat dengan pemberitaan yang dibingkai oleh Tirto.id yang mengutip pernyataan-pernyataan Wati terkait dampak yang dirasakannya.

***Make moral judgement:*** Tirto.id dalam hal ini menilai bahwasanya kabut asap berdampak buruk pada kesehatan warga. Tirto.id menyiratkan kekecewaannya terhadap Dinas Kesehatan Provinsi Riau karena belum secara komprehensif menangani karhutla di Riau. Padahal, sudah ada 700 orang yang terjangkit ISPA akibat karhutla.

***Treatment recommendation:*** Penyelesaian yang diberikan Tirto.id terhadap permasalahan ini adalah menahan para pelaku penyebab karhutla di Riau sebagaimana ia mengutip dari pernyataan Wati sebagai salah satu warga yang terdampak. Tirto.id menyiratkan bahwa penegakan hukum harus adil dan tidak pandang bulu.

## 2. Berita Tirto.id pada 7 Agustus 2019

Judul: Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera

Tabel 5. Analisis *Framing* "Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera"

<i>Define problems</i>	Pemadaman api di Pekanbaru, Riau oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama dengan Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru.
<i>Diagnose causes</i>	Dilahnya lahan gambut oleh api yang membara.
<i>Make moral judgement</i>	Menghasilkan kabut asap yang pekat.
<i>Treatment recommendation</i>	Pemadaman harus dilakukan secara optimal agar kebakaran tidak meluas.

Sumber: Data olahan peneliti

***Define problems:*** Pendefinisian masalah yang dilakukan Tirto.id dalam hal ini adalah pemadaman api yang dilakukan oleh BPBD Pekanbaru bersama dengan Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru secara bersama-sama pada tanggal 6 Agustus 2019. Kebakaran telah berlangsung selama tiga hari sehingga BPBD dan Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru bersinergi untuk menangani permasalahan ini.

***Diagnose causes:*** Penyebab yang dibingkai oleh Tirto.id dalam pemberitaan ini adalah karena terbakarnya lahan gambut oleh api. Lahan gambut yang kering yang kemudian dibakar secara sengaja oleh oknum-oknum terkait penyebab karhutla mengakibatkan terjadinya kebakaran lahan yang merugikan masyarakat.

***Make moral judgement:*** Penilaian moral yang diberikan Tirto.id dalam hal ini adalah adanya kabut asap yang pekat sebagai akibat dari kebakaran yang terjadi. Hal ini tentu saja berbahaya bagi pernapasan dan juga jarak pandang di daerah sana.

***Treatment recommendation:*** Penyelesaian masalah yang dibingkai oleh Tirto.id adalah dioptimalkannya pemadaman api yang dilakukan oleh BPBD bersamaan dengan Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru. Hal ini tentu saja bertujuan agar kabut asap tidak terus meluas

3. Berita Tirto.id pada 8 Agustus 2019

Judul: Polisi Cari Keterkaitan 23 Terduga Pelaku Karhutla dengan Korporasi

Tabel 6. Analisis Framing "Polisi Cari Keterkaitan 23 Terduga Pelaku Karhutla dengan Korporasi"

<i>Define problems</i>	Pencarian keterkaitan relasi antara pembakar hutan perorangan dengan korporasi oleh polisi.
<i>Diagnose causes</i>	Ditemukannya korek api milik tersangka sebagai barang bukti membakar hutan.
<i>Make moral judgement</i>	Hutan yang dibakar kebanyakan berada di area hutan lindung.
<i>Treatment recommendation</i>	1. Sosialisasi kepada masyarakat terkait mengubah kebiasaan dalam membuka lahan. 2. Pemberian sanksi sekaligus pencabutan izin.

Sumber: Data olahan peneliti

***Define problems:*** Polisi masih mencari keterkaitan relasi antara tersangka perseorangan dengan korporasi pembakar hutan dan lahan di Riau. Tersangka perorangan ditemukan sebagai pembakar terbanyak dibandingkan tersangka korporasi. Namun, hal tersebut juga masih dalam penyidikan polisi, sebagaimana Tirto.id mengutip pernyataan Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo.

***Diagnose causes:*** Polisi menemukan barang bukti berupa korek api milik perorangan yang digunakan sebagai alat untuk membuka lahan baru melalui membakar lahan. Menurut polisi, korek api merupakan barang bukti yang bersifat tradisional dalam membuka lahan melalui pembakaran. Pembukaan lahan melalui pembakaran dilakukan dengan alasan murah dan mudah.

***Make moral judgement:*** Penilaian yang diberikan oleh Tirto.id dalam hal ini adalah hutan yang dibakar sebagian besar adalah hutan yang berada di area hutan lindung. Hal ini tentu saja melanggar hukum karena hutan lindung sengaja ditetapkan oleh pemerintah untuk dilindungi agar keseimbangan ekosistemnya terjaga. Namun, perilaku serakah tersebut malah merusak apa yang seharusnya dilindungi. Tirto.id juga menyiratkan bahwa pemahaman mengenai hutan lindung masih sulit dicerna oleh beberapa masyarakat, mengingat tidak setiap masyarakat mengerti mengenai hukum yang berlaku. Mengutip dari pernyataan Dedi,

***Treatment recommendation:*** Penyelesaian yang diberikan oleh Tirto.id adalah adanya sosialisasi yang bersinergi antara TNI, Polri, serta tokoh masyarakat dalam mengedukasi masyarakat setempat untuk mengubah kebiasaan cara membuka lahan. Hal ini maksudnya yang

tadinya dilakukan dengan cara membakar karena alasan murah dan mudah, kini pembukaan lahan harus dilakukan dengan memilih lahan mana yang harus ditebang dan dengan melalui metode apa.

Tidak hanya itu, proses penegakan hukum juga tidak boleh luput. Tersangka yang kini sudah ditetapkan akan segera dikenakan sanksi pidana maupun denda. Terlebih, korporasi akan memiliki kesempatan besar untuk dicabut izinnya. Hal ini terlihat dari kutipan berita berikut,

4. Berita Tirto.id pada 11 Agustus 2019

Judul: Iduladha 2019: Sumatera & Kalimantan Masih Dikepung Karhutla

Tabel 7. Analisis Framing "Iduladha 2019: Sumatera & Kalimantan Masih Dikepung Karhutla"

<i>Define problems</i>	Terganggunya perayaan Iduladha di Riau.
<i>Diagnose causes</i>	Tingginya jumlah <i>hotspot</i> di Riau.
<i>Make moral judgement</i>	Berpengaruh buruk kepada kualitas udara dan jarak pandang di lokasi tersebut.
<i>Treatment recommendation</i>	Upaya pemadaman api oleh masyarakat, BNPB, BPBD, TNI, dan Polri.

Sumber: Data olahan peneliti

***Define problems:*** Perayaan Iduladha tahun 2019 ini terganggu oleh kabut asap yang dihasilkan dari titik-titik api yang tersebar di Riau. Hal ini tentu saja mengganggu perayaan hari besar bagi umat Muslim di Riau.

***Diagnose causes:*** Penyebabnya adalah tingginya *hotspot* yang ada di Riau yang mencapai angka 29. Tingginya *hotspot* yang belum dipadamkan

tersebut akhirnya mengakibatkan kabut asap yang mengganggu aktivitas warga di hari raya Iduladha.

***Make moral judgement:*** *Hotspot* yang tinggi di Riau berimplikasi pada menurunnya kualitas udara dan jarak pandang di Riau. Hal ini tentu saja berbahaya bagi warga di Riau karena penyakit pernapasan bisa menyerang kapanpun dan terjadi kecelakaan akibat rendahnya jarak pandang.

***Treatment recommendation:*** Penyelesaian masalah yang diberikan oleh Tirto.id adalah adanya sinergi antara aparat maupun masyarakat dalam memadamkan api. Disebutkan bahwa terdapat sekitar 9000 personel yang terdiri dari masyarakat, BNPB, BPBD, TNI, dan Polri yang berupaya memadamkan api dan kabut asap di enam provinsi.

5. Berita Tirto.id pada 12 Agustus 2019

Judul: Polri: PT Sumber Sawit Sejahtera Jadi Tersangka Kebakaran hutan dan lahan Riau

Tabel 8. Analisis *Framing* "Polri: PT Sumber Sawit Sejahtera Jadi Tersangka Kebakaran hutan dan lahan Riau"

<i>Define problems</i>	Penetapan PT Sumber Sawit Sejahtera jadi tersangka kebakaran hutan dan
------------------------	--

	lahan di Riau oleh Polisi.
<i>Diagnose causes</i>	PT Sumber Sawit Sejahtera lalai dalam mengawasi dan merawat ribuan hektare lahan yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga terjadi kebakaran.
<i>Make moral judgement</i>	Kelalaian PT Sumber Sawit Sejahtera merugikan warga dan lingkungan.
<i>Treatment recommendation</i>	Mendalami perkara dengan memeriksa 15 saksi dari jajaran PT Sumber Sawit Sejahtera untuk menetapkan kemungkinan tersangka terhadap jajaran direksi hingga karyawan perusahaan.

Sumber: Data olahan peneliti

***Define problems:*** Pendefinisian masalah pada pemberitaan ini adalah ditetapkannya PT Sumber Sawit Sejahtera sebagai tersangka penyebab kebakaran hutan dan lahan di Riau pada tahun 2019 oleh Polisi.

Penetapan tersangka atas PT Sumber Sawit Sejahtera yang dilakukan oleh Polisi, sebagaimana dikutip Tirto.id, hendak memperlihatkan bahwa kasus kebakaran hutan dan lahan bukan semata-mata sebuah bencana alam dan perlu ditindak secara hukum. Turut andilnya perusahaan sawit dalam kasus ini menunjukkan kelalaian manusia dalam menjaga ekosistem alam sehingga merugikan warga dan lingkungan.

***Diagnose causes:*** Penyebab permasalahan yang dibingkai oleh Tirto.id adalah kelalaian PT Sumber Sawit Sejahtera yang membiarkan, tidak merawat dan mengawasi sehingga terjadi kebakaran.

Dijelaskan bahwasanya terdapat lahan konsesi milik PT Sumber Sawit Sejahtera yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari perusahaan tersebut, namun dibiarkan begitu saja, hingga pada akhirnya kebakaran pun tidak dapat dipungkiri. Selain itu, Tirto.id juga mengutip pernyataan dari Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo yang menjelaskan mengapa PT Sumber Sawit Sejahtera ditetapkan sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan di Riau seperti berikut,

Selain itu, Tirto.id juga mengutip pernyataan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau Kombes Pol Gidion Arif Setiawan sebagai narasumber yang turut menyelidiki kasus ini sejak Februari 2019 untuk memperkuat penjelasan mengenai penyebab permasalahan yang ada seperti berikut,

Tirto.id menyiratkan lamanya proses yang harus ditempuh oleh polisi dalam menetapkan PT Sumber Sawit Sejahtera sebagai tersangka korporasi penyebab kebakaran hutan dan lahan. Padahal, sudah diketahui dengan jelas bahwasanya laporan masuk mengenai konsesi lahan yang terbakar sejak bulan Februari 2019. Namun, penetapan tersangka baru saja dilakukan pada bulan Agustus 2019. Tirto.id menggambarkan betapa lambannya kinerja polisi dalam menegakan keadilan.

***Make moral judgement:*** Penilaian moral dalam masalah ini dikatakan bahwasanya kebakaran yang terjadi akibat kelalaian PT Sumber Sawit Sejahtera merugikan warga dan lingkungan setempat.

Tirto.id mengimplikasikan bahwa kebakaran yang terjadi bukan merupakan sebuah bencana alam, tetapi merupakan kebakaran yang murni disebabkan oleh kelalaian PT Sumber Sawit Sejahtera selaku penanggung jawab konsesi lahan. Kelalaian manusia yang menurut Tirto.id bisa dicegah ini malah merugikan dan membahayakan warga dan lingkungan setempat.

***Treatment recommendation:*** Tirto.id dalam hal ini menawarkan penyelesaian berupa mengikuti pemeriksaan yang dilakukan oleh Polisi. Hal ini bertujuan agar terselesaikannya perkara yang sedang diusut dengan mencari tahu aktor penyebab kebakaran dari jajaran PT Sumber Sawit Sejahtera. Pemeriksaan lebih lanjut ini memiliki kemungkinan adanya penetapan tersangka perorangan dari jajaran PT Sumber Sawit Sejahtera. Kutipan berita tersebut menunjukkan bahwa penetapan tersangka yang akan diterapkan terhadap jajaran direksi hingga karyawan PT Sumber Sawit Sejahtera bersifat tentatif. Artinya, belum tentu ada penetapan tersangka dari jajaran tersebut atau lebih buruknya, tidak ada penetapan tersangka perorangan. Padahal, kebakaran yang terjadi merupakan kelalaian manusia.

6. Berita Tirto.id pada 12 Agustus 2019

Judul: 60 Orang dan 1 Korporasi Tersangka Karhutla di Riau Hingga Kalteng

Tabel 9. Analisis Framing "60 Orang dan 1 Korporasi Tersangka Karhutla di Riau Hingga Kalteng"

<i>Define problems</i>	Terbakarnya 204,9 hektare area terbakar di Riau.
<i>Diagnose causes</i>	Penetapan 20 tersangka karhutla di Riau oleh pihak kepolisian, 19 orang dan 1 korporasi, yaitu PT SSS.
<i>Make moral judgement</i>	Kebakaran hutan dan lahan tersebut mengganggu warga yang merayakan Iduladha.
<i>Treatment recommendation</i>	Patroli terpadu untuk mengecek titik

	yang memicu karhutla.
--	-----------------------

Sumber: Data olahan peneliti

**Define problems:** Tirto.id mendefinisikan permasalahan dalam pemberitaan adanya 204,9 hektare area yang terbakar yang dilakukan oleh 20 tersangka yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka karhutla di Riau oleh polisi sebagai masalahnya. Ditetapkannya 19 orang dan 1 korporasi kelapa sawit yang bernama PT Sumber Sawit Sejahtera sebagai tersangka.

**Diagnose causes:** Penyebab yang dibingkai oleh Tirto.id dalam hal ini adalah adanya penetapan 20 tersangka karhutla di Riau oleh pihak kepolisian pada tanggal 11 Agustus. Hal ini menyiratkan bahwa adanya penanganan hukum yang berlanjut dalam mengadili perkara karhutla.

Sebanyak 13 kasus di Riau terkait penyebab karhutla telah diserahkan berkas perkara tahap dua tersangka dan barang bukti ke Jasa Penuntut Umum (JPU) oleh Polda Riau. Sedangkan, sebagian lainnya masih dalam tahap penyidikan. Tirto.id menyiratkan harapan ditegakannya hukum yang berimbang dalam menangani kasus karhutla yang merugikan masyarakat ini.

**Make moral judgement:** Tirto.id menilai bahwa peristiwa yang terjadi mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat. Terlebih, kabut asap ini terjadi bertepatan dengan perayaan Iduladha. Akibatnya, masyarakat di Riau terhambat dalam merayakan hari besar perayaan tersebut.

**Treatment recommendation:** Penyelesaian masalah yang direkomendasikan Tirto.id yaitu dengan mengutip pernyataan

Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo di Mabes Polri mengenai patrol terpadu untuk memantau *hotspot* yang memicu karhutla. Selain itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto ke Riau akan turut turun ke lapangan untuk memantau titik dan mengarahkan pemadaman api di Riau sekaligus aktivitas mitigasi. Pengecekan ini diharapkan sekiranya mampu menurunkan atau bahkan memadamkan secara sempurna *hotspot* yang berpotensi menyebabkan kabut asap.

7. Berita Tirto.id pada 12 Agustus 2019

Judul: Kapolri dan Panglima TNI Tinjau Pemadaman Karhutla Riau

Tabel 10. Analisis Framing "Kapolri dan Panglima TNI Tinjau Pemadaman Karhutla Riau"

<i>Define problems</i>	Peninjauan karhutla ke Kabupaten Pelalawan, Riau oleh Kapolri dan Panglima TNI.
<i>Diagnose causes</i>	Luasnya area kebakaran di Riau dan ditetapkannya tersangka korporasi sebagai penyebab karhutla di Riau.
<i>Make moral judgement</i>	Menurunnya kualitas udara dan jarak pandang di Riau.
<i>Treatment recommendation</i>	Diterapkannya proses mitigasi karhutla.

Sumber: Data olahan peneliti

***Define problems:*** Permasalahan yang didefinisikan oleh Tirto.id dalam hal ini adalah adanya kunjungan dari Kapolri dan Panglima TNI yang bertujuan untuk meninjau keadaan di Kabupaten Pelalawan, Riau terkait karhutla di daerah setempat. Selain untuk meninjau keadaan di sana, Kapolri dan Panglima TNI juga bertugas untuk mengarahkan Satuan

Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla) dalam memadamkan api yang melahap. Tirto.id menyiratkan bahwa Kapolri dan Panglima TNI tidak lepas tangan terkait permasalahan karhutla yang sedang memanas di beberapa wilayah di Indonesia.

**Diagnose causes:** Penyebab yang dibingkai oleh Tirto.id dalam pemberitaan ini adalah luasnya cakupan area yang terbakar di Riau serta ditetapkannya satu korporasi kelapa sawit oleh pihak kepolisian sebagai penyebab terjadinya karhutla. Akibat ditetapkannya PT Sumber Sawit Sejahtera sebagai tersangka, maka Kapolri dan Panglima TNI menyoar Riau sebagai salah satu daerah utama yang menjadi sasaran penyelesaian hukum selain tujuh daerah lainnya yang tersangkut karhutla.

**Make moral judgement:** Penilaian yang diberikan oleh Tirto.id dalam hal ini adalah bahayanya kabut asap yang berdampak buruk pada kualitas udara dan jarak pandang yang ada di Riau. Kualitas udara yang menurun dapat berakibat buruk pada kesehatan pernapasan masyarakat Riau. Selain itu, menurunnya jarak pandang di Riau yang diselubungi asap tersebut membahayakan pengemudi yang berkendara di Riau.

**Treatment recommendation:** Penyelesaian yang diberikan oleh Tirto.id adalah proses mitigasi karhutla. Menurut KBBI, mitigasi merupakan sebuah upaya mengurangi dampak bencana. Pasalnya, mengingat karhutla sudah banyak menjatuhkan banyak korban, mitigasi diperlukan untuk meminimalisir jumlah korban berjatuh kembali. Tirto.id menguatkan rekomendasi yang diberikannya dengan mengutip pernyataan Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo seperti berikut,

8. Berita Tirto.id pada 13 Agustus 2019

Judul: Soal Karhutla, Menteri LHK: Pemegang Konsesi Lahan Jangan Main-main

Tabel 11. Analisis *Framing* "Soal Karhutla, Menteri LHK: Pemegang Konsesi Lahan Jangan Main-main"

<i>Define problems</i>	Ancaman untuk para pemegang konsesi lahan mengenai pembakaran hutan dan lahan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya.
<i>Diagnose causes</i>	Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah di Kalimantan dan Sumatera disebabkan oleh ulah manusia.
<i>Make moral judgement</i>	Penindakan hukum kepada tersangka pembakar hutan belum maksimal.
<i>Treatment recommendation</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan operasi pencegahan, penggalangan, serta penertiban oleh satuan petugas.</li> <li>2. Penambahan armada udara untuk mengatasi kebakaran.</li> </ol>

Sumber: Data olahan peneliti

***Define problems:*** Pendefinisian masalah yang dilakukan Tirto.id adalah adanya ancaman yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya terkait kebakaran hutan dan lahan kepada pemegang konsesi lahan. Ia mengatakan bahwa pemegang konsesi lahan untuk tidak bermain-main dengan hal ini. Tirto.id sendiri menyiratkan bawhasanya pemerintah belum mengeluarkan gebrakan besar yang dapat membuat

para pembakar lahan jera. Pasalnya, baru hal berupa ancaman yang dikeluarkan, belum ada penegakan hukum yang komprehensif.

**Diagnose causes:** Penyebab yang dibingkai oleh Tirto.id adalah kebakaran hutan dan lahan bukan merupakan bencana alam. Kebakaran hutan dan lahan merupakan ulah manusia yang serakah untuk membuka lahan dengan cara mudah dan murah.

**Make moral judgement:** Penindakan hukum yang belum maksimal pun diakui oleh Tito Karnavian selaku Kapolri. Dalam hal ini terlihat bahwasanya polisi maupun pemerintah belum terlalu menganggap kebakaran hutan dan lahan sebagai perkara yang serius. Mengingat penindakan yang diberikan hanya berupa ancaman.

**Treatment recommendation:** Penyelesaian yang diberikan oleh Tirto.id adalah adanya sosialisasi pencegahan, penggalangan, dan penertiban yang dilakukan oleh satuan tugas karhutla di daerah rawan kebakaran hutan dan lahan. Tirto.id menyiratkan bahwa sosialisasi akan menjadi sia-sia apabila tidak disesuaikan dengan adanya penegakan hukum yang sesuai.

Tak hanya itu, Panglima TNI Hadi juga menambahkan bahwa pihaknya akan menambahkan armada berupa pesawat Hercules untuk memadamkan api kebakaran hutan dan lahan.

9. Berita Tirto.id pada 14 Agustus 2019

Judul: Polri Lakukan Evaluasi Penanganan Karhutla Setiap Bulan

Tabel 12. Analisis *Framing* "Polri Lakukan Evaluasi Penanganan Karhutla Setiap Bulan"

<i>Define problems</i>	Dilakukannya evaluasi proses
------------------------	------------------------------

	penanganan karhutla secara rutin oleh Polri.
<i>Diagnose causes</i>	Mewaspadaai adanya peningkatan karhutla karena El Nino dapat memicu meningkatnya kebakaran.
<i>Make moral judgement</i>	Kualitas udara di Riau berada dalam kategori sedang karena masih terdapat <i>hotspot</i> .
<i>Treatment recommendation</i>	Pencopotan jabatan Kapolda, Kapolres, Pangdam, dan Danrem apabila gagal mengatasi karhutla.

Sumber: Data olahan peneliti

***Define problems:*** Pendefinisian masalah yang dilakukan oleh Tirto.id adalah adanya evaluasi yang dilakukan oleh Polri secara rutin dalam menangani karhutla. Hal itu dilakukan setiap bulan untuk meminimalisir adanya kendala dari wilayah Polda, seperti minimnya personel, kurangnya sarana prasarana yang memadai. Maka dari itu, evaluasi bertujuan untuk memaksimalkan proses pemadaman.

***Diagnose causes:*** Penyebab yang dibingkai oleh Tirto.id adalah peristiwa El Nino yang ada pada musim kemarau tahun ini dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Maka dari itu, Polri hendak mewaspadaai adanya potensi peningkatan karhutla akibat dari peristiwa El Nino yang diprediksi terjadi pada bulan September sampai Oktober 2019.

***Make moral judgement:*** Penilaian yang diberikan oleh Tirto.id dalam hal ini adalah kualitas udara di Riau masih berada dalam kategori sedang. Padahal, telah disebutkan bahwasanya evaluasi penanganan telah

dilakukan, namun kualitas udara masih belum kunjung membaik dan *hotspot* pun masih terdeteksi.

***Treatment recommendation:*** Penyelesaian yang diberikan oleh Tirto.id adalah dengan mengutip pernyataan Jokowi di tahun 2015 yang dilansir Antara pada 6 Agustus 2019 mengenai pencopotan jabatan Kapolda, Kapolres, Pangdam, dan Danrem apabila gagal dalam menangani karhutla. Tirto.id menyiratkan bahwasanya apa yang diklaim oleh polisi mengenai penanganan komprehensif melalui evaluasi rutin tidak didukung oleh kenyataan yang ada dan Tirto.id mencoba untuk mengembalikan kepada pernyataan Jokowi mengenai ancaman pencopotan tersebut.

#### 10. Berita Tirto.id pada 14 Agustus 2019

Judul: Satgas Karhutla Evaluasi Penanganan Perkara Pemadaman Api

Tabel 13. Analisis Framing "Satgas Karhutla Evaluasi Penanganan Perkara Pemadaman Api"

<i>Define problems</i>	Kegiatan evaluasi di tiap provinsi yang berpotensi kebakaran oleh satgas.
<i>Diagnose causes</i>	Antisipasi adanya peningkatan karhutla akibat El Nino di musim kemarau tahun 2019.
<i>Make moral judgement</i>	Penetapan 20 tersangka di Riau, 1 korporasi dan 19 perorangan sebagai penyebab karhutla.
<i>Treatment recommendation</i>	Polda Riau melimpahkan 13 kasus berkas perkara tahap dua tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum

	(JPU).
--	--------

Sumber: Data olahan peneliti

***Define problems:*** Pendefinisian masalah yang dilakukan oleh Tirto.id dalam hal ini adalah adanya evaluasi yang dilakukan oleh Satuan Petugas Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla) di beberapa provinsi yang berlangganan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengecek dan mengevaluasi penanganan, sekaligus menegakan hukum bagi para tersangka penyebab karhutla.

***Diagnose causes:*** Penyebab yang dibingkai oleh Tirto.id adalah akibat adanya El Nino yang terjadi pada musim kemarau yang berpotensi untuk meningkatkan karhutla di provinsi yang berlangganan karhutla tersebut. Akibatnya, evaluasi tidak boleh luput dari agenda satgas untuk mencegah adanya kemungkinan karhutla yang lebih besar lagi.

***Make moral judgement:*** Penilaian moral yang diberikan oleh Tirto.id adalah kebakaran hutan dan lahan ini bukan merupakan semata-mata akibat El Nino di musim kemarau. Melainkan, kegiatan oknum serakah yang membabat habis 204,9 hektare area di Riau untuk pembukaan lahan melalui pembakaran. Hal itu terbukti dengan ditangkapnya 20 tersangka, 19 tersangka perorangan dan 1 tersangka korporasi penyebab karhutla. Evaluasi dilakukan untuk menegakan hukum yang berlaku kepada para pembakar hutan tersebut.

***Treatment recommendation:*** Penyelesaian yang diberikan oleh Tirto.id adalah Tirto.id mendukung adanya keberlanjutan penegakan hukum dengan dilimpahkannya 13 kasus berkas perkara tahap dua tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) oleh Polda Riau. Tirto.id menyiratkan harapan adanya keberlanjutan terhadap kasus-

kasus lain untuk segera ditangani lebih lanjut agar karhutla tidak menjadi momok dan tersangka dikenakan sanksi yang sesuai.

11. Berita Tirto.id pada 15 Agustus 2019

Judul: Kemenkes: 9630 Warga Alami ISPA Akibat Karhutla di Riau

Tabel 14. Analisis Framing "Kemenkes: 9630 Warga Alami ISPA Akibat Karhutla di Riau"

<i>Define problems</i>	Karhutla menimbulkan kabut asap yang mengganggu kesehatan pernapasan.
<i>Diagnose causes</i>	Sebanyak 824 <i>hotspot</i> dan 30.065 hektare lahan di Riau terbakar yang menyebabkan kabut asap.
<i>Make moral judgement</i>	Karhutla menyebabkan 9.630 orang terjangkit ISPA.
<i>Treatment recommendation</i>	1. Pengiriman 300 pcs masker untuk dibagikan kepada masyarakat. 2. Pendirian pos pelayanan kesehatan untuk melayani masyarakat terdampak karhutla.

Sumber: Data olahan peneliti

***Define problems:*** Tirto.id mendefinisikan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengatakan insiden karhutla di Riau berimplikasi pada memburuknya kesehatan pernapasan masyarakat di Riau akibat kabut asap yang dihasilkan. Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan setempat masih terus berupaya untuk mengatasi dampak yang dihasilkan.

**Diagnose causes:** Penyebab yang dibingkai oleh Tirto.id dalam hal ini adalah terdapat 824 *hotspot* dan terbakarnya sebanyak 30.065 hektare area lahan terbakar di Riau pada tahun ini. Data ini didapatkan dari Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutana (KLHK) pada 12 Agustus 2019. Dampak yang dihasilkan dari adanya *hotspot* yang berlimpah tersebut dan luasnya lahan yang terbakar tersebut adalah kabut asap yang berimplikasi buruk bagi kesehatan pernapasan warga Riau.

**Make moral judgement:** Akibat karhutla, sebanyak 9.630 warga di Riau terdampak ISPA akibat kabut asap yang dihasilkan dari puluhan hektar lahan yang terbakar. Tirto.id menyiratkan bahwa penanganan dan evaluasi yang dilakukan sebelum-sebelumnya tidak terlalu berdampak besar karena karhutla malah menghasilkan banyak korban berjatuh akibat ISPA sebagai dampak dari kabut asap. Bentuk sosialisasi terkait penanganan karhutla pun hasilnya tidak maksimal karena korban telah terdampak asap.

**Treatment recommendation:** Penyelesaian yang direkomendasikan Tirto.id adalah mengutip pernyataan Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kemenkes, Widyawati yang mengatakan bahwa Kemenkes telah mengirimkan 300 *pieces* masker untuk dibagikan kepada masyarakat sebagai upaya mengatasi dampak karhutla di Riau. Selain itu, pendirian pos pelayanan kesehatan serta melayani masyarakat yang terdampak karhutla oleh Dinas Kesehatan Riau.

12. Berita Tirto.id pada 15 Agustus 2019

Judul: Polri Kini Tangani 100 Kasus Karhutla dengan 87 Tersangka

Tabel 15. Analisis Framing "Polri Kini Tangani 100 Kasus Karhutla dengan 87 Tersangka"

<i>Define problems</i>	Bertambahnya jumlah kasus dan tersangka karhutla di Riau yang ditangani kepolisian.
<i>Diagnose causes</i>	Meningkatnya jumlah tersangka kasus penyebab karhutla di Riau, dari 20 tersangka menjadi 34 tersangka.
<i>Make moral judgement</i>	Adanya penurunan jumlah <i>hotspot</i> yang berada di kawasan karhutla.
<i>Treatment recommendation</i>	

Sumber: Data olahan peneliti

***Define problems:*** Pendefinisian masalah yang dilakukan Tirto.id adalah bertambahnya jumlah kasus dan tersangka yang ditangani oleh kepolisian terkait kebakaran hutan dan lahan. Jumlah kasus yang ditangani menjadi 100 kasus yang ditangani salah satunya oleh Polda Riau. Dari 100 kasus yang ditangani, Polisi menetapkan sebanyak 87 tersangka, yang di antaranya terdapat 86 individu dan 1 korporasi.

***Diagnose causes:*** Penyebab yang dibingkai oleh Tirto.id adalah ditetapkannya 34 individu dan 1 korporasi di Riau sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Angka tersebut menunjukkan adanya peningkatan jumlah tersangka yang ditetapkan oleh kepolisian terkait karhutla di Riau. Pihak korporasi disinyalir lalai dan sengaja dalam melakukan pembakaran lahan.

***Make moral judgement:*** Tirto.id menilai dengan adanya keberlanjutan penegakan hukum melalui penetapan tersangka penyebab karhutla,

sekaligus patroli yang dilakukan oleh pihak kepolisian berimplikasi pada menurunnya jumlah *hotspot* yang berada di kawasan karhutla. Penurunan berjumlah 8 *hotspot*.

13. Berita Tirto.id pada 15 Agustus 2019

Judul: Polisi Tak Tahan Bos PT Sumber Sawit Sejahtera

Tabel 16. Analisis *Framing* "Polisi Tak Tahan Bos PT Sumber Sawit Sejahtera"

<i>Define problems</i>	Bos PT Sumber Sawit Sejahtera tidak ditahan atau diamankan oleh Polisi
<i>Diagnose causes</i>	Perkara kebakaran masih dalam penyidikan polisi sehingga bos PT Sumber Sawit Sejahtera masih belum ditahan.
<i>Make moral judgement</i>	Dijatuhkannya vonis oleh Polisi kepada aktor penyebab kebakaran akibat kelalaian yang terjadi.
<i>Treatment recommendation</i>	Mencopot jajaran Kapolres, Kapolsek, Pangdam, Danrem yang berada di wilayah kebakaran hutan dan lahan apabila tidak mampu mengatasi kebakaran hutan dan lahan.

Sumber: Data olahan peneliti

***Define problems:*** Tirto.id mendefinisikan masalah yang terjadi sebagai belum ditahannya bos dari PT Sumber Sawit Sejahtera, yang sebagaimana diketahui merupakan tersangka korporasi kebakaran hutan dan lahan di Riau. Tirto.id menunjukkan kekecewaannya dan menyayangkan gerak lamban polisi dalam melakukan penanganan lebih lanjut mengenai kasus yang serius ini.

**Diagnose causes:** Penyebab permasalahan yang terjadi mengenai belum ditahannya bos PT Sumber Sawit Sejahtera adalah karena menurut polisi, kasus ini masih dalam penyidikan polisi sehingga bos PT Sumber Sawit Sejahtera masih belum diamankan polisi. Padahal, sudah jelas bahwa PT Sumber Sawit Sejahtera terbukti bersalah atas penyebab kebakaran hutan dan lahan di Riau

Terdapat kata ‘berdalih’ yang merupakan mengemukakan alasan yang dicari untuk menutupi dengan sengaja perbuatan yang tercela menurut KBBI. Hal itu menunjukkan bahwasanya Tirto.id meyakini bahwa polisi dengan sengaja menutup-nutupi kasus kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh PT Sumber Sawit Sejahtera karena suatu alasan, seperti ‘permainan’ antara PT Sumber Sawit Sejahtera dengan aparat.

**Make moral judgement:** Penilaian moral dalam masalah ini adalah penjatuhan vonis terhadap tersangka penyebab kebakaran akibat kelalaian yang terjadi. Namun, penjatuhan vonis tersebut masih dalam proses, seperti yang dikutip dari pernyataan Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo oleh Tirto.id untuk menguatkan penilaian yang diberikan.

Tirto.id menyiratkan tak acuhnya aparat maupun pemda setempat dalam menangani kasus seperti ini karena masih dalam tahap evaluasi. Padahal, penyelidikan telah dilakukan sejak bulan Februari 2019 dan sudah terindikasi lalai dalam bertanggung jawab atas konsesi lahan sehingga mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan.

**Treatment recommendation:** Tirto.id dalam hal ini memberikan penyelesaian berupa mengutip instruksi yang diutarakan oleh Presiden Joko Widodo mengenai sanksi bagi Kapolres, Kapolsek, Pangdam, dan

Danrem yang berada di wilayah kebakaran hutan dan lahan apabila lalai dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan.

Tirto.id menyiratkan untuk mengingatkan aparat terkait untuk dapat bersikap tegas dalam mengentaskan perkara ini. Tirto.id mengisyaratkan harapan penjatuhan vonis cepat dan penahanan aktor penyebab kebakaran hutan dan lahan, dalam hal ini bos PT Sumber Sawit Sejahtera oleh polisi. Tirto.id mengharapkan adanya tindakan cepat dan efektif dari aparat dalam menangani kasus ini melalui instruksi dari Presiden.

#### 14. Berita Tirto.id pada 19 Agustus 2019

Judul: BMKG: 260 Titik Panas tersebar di Sumatera pada Senin Pagi

Tabel 17. Analisis Framing "BMKG: 260 Titik Panas tersebar di Sumatera pada Senin Pagi"

<i>Define problems</i>	Terdapat 260 <i>hotspot</i> yang dideteksi oleh BMKG sebagai indikasi awal karhutla di wilayah Sumatera pada 19 Agustus 2019.
<i>Diagnose causes</i>	Riau berpotensi diselimuti kabut asap akibat adanya <i>hotspot</i> di daerahnya sendiri.
<i>Make moral judgement</i>	Adanya penurunan jarak pandang di beberapa daerah di Riau akibat kabut asap.
<i>Treatment recommendation</i>	Adanya penanganan dari pihak terkait mengenai pemadaman <i>hotspot</i> karena peluang hujan diprediksikan minim.

Sumber: Data olahan peneliti

**Define problems:** Tirto.id mendefinisikan *hotspot* sebanyak 260 menjadi indikasi awal karhutla tersebar di wilayah Sumatera sebagai masalahnya. *Hotspot* tersebar di Sumatera Selatan, Jambi, Provinsi Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Lampung, dan Sumatera Utara.

**Diagnose causes:** Penyebab yang dibingkai oleh Tirto.id adalah Riau berpotensi diselimuti kabut asap akibat dari banyaknya *hotspot* yang ada di Riau sendiri. Sebanyak 57 *hotspot* berada tersebar di sejumlah kabupaten di Riau.

**Make moral judgement:** Akibat dari banyaknya jumlah *hotspot* yang tersebar di Riau, terdapat penurunan jarak pandang di beberapa wilayah di Riau akibat kondisi udara yang *hazey* atau berkabut. Hal ini ditakutkan akan membahayakan kesehatan warga dan pengemudi,

**Treatment recommendation:** Tirto.id memberikan rekomendasi yang disiratkan dengan mengutip pernyataan Staf Analisis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru, Nia Fadhila terkait minimnya probabilitas hujan di Riau. Sehingga, *hotspot* akan tetap menyala apabila tidak ada penanganan seperti hujan buatan dari pihak terkait penanggulangan karhutla.

15. Berita Tirto.id pada 21 Agustus 2019

Judul: Wiranto: Penanganan Karhutla Tak Hanya Tanggung Jawab Pusat

Tabel 18. Analisis Framing "Wiranto: Penanganan Karhutla Tak Hanya Tanggung Jawab Pusat"

<i>Define problems</i>	Pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko
------------------------	--

	Polhukam) Wiranto terkait karhutla yang bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah daerah.
<i>Diagnose causes</i>	Tidak tegasnya aparat penegak hukum dalam menangani karhutla.
<i>Make moral judgement</i>	Karhutla tetap terjadi setiap tahunnya.
<i>Treatment recommendation</i>	Sinergi dan koordinasi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dan pemberian sanksi terhadap korporasi penyebab karhutla.

Sumber: Data olahan peneliti

***Define problems:*** Pendefinisian masalah yang dilakukan oleh Tirto.id adalah mengenai pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto yang mengatakan bahwasanya karhutla juga seharusnya menjadi perhatian utama dan tanggung jawab pemerintah daerah. Tirto.id menyiratkan bahwasanya Wiranto kesal karena pemerintah pusat kerap menjadi sasaran empuk sebagai pihak yang seharusnya bertanggung jawab dalam menanggulangi hal ini. Ia mengatakan bahwa pemerintah daerah dan jajarannya harusnya lebih aktif berkoordinasi untuk menanggulangi karhutla.

***Diagnose causes:*** Tirto.id membingkai penyebab masalahnya adalah menurut Wiranto, aparat penegak hukum (Polda) kurang tegas dalam menangani permasalahan karhutla. Lantas ia mengutip pernyataan Jokowi mengenai pencopotan jabatan Kapolda apabila tidak mampu menangani persoalan karhutla.

Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) Doni Monardo yang dikutip oleh Tirto.id mengenai ketidaktegasan aparat penegak hukum dalam memberikan sanksi. Sanksi yang diberikan selama ini tidak sepadan dengan apa yang telah dilakukan oleh korporasi pembakar hutan. Pada akhirnya, karhutla tetap terus terjadi.

***Make moral judgement:*** Penilaian moral yang diberikan oleh Tirto.id adalah ketidaktegasan aparat penegak hukum berimplikasi pada kejadian karhutla yang terus berulang setiap tahunnya. Hal ini tentu saja harus disepadankan dengan pemberian sanksi yang sepadan dengan apa yang sudah diperbuat. Seperti yang dapat dilihat dari kutipan berita berikut yang merupakan pernyataan dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) Doni Monardo

***Treatment recommendation:*** Penyelesaian yang direkomendasikan oleh Tirto.id adalah sinergi dan koordinasi yang antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam mengatasi karhutla. Selain itu, pencabutan izin korporasi juga diperlukan agar karhutla tidak menjadi momok karena terjadi setiap tahunnya.

16. Berita Tirto.id pada 10 September 2019

Judul: Dampak Kabut Asap Karhutla Riau: Warga Kena Iritasi Kulit dan Mata

Tabel 19. Analisis *Framing* "Dampak Kabut Asap Karhutla Riau: Warga Kena Iritasi Kulit dan Mata"

<i>Define problems</i>	Sejumlah warga Kota Pekanbaru menderita penyakit iritasi mata dan kulit, bahkan ISPA.
------------------------	---

<i>Diagnose causes</i>	Partikel-partikel berbahaya dari lahan kebakaran yang terbawa angin.
<i>Make moral judgement</i>	Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) KLHK menunjukkan Riau berada pada level sangat tidak sehat.
<i>Treatment recommendation</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berobat ke dokter agar diberi obat sesuai diagnosis.</li> <li>2. Menggunakan masker apabila hendak beraktivitas di luar.</li> <li>3. Tidak menjemur pakaian di luar rumah.</li> </ol>

Sumber: Data olahan peneliti

***Define problems:*** Karhutla yang melanda di sejumlah wilayah, salah satunya di Riau mengakibatkan sebagian warga mengidap iritasi mata dan kulit. Pada beberapa bulan terakhir, banyak warga mengeluhkan kulitnya yang gatal-gatal. Terlebih, warga yang memiliki kulit sensitif disebutkan akan lebih rentan mengalami iritasi kulit. Iritasi kulit tersebut mengakibatkan warga kesulitan tidur karena merasakan gatal-gatal di sekujur tubuh. Hal itu tentu saja harus segera ditolong dengan penanganan medis. Selain iritasi kulit dan mata, ISPA juga menjadi penyakit lain yang menjadi keluhan terbanyak akibat dari karhutla yang melahap habis lahan yang ada di Riau.

***Diagnose causes:*** Penyebabnya adalah partikel-partikel yang terbawa angin dari bekas kebakaran yang melanda Riau. Partikel tersebut menempel di pakaian, tubuh, yang kemudian mengakibatkan iritasi pada kulit. Tirto.id menyiratkan bahwasanya bukan hanya berdampak buruk pada pernapasan, kebakaran juga berdampak buruk pada kesehatan kulit.

Asap tersebut bukan hanya mengganggu aktivitas, melainkan juga kesehatan.

***Make moral judgement:*** Penilaian moral yang diberikan oleh Tirto.id adalah kebakaran hutan dan lahan telah membuat Riau berada dalam level sangat tidak sehat berdasarkan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU). Akibatnya, banyak warga menderita penyakit-penyakit seperti iritasi kulit dan mata sampai ISPA. Tirto.id menyiratkan bahwasanya warga harus menanggung penderitaan yang disebabkan oleh tangan-tangan serakah dan Riau harus menanggung kabut asap di fase terburuk sebagai dampak dari karhutla.

***Treatment recommendation:*** Penyelesaian masalah yang diberikan oleh Tirto.id adalah berupa ajakan berobat ke dokter apabila merasakan adanya gejala gatal-gatal, iritasi mata, ataupun ISPA agar ditangani lebih lanjut oleh ahlinya dan diberikan obat sesuai dosis.

Selain itu, Tirto.id juga memberikan penyelesaian berupa penggunaan masker apabila hendak beraktivitas di luar ruangan. Masker berfungsi untuk menyaring partikel-partikel berbahaya agar tidak terhirup langsung. Terakhir, Tirto.id juga merekomendasikan bagi para ibu untuk menjemur pakaiannya di dalam ruangan agar partikel-partikel berbahaya tersebut tidak menempel pada pakaian.

17. Berita Tirto.id pada 10 September 2019

Judul: Beda Data Kebakaran Hutan BNPB vs KLHK: Riau Paling Terdampak

Tabel 20. Analisis Framing "Beda Data Kebakaran Hutan BNPB vs KLHK: Riau Paling Terdampak"

<i>Define problems</i>	Riau sebagai daerah yang terdampak
------------------------	------------------------------------

	karhutla paling luas.
<i>Diagnose causes</i>	Perbedaan data milik KLHK dan BNPB, di mana data milik BNPB menyatakan lahan terbakar di Riau lebih luas dibanding data yang dimiliki KLHK.
<i>Make moral judgement</i>	Karhutla terus meluas dan kabut asap semakin pekat di Riau.
<i>Treatment recommendation</i>	Memastikan luas lahan yang terbakar untuk diverifikasi lebih lanjut menggunakan instrumen yang tersedia.

Sumber: Data olahan peneliti

***Define problems:*** Pendefinisian masalah yang dibingkai Tirto.id yang mengutip dari Antara adalah Riau merupakan daerah yang terdampak karhutla paling luas. Luas area di Riau yang terbakar mencapai 49,266 hektare.

***Diagnose causes:*** Penyebab yang dibingkai oleh Tirto.id sebagaimana ia mengutip tulisan milik Antara, adalah adanya perbedaan data mengenai luas lahan yang terbakar di Riau milik BNPB dan Satgas KLHK. BNPB mencatat bahwa Riau merupakan daerah yang paling terdampak akibat karhutla dengan luas lahan terbakar sebanyak 49,266 hektare. BNPB menjelaskan sebanyak 8,713 hektare lahan mineral terbakar habis dan 40,553 hektare lainnya merupakan lahan gambut. Data luas karhutla yang didapat BNPB merupakan data yang didapatkan berdasarkan interpretasi visual data citra satelit Landsat 8 OLI/TIRS dan data titik panas atau MODIS yang berlandaskan penghitungan dari KLHK dan telah diverifikasi oleh Direktur Pengendalian Karhutla KLHK, Raffles Panjaitan.

Berbeda dengan data milik Satgas Karhutla KLHK yang menyebutkan bahwa luas lahan kebakaran di Riau hanya sekitar 6,541.76 hektare yang berada di 12 kabupaten dan kota. Pasalnya, Direktur Pengendalian Karhutla KLHK, Raffles Panjaitan tidak menyalahkan apa yang disebutkan oleh Satgas. Tirto.id menyiratkan Raffles hendak menutupi kesalahan data yang dimiliki timnya tersebut dengan mengatakan bahwa Satgas Karhutla telah memadamkan 6,541.76 hektare area.

***Make moral judgement:*** Tirto.id menilai apabila memang data KLHK hanya menunjukkan 6,541.76 hektare area yang terbakar di Riau, kenyataannya adalah kabut asap yang pekat terus menyelimuti Kota Pekanbaru. BNPB sendiri bahkan sudah mengerahkan 1.512 pasukan gabungan dan tujuh unit helikopter untuk memadamkan api di Riau. Tirto.id menyiratkan bahwasanya mustahil apabila area lahan yang terbakar hanya sesedikit itu. Namun kabut asap juga tidak kunjung menghilang.

***Treatment recommendation:*** Tirto.id memberikan penyelesaian berupa penghitungan ulang oleh KLHK dengan instrumen yang tersedia untuk memastikan berapa luas lahan yang terbakar dan melakukan verifikasi atas penghitungan tersebut. Tirto.id mendukung adanya transparansi dan kejujuran luas lahan yang terbakar di Riau karena hal ini juga dipantau oleh negara lain. Sehingga, upaya kebohongan pun akan tetap terendus bagaimanapun caranya.

18. Berita Tirto.id pada 11 September 2019

Judul: Menteri Siti Nurbaya Protes ke Malaysia Soal Kabut Asap Karhutla

Tabel 21. Analisis Framing "Menteri Siti Nurbaya Protes ke Malaysia Soal Kabut Asap Karhutla"

<i>Define problems</i>	Menteri LHK Siti Nurbaya menyayangkan sikap Singapura karena tidak objektif dalam melihat persoalan karhutla.
<i>Diagnose causes</i>	Asap lintas negara dari Riau yang terbawa angin sampai ke Singapura.
<i>Make moral judgement</i>	Apabila terjadi kebakaran, Manggala Agni, KLH, TNI, Polisi masyarakat bahu membahu memadamkan api.
<i>Treatment recommendation</i>	Pemadaman menggunakan 17 unit helikopter di Riau.

Sumber: Data olahan peneliti

***Define problems:*** Pendefinisian masalah yang dilakukan Tirto.id dalam hal ini adalah kekecewaan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya terhadap Singapura karena Singapura tidak objektif dalam melihat persoalan kabut asap. Menurutnya, Singapura hanya protes tanpa melihat informasi yang sebenarnya. Menurutnya, asap tidak ada kiriman asap dari Riau ke Singapura karena *hotspot* di Riau sudah turun.

***Diagnose causes:*** Penyebab yang dibingkai oleh Tirto.id dalam pemberitaan ini adalah adanya *transboundary haze* atau asap lintas negara yang dirasakan Singapura. Siti Nurbaya menyebutkan bahwa kebakaran tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di daerah lain. Asap kebakaran tersebut terbawa oleh angin dan menyelimuti negara lain, salah satunya Singapura.

***Make moral judgement:*** Tirto.id menilai bahwasanya Indonesia sudah memiliki pola sistematis dimana Manggala Agni, KLH, TNI, polisi masyarakat bersama-sama memadamkan api. Hal ini menyiratkan bahwa Indonesia tidak tinggal diam dalam menangani persoalan karhutla.

***Treatment recommendation:*** Penyelesaian yang diberikan oleh Tirto.id adalah dengan mengutip pernyataan Siti Nurbaya terkait penanganan terhadap karhutla yang dilakukan secara fluktuatif. Salah satunya adalah mengirimkan 17 unit helikopter ke Riau untuk kegiatan pemadaman. Masih mengutip pernyataan dari Siti Nurbaya.

19. Berita Tirto.id pada 13 September 2019

Judul: Kabut Asap Bikin Biaya Hidup Warga Pekanbaru Meningkat

Tabel 22. Analisis Framing "Kabut Asap Bikin Biaya Hidup Warga Pekanbaru Meningkat"

<i>Define problems</i>	Biaya hidup warga di Pekanbaru meningkat akibat kabut asap.
<i>Diagnose causes</i>	Kabut asap yang pekat akibat karhutla mengakibatkan warga terpaksa menetap di rumah dan menyalakan AC dan <i>air purifier</i> selama 24 jam yang berimplikasi pada meningkatnya biaya listrik dan biaya kesehatan.
<i>Make moral judgement</i>	Menurunkan jarak pandang dan mengganggu aktivitas penerbangan.
<i>Treatment recommendation</i>	

Sumber: Data olahan peneliti

***Define problems:*** Tirto.id mendefinisikan biaya hidup warga di Pekanbaru, Riau meningkat karena kabut asap yang semakin pekat sebagai

masalahnya. Tirto.id menyiratkan bahwasanya kabut asap bukan hanya mengganggu kegiatan dan aktivitas warga saja, tetapi juga mengganggu kesehatan masyarakat yang akhirnya membuat warga harus merogoh kocek dalam-dalam.

**Diagnose causes:** Penyebab yang dibingkai oleh Tirto.id dalam hal ini adalah kabut asap yang semakin pekat di Riau mengakibatkan warga harus terus menyalakan AC dan *air purifier* selama 24 jam di dalam rumah karena asap sudah mulai menyelubungi rumah dan untuk menjaga udara agar tetap terjaga. Hal itu berimplikasi pada meningkatnya biaya listrik. Selain itu, kesehatan warga pun juga terdampak akibat kabut asap karhutla. Akhirnya, warga harus mengeluarkan uang lebih untuk kebutuhan kesehatan. Tirto dalam hal ini melakukan jurnalisme pengutipan dari Antara mengenai meningkatnya biaya hidup akibat kabut asap.

**Make moral judgement:** Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi mengakibatkan turunnya jarak pandang dan terganggunya aktivitas penerbangan. Hal ini tentu saja berbahaya bagi para pengendara, baik di darat, laut, maupun udara karena kabut asap bahkan menutupi Jembbbbatan Siak IV.

20. Berita Tirto.id pada 13 September 2019

Judul: Karhutla Riau: Daftar Penerbangan yang Terdampak 13 September 2019

Tabel 23. Analisis *Framing* "Karhutla Riau: Daftar Penerbangan yang Terdampak 13 September 2019"

<i>Define problems</i>	Aktivitas sejumlah penerbangan terganggu di Bandara Sultan Syarif
------------------------	---

	Kasim II, Pekanbaru, Riau.
<i>Diagnose causes</i>	Pekatnya kabut asap berimplikasi pada penurunan jarak pandang sehingga jadwal penerbangan pesawat menjadi tertunda.
<i>Make moral judgement</i>	Kondisi kabut asap pada tanggal 13 September ini lebih pekat daripada hari-hari sebelumnya.
<i>Treatment recommendation</i>	

Sumber: Data olahan peneliti

***Define problems:*** Pendefinisian masalah dalam pemberitaan ini adalah terganggunya aktivitas sejumlah penerbangan di Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru, Riau pada tanggal 13 September 2019. Hal ini disebabkan karena asap karhutla yang pekat dan mulai memberikan dampak buruk terhadap jarak pandang.

***Diagnose causes:*** Penyebab yang dibingkai oleh Tirto.id dalam hal ini adalah pekatnya kabut asap yang menyelimuti kota Pekanbaru, Riau pada 13 September 2019 yang berimplikasi pada penurunan jarak pandang sehingga pesawat tidak dapat didaratkan ataupun diterbangkan. Akhirnya, sejumlah penerbangan terpaksa ditunda dan bahkan dibatalkan.

***Make moral judgement:*** Pekatnya kabut asap menurunkan jarak pandang secara drastic menjadi 200-400 meter. Padahal, jarak pandang aman untuk pesawat terbang yaitu 800-1000 meter. Tirto.id menyiratkan bahwa pekatnya kabut asap merugikan banyak pihak, baik itu pihak bandara, maskapai penerbangan, penumpang, bahkan warga setempat.

Judul: Karhutla Riau Bikin Pekanbaru Menguning dan Warga Mulai Mengungsi

Tabel 24. Analisis *Framing* "Karahutla Riau Bikin Pekanbaru Menguning dan Warga Mulai Mengungsi"

<i>Define problems</i>	Sejumlah warga di Pekanbaru yang mulai mengungsi karena polusi asap karhutla.
<i>Diagnose causes</i>	Banyaknya <i>hotspot</i> yang tersebar di Riau dan kiriman asap dari Jambi serta Sumatera Selatan.
<i>Make moral judgement</i>	Kualitas udara di Pekanbaru berstatus bahaya akibat asap karhutla dan menurunkan jarak pandang.
<i>Treatment recommendation</i>	

Sumber: Data olahan peneliti

***Define problems:*** Tirto.id mendefinisikan sejumlah warga di Pekanbaru yang mulai mengungsi akibat polusi asap karhutla. Mengutip dari Antara, alasan kesehatan menjadi alasan utama mengapa warga banyak yang mengungsi. Asap yang sudah mulai mengepung ke dalam rumah menghambat aktivitas kegiatan di dalam rumah dan membahayakan orang-orang di dalamnya.

***Diagnose causes:*** Penyebab yang dibingkai Tirto.id adalah banyaknya *hotspot* yang tersebar di sejumlah wilayah di Riau. Total *hotspot* keseluruhan mencapai angka 177. Selain itu, kiriman asap dari daerah lain yang juga terjadi bencana kabut asap menyebabkan Riau diselubungi asap.

***Make moral judgement:*** Tirto.id menilai asap di Provinsi Riau tidak hanya menjadikan langit kota tersebut menguning, namun juga menurunkan kualitas udara di sejumlah wilayah menjadi berstatus bahaya karena polusi kabut asap akibat karhutla. Jarak pandang pun menurun akibat pekatnya asap yang menyelimuti sejumlah daerah. Salah satunya di Pekanbaru, yaitu hilangnya Jembatan Siak IV secara kasat mata karena terselimuti asap.

22. Berita Tirto.id pada 13 September 2019

Judul: Kabut Asap Pekanbaru Makin Tebal, Ratusan Warga Jatuh Sakit

Tabel 25. Analisis Framing "Kabut Asap Pekanbaru Makin Tebal, Ratusan Warga Jatuh Sakit"

<i>Define problems</i>	Kabut asap di Pekanbaru mengakibatkan sejumlah warga jatuh sakit.
<i>Diagnose causes</i>	Partikel-partikel berbahaya yang terkandung di dalam asap memicu berbagai penyakit.
<i>Make moral judgement</i>	Pembukaan posko-posko kesehatan oleh Puskesmas di Pekanbaru, Riau karena kondisi memburuk.
<i>Treatment recommendation</i>	Pendistribusian masker, mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, menjaga kesehatan dengan makan-makanan bergizi serta konsumsi vitamin.

Sumber: Data olahan peneliti

***Define problems:*** Pendefinisian masalah yang dilakukan Tirto.id dalam hal ini adalah sejumlah warga di Pekanbaru, Riau terjangkit penyakit-penyakit seperti ISPA, sesak napas, iritasi kulit dan mata, bahkan diare akibat kabut asap yang melanda. Diperkuat dengan data dari 21 Puskesmas di Kota Pekanbaru, hal ini menunjukkan kabut asap sudah menunjukkan status yang berbahaya.

***Diagnose causes:*** Penyebabnya tentu saja karena partikel-partikel berbahaya yang dikandung oleh asap-asap akibat karhutla. Kandungan-kandungan tersebut terhirup ke dalam saluran pernapasan dan menimbulkan penyakit-penyakit.

***Make moral judgement:*** Penilaian yang diberikan oleh Tirto.id adalah kabut asap yang menyelimuti Kota Pekanbaru mengakibatkan banyaknya warga jatuh sakit sehingga mendesak Puskesmas untuk membuka posko-posko kesehatan untuk korban yang terdampak. Selain itu, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru juga harus menyediakan lebih banyak obat-obatan agar masyarakat tidak khawatir akan tidak mendapatkan obat.

***Treatment recommendation:*** Penyelesaian yang diberikan oleh Tirto.id adalah dengan mengimbau masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar rumah. Apabila hendak beraktivitas di luar ruangan, hendak mengenakan masker sebagai alat untuk menyaring kotoran agar tidak terhirup ke dalam saluran pernapasan. Selain itu, mengimbau untuk mengonsumsi makanan, minuman, dan vitamin yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh.

Judul: Lahan Perusahaan Sawit Malaysia yang Diduga Dibakar Disegel KLHK

Tabel 26. Analisis *Framing* “Lahan Perusahaan Sawit Malaysia yang Diduga Dibakar Disegel KLHK”

<i>Define problems</i>	Penyegehan lahan perusahaan kelapa sawit milik PT Adei Plantation and Industry asal Malaysia atas kasus dugaan pembakaran lahan gambut di Kabupaten Pelalawan, Riau.
<i>Diagnose causes</i>	Lahan gambut seluas 4.25 hektare menyerupai hamparan hitam yang diduga habis dibakar pada tanggal 7 September 2019.
<i>Make moral judgement</i>	PT Adei tidak pertama kali tersangkut masalah hukum terkait kejahatan lingkungan.
<i>Treatment recommendation</i>	Penyegehan lima perusahaan asing oleh KLHK yang diduga sebagai penyebab kebakaran hutan dan lahan.

Sumber: Data olahan peneliti

***Define problems:*** Pendefinisian masalah yang dilakukan oleh Tirto.id dalam pemberitaan ini adalah penyegehan lahan perusahaan kelapa sawit milik PT Adei Plantation asal Malaysia yang ada di Kabupaten Pelalawan Riau atas dugaan pembakaran lahan gambut di Kabupaten Pelalawan, Riau.

Hal itu diperkuat dengan adanya pemasangan plang pengumuman serta pemasangan pita kuning sebagai larangan untuk melintas oleh Sugeng

Riyanto, selaku Direktur Penindakan PPLH Gakkum KLHK bersama dengan sejumlah penyidik Ditjen Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK.

**Diagnose causes:** Tirto.id membingkai bahwa penyebab dari permasalahan ini adalah terdapat seluas 4.25 hektare lahan yang diduga dibakar habis untuk ditanami kelapa sawit di area Kabupaten Pelalawan, Riau. Lahan gambut tersebut telah berubah wujud menjadi hamparan hitam luas yang telah habis terbakar. Menurut Sugeng, lahan diduga dibakar pada tanggal 7 September 2019. Sugeng sendiri selaku Direktur Penindakan PPLH Gakkum KLHK masih menunggu lebih jauh penyelidikan lebih lanjut mengenai lahan yang sudah menjadi hamparan hitam tersebut untuk memastikan benar dugaannya bahwa lahan tersebut dibakar secara sengaja. Padahal, berkaca dari kasus-kasus yang ada, lahan konsesi yang ditemukan terbakar merupakan ulah tangan manusia.

**Make moral judgement:** Berdasarkan pemberitaan dari Antara, Tirto.id menilai masalah ini sebagai pengungkapan kasus lama PT Adei yang pernah tersangkut masalah hukum yang sama, yaitu pembakaran lahan konsesi yang berujung bencana kabut asap pada tahun 2013. Tirto.id menakwilkan bahwa pemerintah tidak tegas dalam menegakan hukum sehingga perkara seperti ini kembali terjadi. Tak hanya itu, vonis yang dijatuhkan tidak membuat jera tersangka sehingga ada indikasi vonis yang dijatuhkan pun tidak senilai dengan kerugian yang diakibatkannya.

Kekecewaan itu berlanjut sebagaimana yang ditulis oleh Tirto.id bahwa permasalahan hukum yang pernah menjerat PT Adei tidak berimbang dalam pengadilannya.

***Treatment recommendation:*** Penyelesaian yang ditawarkan oleh Tirto.id terkait perkara ini adalah penegakan hukum dari pemerintah pusat dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Hal ini diharapkan tidak hanya berupa penyegelan lahan, namun juga pengadilan hukum dengan vonis yang seimbang, melihat Siti Nurbaya baru saja usai melakukan rapat mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Tirto.id menyiratkan bahwa dilakukannya rapat diharapkan adanya evaluasi terkait penegakan hukum yang lemah yang telah dilakukan selama ini.

24. Berita Tirto.id pada 14 September 2019

Judul: KLHK Segel 42 Perusahaan Diduga Pelaku Pembakaran Hutan

Tabel 27. Analisis *Framing* "KLHK Segel 42 Perusahaan Diduga Pelaku Pembakaran Hutan"

<i>Define problems</i>	Penyegelan perusahaan pelaku pembakar hutan oleh KLHK di 5 lokasi di Riau.
<i>Diagnose causes</i>	Lemahnya instansi penegak hukum sehingga karhutla terus terulang.
<i>Make moral judgement</i>	Kabut asap akibat karhutla mengakibatkan terganggunya jadwal penerbangan dan berdampak buruk pada kesehatan.
<i>Treatment recommendation</i>	Ditegakannya hukum bagi korporasi penyebab karhutla.

Sumber: Data olahan peneliti

***Define problems:*** Tirto.id mendefinisikan penyegelan korporasi pelaku pembakaran hutan oleh KLHK di 5 lokasi di Riau sebagai

masalahnya. Korporasi ini diduga merupakan penyebab di balik terjadinya karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, salah satunya adalah Riau.

***Diagnose causes:*** Penyebab yang dibingkai oleh Tirto.id adalah instansi penegak hukum yang lemah sehingga korporasi ini masih dengan bebasnya membakar lahan dan hutan untuk kepentingan korporasinya. Dikutip dari Kepala Departemen Advokasi Walhi Zenzi Suhadi yang mengatakan bahwa sebenarnya Indonesia memiliki payung hukum yang baik perihal pengadilan korporasi penyebab kebakaran. Namun, hal tersebut tidak diseimbangkan dengan praktik penegakan hukum yang sesuai. Akhirnya, karhutla tetap menjadi momok.

***Make moral judgement:*** Tirto.id menilai akibat dari ketidaktegasan itu berujung pada memburuknya keadaan kondisi di sejumlah wilayah, salah satunya di Riau. Kegiatan penerbangan menjadi terganggu akibat kabut asap pekat yang menyelimuti Pekanbaru. Selain itu, sejumlah masyarakat juga mengidap penyakit ISPA, iritasi kulit dan mata, bahkan diare akibat terpapar oleh asap karhutla.

***Treatment recommendation:*** Penyelesaian yang diberikan oleh Tirto.id adalah praktik penegakan hukum yang diseimbangkan dengan payung hukum yang ada. Mengingat karhutla terus terjadi setiap tahunnya dan korporasi kian disegel dan dicabut izin praktiknya, hal tersebut juga harus diseimbangkan dengan penangkapan dan penahanan direktur dari korporasi tersebut agar menimbulkan rasa jera.

Judul: BNPB Sebut Minim Peran Pemda Jadi Hambatan Penanganan Karhutla

Tabel 28. Analisis *Framing* "BNPB Sebut Minim Peran Pemda Jadi Hambatan Penanganan Karhutla"

<i>Define problems</i>	Minimnya peran pemda menghambat penanganan konflik karhutla.
<i>Diagnose causes</i>	Pejabat pemerintah daerah tidak peduli dalam menangani kasus karhutla.
<i>Make moral judgement</i>	Jadwal penerbangan ditunda dan dihentikan. Serta penyakit ISPA yang menjangkit sejumlah masyarakat.
<i>Treatment recommendation</i>	Kepala daerah turut menangani persoalan karhutla.

Sumber: Data olahan peneliti

***Define problems:*** Pendefinisian masalah yang dilakukan Tirto.id adalah penanganan karhutla tidak signifikan karena kurangnya sinergi antara peran-serta dan pejabat daerah dalam menangani karhutla. Pada akhirnya, pejabat daerah ini menjadi hambatan terbesar menurut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Monardo.

***Diagnose causes:*** Mengutip pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Monardo, ia mengatakan pejabat daerah kurang peduli mengenai penanganan kebakaran.

Namun, Tirto.id menyayangkan sikapnya yang tidak menyebutkan nama-nama pejabat yang ia maksud. Tirto.id membingkai bahwa ia malah berdalih atau menutupi sebuah kesalahan yang terjadi mengenai lahan

yang dibakar kemudian dijadikan lahan usaha. Tirto.id menyiratkan kekecewaan yang dibingkai melalui teks pemberitaan seperti berikut.

***Make moral judgement:*** Akibat dari terhambatnya penanganan karhutla, menurut data BNPB, sejumlah pesawat terpaksa ditunda, bahkan dibatalkan penerbangannya karena kabut asap yang pekat menyelimuti provinsi Riau. Selain itu, sejumlah masyarakat juga mengidap penyakit ISPA akibat partikel-partikel berbahaya yang dikandung dalam asap karhutla.

***Treatment recommendation:*** Penyelesaian yang diberikan oleh Tirto.id dalam hal ini adalah lebih aktifnya partisipasi kepala dan pejabat-pejabat daerah untuk turut menangani persoalan karhutla. Karhutla sebagaimana yang diketahui telah mengakibatkan kerugian besar, baik bagi warga yang terdampak dan juga negara. Hal ini dapat dilihat dari kutipan berita berikut,

Padahal kenyataannya, negara telah mengalami kerugian besar, baik secara materi maupun secara lahan. Berdasarkan data milik BNPB, Riau menjadi salah satu provinsi yang mengalami kebakaran hutan dan lahan.

26. Berita Tirto.id pada 14 September 2019

Judul: Penanganan Karhutla dan Cerita Warga Saat Kabut Asap Merajalela

Tabel 29. Analisis *Framing* "Penanganan Karhutla dan Cerita Warga Saat Kabut Asap Merajalela"

<i>Define problems</i>	Karhutla yang melanda Sumatera dan Kalimantan merupakan ulah manusia yang membuat masyarakat sakit, meningkatkan biaya hidup, dan
------------------------	---

	mengganggu aktivitas.
<i>Diagnose causes</i>	Industri sawit yang mengeringkan gambut dengan cara pembakaran agar sawit dapat tumbuh.
<i>Make moral judgement</i>	Ditangkapnya 44 orang sebagai tersangka pembakaran hutan, 1 korporasi sawit, dan terbakarnya 502,755 hektare area di Riau.
<i>Treatment recommendation</i>	Pendirian komisi khusus untuk penegak hukum lingkungan.

Sumber: Data olahan peneliti

***Define problems:*** Pendefinisian masalah yang dilakukan Tirto.id adalah kabut asap yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan, salah satunya Riau merupakan ulah manusia. Akibat ulah tersebut, langit Kota Pekanbaru berubah menjadi warna kuning. Kualitas udara pun juga menurun dan berakibat buruk bagi kesehatan masyarakat terdampak.

***Diagnose causes:*** Penyebab yang dibingkai oleh Tirto.id dalam hal ini adalah adanya perbuatan manusia yang dengan saja membakar hutan dan lahan. Tirto.id menyiratkan ulah manusia ini ada kaitannya dengan industri sawit yang merajalela di daerah-daerah kebakaran. Tirto.id menanyai Kepala Badan Restorasi Gambut Nazir Foad mengenai hubungan kebakaran dengan industri sawit. Namun, Nazir tidak dapat memastikan hal tersebut.

Tetapi, Tirto.id meyakini bahwa hal ini memiliki keterkaitan dengan industry sawit. Hal ini terlihat karena polisi menetapkan salah satu korporasi sawit di Riau bernama PT SSS sebagai tersangka karhutla.

***Make moral judgement:*** Penilaian yang diberikan Tirto.id dalam hal ini adalah pengutipan pernyataan Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengenai tersangka pembakaran hutan yang telah ditetapkan oleh polisi. Hasilnya, di Riau telah ditetapkan 44 tersangka dan 1 korporasi sawit berinisial PT SSS sebagai tersangka pembakar hutan. Selain itu, seluas 502,755 hektare area di Riau terbakar habis akibat perilaku pembakar hutan tersebut.

***Treatment recommendation:*** Mengutip pernyataan Kepala Departemen Advokasi Walhi Zenzi Suhadi, Tirto.id merekomendasikan penyelesaian berupa pendirian komisi khusus yang menangani hukum lingkungan. Dalam hal ini, payung hukum yang ada di Indonesia memang sudah memadai, namun praktik penegakan hukumnya tidak dapat menyeimbangkan payung hukum yang ada.

27. Berita Tirto.id pada 15 September 2019

Judul: Karhutla Riau: 27 Titik Api Kategori Tinggi Terdeteksi

Tabel 30. Analisis *Framing* "Kebakaran hutan dan lahan Riau: 27 Titik Api Kategori Tinggi Terdeteksi"

<i>Define problems</i>	Kota Pekanbaru diselimuti asap tipis yang mengganggu jarak pandang.
<i>Diagnose causes</i>	Terdeteksi sebanyak 27 titik api kategori tinggi di Riau.
<i>Make moral judgement</i>	Kualitas udara menjadi tidak sehat akibat belum padamnya titik api.
<i>Treatment recommendation</i>	Disiapkannya personil pemadaman dari kelompok aparat sampai polisi kehutanan yang dilengkapi dengan

	helikopter yang memadai untuk memadamkan api.
--	---

Sumber: Data olahan peneliti

**Define problems:** Pendefinisian masalah pada kasus ini adalah kabut asap yang menyelimuti kota Pekanbaru. Pemberitaan ini menunjukkan bahwa bencana kabut asap yang terjadi mengakibatkan memburuknya kondisi daerah di sekitarnya serta terganggunya jarak pandang yang berpengaruh terhadap keselamatan pengendara.

**Diagnose causes:** Kabut asap yang melanda disebabkan karena adanya 27 titik api yang tinggi yang terdapat di kota Riau. Keterangan yang didapatkan dari Plt Kepala Pusat Data Informasi dan Humas (Pusdatinmas) BNPB Agus Wibowo menyiratkan bahwasanya api masih belum dapat dipadamkan sehingga kabut asap membalut Riau

**Make moral judgement:** Dalam pemberitaan mengenai memburuknya kondisi kabut asap di Riau, Tirto.id membingkai bahwasanya bencana kabut asap yang terjadi bukan saja merugikan wilayah yang terdampak, melainkan juga menurunkan kualitas udara. Pemerintah seolah lupa bahwa ada masyarakat yang terdampak keselamatan dan kesehatannya, yang tentu saja memiliki efek merugikan dalam jangka panjang.

**Treatment recommendation:** Mengutip pernyataan Agus, Tirto.id merekomendasikan penyelesaian terkait meningkatnya titik api yang ada di Riau seperti pengerahan aparat-aparat terkait dalam memadamkan api yang mengakibatkan kabut asap di Riau. Penggunaan helikopter dan hadirnya kepala-kepala aparat terkait diharapkan mampu mempercepat proses pemadaman yang dilakukan sehingga pemadaman bersifat efektif.

28. Berita Tirto.id pada 15 September 2019

Judul: Dampak Karhutla: Seperti Dikurung dalam Ruang Bersama Tungku Api

Tabel 31. Analisis *Framing* "Dampak Karhutla: Seperti Dikurung dalam Ruang Bersama Tungku Api"

<i>Define problems</i>	Pekatnya kabut asap di Riau membuat warga di Riau mempersiapkan gugatan kepada <i>class action</i> , seperti walikota, gubernur, dan presiden.
<i>Diagnose causes</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Karhutla terus terjadi karena ada unsur kesengajaan dari perusahaan-perusahaan pembakar hutan.</li> <li>2. Pemerintah lemah dalam menegakkan hukum kepada pelaku pembakar hutan.</li> </ol>
<i>Make moral judgement</i>	Tergabungnya 40 pengacara bdalam koalisi menggugat <i>class action</i> dan pembukaan posko pengaduan untuk menampung keluhan warga yang terdampak kabut asap.
<i>Treatment recommendation</i>	Penegakan hukum yang berimbang kepada pelaku pembakar hutan, seperti pemberian gugatan perdata, gugatan pidana, dan pemberian sanksi administratif.

Sumber: Data olahan peneliti

***Define problems:*** Pendefinisian masalah yang dilakukan oleh Tirto.id dalam hal ini adalah mengenai solidaritas warga di Riau yang hendak menggugat walikota, gubernur, dan presiden terkait karhutla. Mengutip pernyataan Yannedi, salah satu narasumber yang diwawancarai oleh Tirto.id, karhutla yang kerap berulang setiap tahunnya tidak memiliki penyelesaian konkret dari pemerintah. Bersama dengan teman-temannya sebagai alumni dari Universitas Riau, mereka hendak menggugat pemerintah untuk segera menghadirkan solusi dari perkara tidak berujung ini.

***Diagnose causes:*** Penyebab yang dibingkai oleh Tirto.id adalah karhutla di Riau merupakan salah satu bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh perusahaan pembakar hutan, sebagaimana yang dikutip dari pernyataan Yannedi. Penegakan hukum yang tidak berimbang tersebut menjadikan karhutla sebagai momok.

Selain itu, Tirto.id mengutip pernyataan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nur Hidayati mengenai lemahnya pemerintah dalam menegakkan hukum bagi perusahaan pembakar karhutla. Pemerintah dinilai setengah-setengah dalam menindak hukum.

***Make moral judgement:*** Penilaian yang diberikan oleh Tirto.id terkait hal ini adalah bahwa karhutla memang sudah seharusnya menjadi kekhawatiran pemerintah dan segera ditindaklanjuti perkaranya. Pasalnya, tergabungnya 40 pengacara dalam koalisi gugatan yang diusung oleh Yannedi dan teman-teman alumninya dari Universitas Riau menunjukkan bahwa persoalan ini menyebabkan banyak warga yang dirugikan akibat karhutla yang berulang.

***Treatment recommendation:*** Tirto.id dalam hal ini mengutip pernyataan dari Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nur Hidayati mengenai penegakan hukum yang masih setengah-setengah yang dilakukan pemerintah. Menurut Nur Hidayati, ada tiga upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pemerintah kepada pembakar hutan. Pertama, gugatan perdata yang berimplikasi pada denda. Kedua, gugatan pidana terhadap pejabat perusahaan, dan yang terakhir pemberian sanksi administratif berupa pencabutan izin konsesi.

29. Berita Tirto.id pada 16 September 2019

Judul: Tersangka Perorangan Karhutla di Sumatera dan Kalimantan Jadi 185

Tabel 32. Analisis Framing "Tersangka Perorangan Karhutla di Sumatera dan Kalimantan Jadi 185"

<i>Define problems</i>	Penetapan enam tersangka perorangan baru dalam kasus karhutla di Sumatera dan Kalimantan, salah satunya di Riau.
<i>Diagnose causes</i>	Penyebab karhutla adalah ulah manusia.
<i>Make moral judgement</i>	Penyegelan 10 lahan konsesi perusahaan yang diduga penyebab karhutla di Riau.
<i>Treatment recommendation</i>	Kasus terkait karhutla untuk segera didalami untuk menetapkan statusnya.

Sumber: Data olahan peneliti

***Define problems:*** Pendefinisian masalah yang dilakukan oleh Tirto.id adalah bertambahnya jumlah tersangka perorangan yang ditetapkan oleh polisi dalam kasus karhutla di Sumatera dan Kalimantan. Salah satunya adalah penetapan 47 tersangka perorangan dan satu korporasi oleh Polda Riau.

**Diagnose causes:** Penyebab yang dibingkai Tirto.id dalam hal ini adalah ulah manusia. Mengutip pernyataan dari polisi yang mengatakan 99 persen penyebab karhutla adalah manusia, ditetapkannya tersangka perorangan dan korporasi-korporasi penyebab karhutla.

**Make moral judgement:** Penilaian yang diberikan oleh Tirto.id adalah penyegelan 10 lahan konsesi perusahaan yang diduga merupakan penyebab kebakaran hutan di Riau. Mengutip pernyataan Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani, terdapat 10 perusahaan yang disegel yang bergerak di bidang perusahaan industri kehutanan dan kelapa sawit. Tirto.id menyiratkan bahwa karhutla bukan semata-mata sebuah bencana alam, melainkan ulah tangan manusia.

**Treatment recommendation:** Penyelesaian yang diberikan oleh Tirto.id dalam hal ini adalah mendalami kasus tersangka penyebab karhutla. Hal itu bertujuan agar segera ditindaklanjuti kasusnya dan ditetapkan statusnya bagi para tersangka. Sehingga penegakan hukum tidak setengah-setengah dan keadilan pun ditegakkan.

30. Berita Tirto.id pada 16 September 2019

Judul: Kendala Pemadaman Karhutla versi Polri: Air dan Lokasi

Tabel 33. Analisis *Framing* "Kendala Pemadaman Kebakaran hutan dan lahan versi Polri: Air dan Lokasi"

<i>Define problems</i>	Masih terjadinya kebakaran di beberapa wilayah Sumatera dan Kalimantan, salah satunya Riau.
<i>Diagnose causes</i>	1. Jauhnya sumber air dari area kebakaran.

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Lahan gambut yang kering</li> <li>3. Penumpukan asap di Riau dari daerah-daerah lain di sekitar karena gerakan pusaran angin.</li> </ol>
<i>Make moral judgement</i>	Dampak berbahaya yang ditimbulkan akibat kebakaran yang dirasakan masyarakat.
<i>Treatment recommendation</i>	Pengungkapan aktor penyebab kebakaran hutan dan lahan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Sumber: Data olahan peneliti

***Define problems:*** Pendefinisian masalah yang dilakukan Tirto.id dalam pemberitaan ini adalah sulitnya memadamkan api mengakibatkan kebakaran masih terjadi di beberapa wilayah, salah satunya di Riau. Hal ini menyiratkan bahwa penanganan yang dilakukan oleh pihak terkait belum sempurna sehingga tidak dapat mengatasi bencana kabut asap dalam waktu yang singkat. Tirto.id membingkai bahwa kesulitan yang dikatakan oleh polisi malah memperburuk kondisi di Riau sendiri.

***Diagnose causes:*** Dengan mewawancarai aparat terkait, Tirto.id menjelaskan bahwa penyebab masih terjadinya kebakaran adalah lokasi pemadaman yang jauh dari sumber air dan lahan gambut yang kering. Alasan-alasan yang diutarakan aparat terkait mengenai hal ini mengindikasikan bahwa aparat belum bekerja maksimal, padahal efek berbahaya yang dirasakan sudah berlangsung sejak lama dan tidak kunjung diatasi. Upaya yang dilakukan oleh pihak terkait belum komprehensif.

Tirto.id juga mengutip penyebab lain dari kabut asap yang masih melanda Riau adalah akibat dari kabut asap yang berada di daerah lain, terbawa oleh pusan angin dan berkumpul di Riau. Kemudian kabut asap mengepul di Riau dan memperparah kondisi di sana.

***Make moral judgement:*** Dalam pemberitaan mengenai masih terkendalanya pemadaman api di Riau, bingkai Tirto.id mengisyaratkan bahwa minimnya upaya pemerintah terkait dalam menanggulangi bencana kabut asap. Pemerintah dirasa tidak berpikir panjang mengenai dampak negatif yang ditimbulkan dari peristiwa ini. Penanganan kabut asap yang belum matang itu mengakibatkan masyarakat terkena dampak negatif dari kabut asap dan memperburuk kondisi sekitar.

***Treatment recommendation:*** Penanganan kabut asap yang dilakukan oleh aparat adalah menangkap tersangka perorangan dan korporasi dalam kasus kebakaran hutan dan lahan. Tirto.id membingkai bahwa upaya terakhir yang dapat dimaksimalkan adalah penegakan hukum berupa penangkapan dan proses hukum yang berimbang, mengingat aparat tidak dapat melakukan upaya pencegahan sebelum terjadinya kabut asap.

Padahal menurut Dedi, upaya pencegahan, sosialisasi, imbauan sudah dilakukan setiap tahunnya. Namun, hasilnya masih nihil. Tirto.id membingkai bahwa imbauan yang diberikan tersebut tidak efektif sehingga kebakaran kembali terjadi setiap tahunnya. Terlebih, upaya pencegahan yang ada tidak diseimbangkan dengan penegakan hukum yang berimbang, yang kemudian hanya menjadi wacana sia-sia.

31. Berita Tirto.id pada 17 September 2019

Judul: Tersangka Karhutla di Sumatera dan Kalimantan Jadi 218 Orang

Tabel 34. Analisis *Framing* "Tersangka Karhutla di Sumatera dan Kalimantan Jadi 218 Orang"

<i>Define problems</i>	Area seluas 504,755 hektare di Riau habis terbakar.
<i>Diagnose causes</i>	Bertambahnya jumlah tersangka kasus karhutla di Sumatera dan Kalimantan yang ditetapkan oleh polisi, salah satunya PT SSS di Riau.
<i>Make moral judgement</i>	Area kebakaran yang jauh dari pusat air dan lahan gambut yang kering sehingga kebakaran semakin rawan.
<i>Treatment recommendation</i>	Merekayasa hujan buatan sebagai salah satu cara untuk memadamkan.

Sumber: Data olahan peneliti

***Define problems:*** Pendefinisian masalah yang dilakukan oleh Tirto.id adalah meningkatnya luas area yang terbakar di Riau, yaitu sekitar 504,755 hektare. Polda Riau dalam hal ini menangani 45 laporan masuk terkait karhutla.

***Diagnose causes:*** Penyebab yang dibingkai Tirto.id adalah polisi kembali mengumumkan adanya penambahan terkait jumlah tersangka kasus karhutla di Sumatera dan Kalimantan. Salah satunya adalah Riau. Sebelumnya, polisi telah menetapkan sebanyak 185 tersangka perorangan dan 4 korporasi, salah satunya adalah PT Sumber Sawit Sejahtera (SSS) di Riau.

***Make moral judgement:*** Penilaian moral yang diberikan oleh Tirto.id adalah kesulitan pemadaman yang dilakukan oleh polisi. Hal ini disebabkan karena lokasi yang cukup jauh dari pusat air. Terlebih, area

yang terbakar di Riau pun sangat luas. Selain itu, lahan gambut yang kering mengakibatkan area tersebut menjadi rawan kebakaran dan semakin sulit dipadamkan.

***Treatment recommendation:*** Mengutip pernyataan dari Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo, penyelesaian yang diberikan oleh Tirto.id dalam hal ini adalah perekayasa hujan buatan sebagai salah satu cara pemadaman.

32. Berita Tirto.id pada 17 September 2019

Judul: Penyebab dan Akibat Kebakaran Hutan di Kalimantan Hingga Sumatera

Tabel 35. Analisis *Framing* "Penyebab dan Akibat Kebakaran Hutan di Kalimantan Hingga Sumatera"

<i>Define problems</i>	Karhutla di Riau yang meluas saat musim kemarau 2019.
<i>Diagnose causes</i>	Pembukaan lahan dan hutan oleh oknum dengan cara dibakar.
<i>Make moral judgement</i>	Kualitas udara di Riau berada dalam kategori Tidak Sehat dengan angka ISPU 192 sehingga banyak warga terjangkit ISPA.
<i>Treatment recommendation</i>	Pengenaan pasal berlapis kepada tersangka penyebab karhutla, terutama korporasi.

Sumber: Data olahan peneliti

***Define problems:*** Pendefinisian masalah yang dilakukan oleh Tirto.id adalah adanya karhutla yang meluas di daerah Sumatera dan Kalimantan, salah satunya Riau pada saat musim kemarau 2019. Karhutla kemudian

mengakibatkan bencana asap. Per tanggal 16 September 2019, ditemukan sebanyak 59 *hotspot* yang tersebar di Riau, dengan area yang terbakar seluas 49,266 hektare.

***Diagnose causes:*** Mengutip pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, penyebab yang dibingkai oleh Tirto.id dalam hal ini adalah praktik pembukaan lahan yang dilakukan dengan cara pembakaran. Metode ini ditempuh oleh oknum dengan alasan mudah dan murah. Terlebih, musim kemarau menyebabkan cepat tersebar luasnya api sehingga luas lahan yang dibakar pun tidak tanggung-tanggung.

***Make moral judgement:*** Akibat dari adanya praktik pembukaan lahan yang dilakukan dengan cara membakar hutan dan lahan, kabut asap menjadi permasalahan lain yang berdampak buruk, khususnya bagi kesehatan masyarakat. Pasalnya, pada tanggal 16 September 2019, Indeks Status Pencemaran Udara di Pekanbaru, Riau menunjukkan angka 192. Artinya, kualitas udara di Kota Pekanbaru berada dalam kategori tidak sehat.

***Treatment recommendation:*** Penyelesaian yang diberikan oleh Tirto.id sebagaimana mengutip Dirjen Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani adalah mendorong penguasaan pasal berlapis kepada tersangka pembakar hutan, terutama korporasi. Hal ini tentu saja bukan hanya pasal-pasal mengenai UU Lingkungan, tetapi juga UU Kehutanan dan Perkebunan.

33. Berita Tirto.id pada 17 September 2019

Judul: Pemprov DKI Kirim 65 Orang SKPD Bantu Tangani Karhutla di Riau

Tabel 36. Analisis Framing "Pemprov DKI Kirim 65 Orang SKPD Bantu Tangani Karhutla di Riau"

<i>Define problems</i>	Pengiriman 65 personel dari SKPD ke Riau untuk menanggulangi karhutla oleh Pemprov DKI.
<i>Diagnose causes</i>	Asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
<i>Make moral judgement</i>	Personel yang dikirim ke Riau merupakan pasukan yang berpengalaman dalam menangani bencana yang serupa di tahun-tahun sebelumnya.
<i>Treatment recommendation</i>	

Sumber: Data olahan peneliti

***Define problems:*** Pendefinisian masalah yang dilakukan Tirto.id adalah adanya pengiriman pasukan dari Pemprov DKI Jakarta untuk menanggulangi karhutla di Riau tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah provinsi DKI Jakarta tidak tinggal diam melihat persoalan karhutla di Riau yang tidak kunjung membaik.

***Diagnose causes:*** Penyebab yang dibingkai oleh Tirto.id adalah karena kebakaran hutan dan lahan yang telah melanda Riau. Terlebih, asap yang kini menyelimuti Riau memperparah keadaan di sana.

***Make moral judgement:*** Penilaian moral yang diberikan oleh Tirto.id adalah pasukan yang dikirim oleh Pemprov DKI Jakarta merupakan pasukan yang sudah ahli dalam menanggulangi persoalan karhutla. Tirto.id juga membingkai bahwasanya karhutla merupakan peristiwa langganan yang terjadi setiap tahunnya. Jadi, tidak mengherankan bahwa

pasukan ini sudah terlatih kemampuannya untuk menanggulangi peristiwa tersebut.

34. Berita Tirto.id pada 17 September 2019

Judul: 3 Penyakit Akibat Kabut Asap Kebakaran Hutan di Kalimantan-Sumatera

Tabel 37. Analisis Framing "3 Penyakit Akibat Kabut Asap Kebakaran Hutan di Kalimantan-Sumatera"

<i>Define problems</i>	Karhutla yang menimbulkan banyak penyakit akibat kabut asap yang dihasilkannya.
<i>Diagnose causes</i>	Praktik pembukaan lahan dengan cara pembakaran lahan dan hutan merupakan ulah manusia.
<i>Make moral judgement</i>	Munculnya penyakit yang disebabkan oleh kabut asap, seperti gangguan pernapasan, iritasi mata.
<i>Treatment recommendation</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghindari aktivitas di luar rumah terlalu lama.</li> <li>2. Pastikan menetap di tempat yang sejuk dengan ventilasi yang baik.</li> <li>3. Menggunakan masker khusus polusi udara saat keluar rumah.</li> <li>4. Konsumsi banyak air putih.</li> <li>5. Temui dokter apabila mulai mengalami gejala gangguan pernapasan.</li> </ol>

Sumber: Data olahan peneliti

**Define problems:** Karhutla menghasilkan kabut asap yang membahayakan kesehatan. Paparan kabut asap tersebut dapat mengakibatkan orang mengidap batuk-batuk, sesak napas, dan bahkan iritasi mata.

**Diagnose causes:** Penyebab yang dibingkai oleh Tirto.id sebagaimana mengutip pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian adalah adanya praktik pembukaan lahan yang dilakukan oleh oknum. Terlebih, musim kemarau yang sedang terjadi memperparah kebakaran yang dibuat oleh manusia tersebut.

**Make moral judgement:** Kabut asap yang disebabkan oleh karhutla membahayakan kesehatan, terutama kesehatan pernapasan. Menurut data BMKG, di Kota Pekanbaru, partikel ringan yang berdiameter 10 mikrometer atau kurang atau dikenal dengan PM10 menyentuh angka 269,49  $\mu\text{gram}/\text{m}^3$ .

Hal ini tentu saja berdampak buruk pada paru-paru. Menurut BMKG yang dilansir dari *website* BMKG (2020), Nilai Ambang Batas (NAB) yang diperbolehkan berada dalam udara yaitu 150  $\mu\text{gram}/\text{m}^3$ . Tentu saja hal tersebut membahayakan kesehatan pernapasan manusia. Pertama yaitu batuk dan iritasi tenggorokan. Paparan asap yang dirasakan seseorang mengakibatkan tenggorokan perih dan menimbulkan gejala batuk-batuk. Kedua, kabut asap juga berbahaya bagi para penderita asma karena penderita asma rentan dengan polusi tinggi. Ketiga, kerusakan paru-paru. Kerusakan paru-paru mengakibatkan kesulitan bernapas, bahkan penyakit kanker paru-paru.

**Treatment recommendation:** Mengutip pernyataan Perth District Health Unit, Tirto.id menawarkan penyelesaian berupa menjaga kesehatan. Pertama, mengingat kabut asap memiliki dampak yang sangat

berbahaya bagi kesehatan tubuh, khususnya pernapasan, maka Tirto.id menyarankan untuk menghindari aktivitas di luar rumah terlalu lama. Apabila hendak berkegiatan di luar rumah, maka masker khusus polusi udara dibutuhkan untuk menghindari adanya kontak langsung dengan asap. Tirto.id menyarankan untuk menetap di tempat tinggal yang sejuk dengan ventilasi udara yang baik. Selain itu, Tirto.id juga menyarankan untuk mengonsumsi banyak air putih agar badan tidak dehidrasi dan peredaran darah juga lancar. Dokter menjadi saran terakhir apabila merasa gangguan pernapasan sudah mulai terganggu.

35. Berita Tirto.id pada 17 September 2019

Judul: BMKG Sebut Asap Karhutla Riau Sampai Singapura dan Malaysia

Tabel 38. Analisis Framing "BMKG Sebut Asap Karhutla Riau Sampai Singapura dan Malaysia"

<i>Define problems</i>	BMKG mendeteksi adanya penyebaran asap mencapai Singapura dan Semenanjung Malaysia akibat kebakaran lahan di Sumatera dan Kalimantan.
<i>Diagnose causes</i>	1. Angin yang bergerak ke arah barat laut membawa asap kebakaran di Riau ke arah Singapura dan Semenanjung Malaysia. 2. 60 <i>hotspot</i> yang tersebar di Riau.
<i>Make moral judgement</i>	Karhutla yang meluas di Sumatera dan Kalimantan mengakibatkan bencana kabut asap, salah satunya di Riau.
<i>Treatment recommendation</i>	

Sumber: Data olahan peneliti

**Define problems:** Tirto.id mendefinisikan BMKG mendeteksi sebaran asap akibat kebakaran lahan di Sumatera dan Kalimantan, salah satunya Riau, mencapai Singapura dan Semenanjung Malaysia sebagai masalahnya. Hal ini dilaporkan oleh BMKG sendiri melalui *website* nya yang diperbarui pada 17 September 2019 jam 12.00.

**Diagnose causes:** Penyebab yang dibingkai oleh Tirto.id adalah akibat arah angin yang bergerak dari tenggara-selatan ke arah barat laut-utara. Pergerakan arah angin inilah yang membuat Singapura dan Semenanjung Malaysia terkena kabut asap akibat karhutla.

Selain itu, *hotspot* yang tersebar di Riau juga menjadi faktor lain mengapa kabut asap terjadi. Mengutip data dari BMKG, sebanyak 60 *hotspot* tersebar di Riau. Riau menjadi salah satu dari tiga provinsi yang memiliki persebaran *hotspot* terbanyak di Sumatera.

**Make moral judgement:** Akibat dari bencana karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan, kabut asap menjadi bencana lanjutan sebagai implikasi dari karhutla. Terlebih, karhutla yang terjadi di musim kemarau ini memperparah keadaan yang ada. Akhirnya, banyak laporan masuk mengenai bencana asap dari beberapa provinsi, salah satunya ialah Riau.

36. Berita Tirto.id pada 17 September 2019

Judul: Yang Keliru dari Pernyataan Moeldoko soal Korban Karhutla Riau

Tabel 39. Analisis *Framing* "Yang Keliru dari Pernyataan Moeldoko soal Korban Karhutla Riau"

<i>Define problems</i>	Pernyataan kontroversial Moeldoko mengenai kebakaran hutan dan lahan di
------------------------	---

	Riau.
<i>Diagnose causes</i>	Cuitan Moeldoko di Twitter yang meminta warga yang terdampak kebakaran hutan dan lahan untuk tidak mengeluh karena bencana kebakaran hutan dan lahan datang dari Allah SWT.
<i>Make moral judgement</i>	Sifat antipati Moeldoko terhadap korban kebakaran hutan dan lahan dan menyepelkan kebakaran hutan dan lahan.
<i>Treatment recommendation</i>	Pemerintah turun langsung ke lapangan untuk meninjau keadaan yang sebenarnya di Riau.

Sumber: Data olahan peneliti

***Define problems:*** Tirto.id membongkai permasalahan yang ada sebagai cuitan kontroversial yang dilontarkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko melalui akun Twitternya mengenai kebakaran hutan dan lahan yang menimpa warga. Cuitan tersebut tidak menggambarkan posisi Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan yang dirasa tidak berempati pada masyarakat yang terdampak dan seolah-olah mengesampingkan fakta bahwa kebakaran hutan dan lahan merupakan bencana yang disebabkan karena kelalaian manusia.

***Diagnose causes:*** Penyebab yang dibongkai Tirto.id dalam hal ini adalah cuitan Moeldoko yang mengungkapkan bahwa kebakaran hutan dan lahan adalah sebuah bencana alam yang jauh di luar kendali manusia. Padahal, telah ditemukan sejumlah fakta bahwa kebakaran dilakukan dengan sengaja oleh korporasi maupun perseorangan untuk lahan siap tanam kelapa sawit. Tirto.id menyiratkan bahwa Moeldoko mencoba

menutupi sesuatu dibaliknya yang ada sangkut paut dengan kepentingannya, maka dari itu ia mengatakan hal demikian. Hal itu terlihat dari cuitan Moeldoko yang dikutip oleh Tirto.id dalam kutipan berita berikut,

***Make moral judgement:*** Penilaian moral yang dibingkai Tirto.id dalam hal ini sebagai antipati seorang pejabat publik yang sekiranya mampu melindungi rakyatnya, namun bertindak sebaliknya. Moeldoko dianggap menyepelekan kasus kebakaran hutan dan lahan yang telah terbukti disebabkan oleh aktivitas manusia yang serakah. Padahal, fakta di lapangan yang ditemukan polisi sama sekali tidak menunjukkan adanya unsur-unsur yang disebabkan karena faktor alam. Pernyataannya yang demikian malah menunjukkan ketidakmampuannya serta jajarannya dalam menanggulangi perkara ini.

Tirto.id membingkai bahwa pemerintah bisa dianggap melanggar HAM karena membiarkan para tersangka melakukan kejahatan tersebut dan membahayakan banyak pihak.

***Treatment recommendation:*** Penyelesaian masalah yang dibingkai Tirto.id adalah pemerintah agar segera turun ke Riau untuk melihat peristiwa lebih dekat dengan mata kepala sendiri agar dapat mengevaluasi pernyataan-pernyataan kontroversial terkait bencana kebakaran hutan dan lahan yang merupakan kesalahan fatal dari perseorangan dan korporasi, bukan murni bencana alam. Pernyataan Wiranto yang mengatakan bahwa Jokowi sangat prihatin terhadap kebakaran hutan dan lahan dan memiliki perhatian khusus terhadap hal itu diharapkan bukan hanya harapan semata yang dilontarkan kepada publik melalui media. Tetapi hal itu juga diserentakkan dengan memberikan solusi riil dalam menanggulangi

permasalahan yang ada, seperti pemberian sanksi hukum kepada para tersangka terkait.

37. Berita Tirto.id pada 18 September 2019

Judul: Wiranto Klaim Asap Akibat Kebakaran hutan dan lahan Tak Separah Pemberitaan di Media

Tabel 40. Analisis *Framing* "Wiranto Klaim Asap Akibat Kebakaran hutan dan lahan Tak Separah Pemberitaan di Media"

<i>Define problems</i>	Pernyataan Wiranto mengenai keadaan bencana kabut asap di Riau tidak separah pemberitaan di media.
<i>Diagnose causes</i>	Wiranto berdalih rombongan presiden dapat beraktivitas tanpa masker selama di Riau.
<i>Make moral judgement</i>	Pemerintah mengabaikan dampak dari asap yang mengganggu aktivitas warga.
<i>Treatment recommendation</i>	Tersangka pembakaran lahan diproses secara hukum.

Sumber: Data olahan peneliti

***Define problems:*** Pendefinisian masalah yang dilakukan Tirto.id dalam hal ini adalah pernyataan kontroversial Wiranto mengenai keadaan bencana kabut asap Riau yang sebenarnya. Tirto.id membingkai pemberitaan ini dengan menjelaskan bahwa Wiranto berdalih, dalam hal ini berarti Tirto.id mempercayai bahwa Wiranto menutupi suatu kondisi yang buruk kepada publik.

***Diagnose causes:*** Tirto.id membingkai penyebab masalah yang terjadi dengan menggunakan kata 'berdalih' untuk menjelaskan pernyataan Wiranto terkait aktivitasnya selama di Riau yang bisa dilakukan tanpa

menggunakan masker. Tirto.id meyakini bahwa Wiranto menutupi sesuatu kepada publik, artinya Wiranto tidak mengatakan yang sebenarnya. Ada suatu hal di balik itu yang ditutupi. Hal itu bisa saja karena Wiranto hanya berkunjung dalam waktu yang singkat di Riau atau bahkan Wiranto tidak berada di ruangan terbuka terlalu lama, sehingga beliau dapat beraktivitas tanpa menggunakan masker.

***Make moral judgement:*** Tirto.id menilai bahwasanya pemerintah tidak bertanggung jawab untuk mengungkapkan kebenaran kepada publik dan menanggulangnya. Pemerintah lupa bahwa mereka tidak tinggal di daerah yang terdampak bencana kabut asap sehingga pemerintah berani berkata demikian, sehingga dapat mengabaikan dampak negatif yang dirasakan korban terdampak bencana kabut asap, seperti masalah kesehatan dan terganggunya aktivitas masyarakat.

***Treatment recommendation:*** Tirto.id merekomendasikan penyelesaian yang mengutip pernyataan dari Wiranto berupa penangkapan dan penindakan hukum kepada para tersangka yang dapat menimbulkan jera dan tidak mengulanginya kembali.

38. Berita Tirto.id pada 18 September 2019

Judul: Walhi Sebut Hujan Buatan Sengaja Diturunkan Saat Jokowi ke Riau

Tabel 41. Analisis *Framing* "Walhi Sebut Hujan Buatan Sengaja Diturunkan Saat Jokowi ke Riau"

<i>Define problems</i>	Hujan yang tiba-tiba turun saat Jokowi melakukan kunjungan ke Riau.
<i>Diagnose causes</i>	Perilaku Jokowi dan Tito Karnavian yang menggambarkan seolah-olah Riau

	sudah berangsur membaik.
<i>Make moral judgement</i>	Riau masih dalam kondisi yang tidak baik.
<i>Treatment recommendation</i>	Upaya peringatan dini mengenai pencemaran udara, protokol evakuasi, dan posko pengungsian bagi masyarakat dari pemerintah.

Sumber: Data olahan peneliti

***Define problems:*** Tirto.id dalam hal ini mendefinisikan permasalahan yang ada sebagai bentuk pencitraan pemerintah yang dilakukan dalam menanggulangi hujan buatan dengan hujan buatan. Mengutip dari pernyataan Fandi Rahman selaku Deputy Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Riau, yang mengatakan bahwa turunnya hujan buatan ini menarik karena hanya ada pada saat Jokowi berkunjung ke Riau. Pengutipan yang dilakukan Tirto.id mengindikasikan bahwa Tirto.id menyetujui pernyataan Fandi.

***Diagnose causes:*** Penyebab masalah yang terjadi sebagaimana yang dibingkai oleh Tirto.id adalah perilaku Jokowi dan Tito Karnavian yang menggambarkan seolah-olah Riau sudah mulai berangsur membaik. Padahal lagi-lagi, hujan buatan diturunkan dengan sengaja pada saat pemerintah melakukan kunjungan ke Riau. Pemerintah membohongi publik setelah melakukan penanganan minim yang juga hanya berlangsung sementara.

***Make moral judgement:*** Penilaian yang diberikan oleh Tirto.id terhadap peristiwa ini adalah pencitraan yang dilakukan pemerintah dianggap sia-sia karena tidak juga membuahkan hasil manis. Titik api juga tidak berkurang setelah kedatangan Jokowi ke Riau yang tentu saja

memperburuk kualitas udara di Riau. Kondisi yang dikatakan berangsur membaik, dipatahkan oleh Tirto.id yang mengutip pernyataan dari Fandi.

**Treatment recommendation:** Tirto.id merekomendasikan penyelesaian dengan menyarankan pemerintah untuk membangun Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di 300 titik di Riau yang bertujuan sebagai pengingat akan bahayanya pencemaran udara akibat kebakaran. Selain itu, perlunya protokol evakuasi yang jelas apabila terjebak dalam peristiwa seperti ini serta pembangunan posko-posko evakuasi bagi masyarakat yang terdampak.

39. Berita Tirto.id pada 19 September 2019

Judul: Apa Itu Karhutla yang Sebabkan Kabut Asap di Sumatera & Kalimantan?

Tabel 42. Analisis *Framing* "Apa Itu Karhutla yang Sebabkan Kabut Asap di Sumatera & Kalimantan?"

<i>Define problems</i>	Karhutla merupakan bencana yang mengakibatkan bencana kabut asap yang mencemari udara dan mengganggu pernapasan.
<i>Diagnose causes</i>	Praktik pembukaan lahan yang dilakukan dengan cara membakar lahan dan hutan.
<i>Make moral judgement</i>	ISPU di Kota Pekanbaru berada dalam kategori Sangat Tidak Sehat.
<i>Treatment recommendation</i>	Penetapan tersangka perorangan dan korporasi penyebab karhutla.

Sumber: Data olahan peneliti

**Define problems:** Pendefinisian masalah yang dilakukan Tirto.id adalah karhutla merupakan sebuah bencana yang mengakibatkan polusi

udara dan mengganggu pernapasan dikarenakan kabut asap yang dihasilkannya. Pada tanggal 19 September, karhutla terjadi di enam provinsi, salah satunya adalah Riau.

**Diagnose causes:** Penyebab yang dibingkai oleh Tirto.id adalah praktik pembukaan lahan atau *land clearing* yang dilakukan oleh para pemilik lahan. Hal ini ditempuh dengan menggunakan metode yang cepat dan murah, yaitu membakar hutan dan lahan. Bencana karhutla merupakan bencana yang disebabkan oleh ulah manusia. Musim kemarau merupakan faktor tambahan yang dimanfaatkan oleh para pembakar lahan sehingga kebakaran meluas.

**Make moral judgement:** Tirto.id menilai bahwasanya peristiwa karhutla ini sudah berada di tahap yang membahayakan. Pasalnya, karhutla yang terjadi berakibat buruk pada kualitas udara di Riau. Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di Riau menunjukkan udara di Riau berada dalam kategori Sangat Tidak Sehat, dalam arti lain mencapai angka 238.

**Treatment recommendation:** Penyelesaian yang diberikan oleh Tirto.id adalah menetapkan para pembakar hutan dan lahan sebagai tersangka oleh kepolisian. Tirto.id menyatakan bahwa polisi telah menangkap para pelaku pembakar hutan, baik perorangan maupun korporasi sampai tanggal 16 September 2019. Hal ini tentu saja menunjukkan bahwa Tirto.id menyiratkan keinginan untuk adanya penindakan lebih lanjut terkait tersangka karhutla.

40. Berita Tirto.id pada 19 September 2019

Judul: Spotify Buat Playlist "Hazed and Confused" Singgung Bencana Asap

Tabel 43. Analisis *Framing* "Spotify Buat Playlist "Hazed and Confused" Singgung Bencana Asap"

<i>Define problems</i>	Spotify mengeluarkan <i>playlist</i> bernama "Hazed and Confused" sebagai tanggapan atas bencana karhutla.
<i>Diagnose causes</i>	Kabut asap yang tidak hanya melanda Indonesia, namun juga negara tetangga.
<i>Make moral judgement</i>	Sekolah-sekolah tutup, aktivitas terganggu, kebutuhan terhadap masker meningkat.
<i>Treatment recommendation</i>	

Sumber: Data olahan peneliti

***Define problems:*** Tirto.id mendefinisikan *playlist* yang dikeluarkan oleh Spotify yang bernama "Hazed and Confused" sebagai tanggapan atas bencana karhutla sebagai masalahnya. Kabut asap kini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di Sumatera dan Kalimantan, tetapi juga dirasakan sejumlah masyarakat negara tetangga. Dikeluarkannya *playlist* ini merupakan sebuah bentuk rasa kepedulian yang ditunjukkan oleh Spotify atas bencana kabut asap yang melanda. *Playlist* tersebut berisikan lagu-lagu yang berkaitan tentang asap dan api.

***Diagnose causes:*** Penyebab yang dibingkai oleh Tirto.id adalah bencana kabut asap yang tidak hanya melanda sejumlah wilayah di Indonesia, melainkan juga melanda negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Disebutkan bahwa Malaysia merasa muak atas kejadian kabut asap yang tidak kunjung terselesaikan. Maka dari itu, Spotify mengeluarkan *playlist* ini sebagai respons atau kritik kepada peristiwa karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia dan mengakibatkan kabut asap.

***Make moral judgement:*** Peristiwa kabut asap mengakibatkan ditutupnya sekolah-sekolah, terganggunya aktivitas-aktivitas warga, dan meningkatnya kebutuhan masker akibat menghindari terjangkitnya gangguan pernapasan.

41. Berita Tirto.id pada 19 September 2019

Judul: Karhutla: Malaysia Kirim Surat ke Jokowi, Singapura Tawari Bantuan

Tabel 44. Analisis *Framing* "Karahutla: Malaysia Kirim Surat ke Jokowi, Singapura Tawari Bantuan"

<i>Define problems</i>	Ketidakmampuan pemerintah Indonesia dalam menangani persoalan karhutla, sehingga Singapura dan Malaysia menawarkan bantuan terkait penanganan karhutla dan kabut asap yang melanda Indonesia.
<i>Diagnose causes</i>	Pembukaan lahan kelapa sawit dengan cara membakar hutan.
<i>Make moral judgement</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Polusi asap karhutla mengakibatkan ketegangan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia serta Singapura.</li> <li>2. Merusak habitat tumbuhan dan hewan serta kerusakan iklim.</li> <li>3. Asap mengakibatkan penyakit berbahaya.</li> </ol>
<i>Treatment recommendation</i>	Pengiriman surat bertujuan untuk menawarkan bantuan, bukan upaya

	saling tuding-menuding.
--	-------------------------

Sumber: Data olahan peneliti

**Define problems:** Pendefinisian masalah yang dilakukan Tirto.id dalam hal ini adalah pemerintah Indonesia yang tidak mampu menanggulangi persoalan karhutla di Riau, sehingga pada akhirnya menerima tawaran dari Singapura dan Malaysia untuk menanggulangi peristiwa karhutla di sejumlah wilayah di Indonesia. Perdana Menteri Malaysia menawarkan bantuan berupa pengiriman surat dan membuat pernyataan respons. Berbeda dengan Singapura, melalui Menteri Lingkungan Hidupnya, Masagos Zulkifli melalui unggahan yang ada di Facebook, ia menyatakan bahwa Singapura siap membantu Indonesia dalam menanggulangi karhutla di Indonesia, termasuk mengirimkan pasukan pemadam kebakaran ke Indonesia.

**Diagnose causes:** Penyebab yang dibingkai Tirto.id dalam hal ini adalah peristiwa karhutla ini disebabkan oleh aktivitas pembukaan lahan, khususnya lahan kelapa sawit yang dilakukan dengan metode murah dan mudah, yaitu membakar hutan. Terlebih, Tirto.id menyebutkan bahwasanya terdapat 40 perusahaan sawit yang terlibat dalam kebakaran hutan ilegal tersebut.

**Make moral judgement:** Terdapat 3 penilaian moral yang diberikan oleh Tirto.id dalam hal ini. Pertama, terjadi ketegangan diplomatik antara Indonesia dengan negara tetangga, terutama Malaysia dan Singapura sebagai negara yang paling terdampak kabut asap dari Indonesia. Kedua, kebakaran hutan di Indonesia tidak hanya membahayakan manusia. Hewan dan tumbuhan juga kehilangan habitatnya seiring terbakarnya hutan dan lahan akibat keserakahan manusia. Ketiga, asap bisa

menimbulkan penyakit seperti gangguan pernapasan, penyakit jantung, stroke, bahkan kematian.

***Treatment recommendation:*** Apa yang dilakukan oleh negara tetangga bukanlah sebuah upaya untuk tuding-menuding perihal kebakaran hutan dan lahan. Namun, hal ini bertujuan untuk membantu Indonesia dalam menangani kebakaran hutan dan lahan.

42. Berita Tirto.id pada 19 September 2019

Judul: Saat Wiranto Ditantang Tinggal Lebih Lama di Lokasi Karhutla

Tabel 45. Analisis *Framing* "Saat Wiranto Ditantang Tinggal Lebih Lama di Lokasi Karhutla"

<i>Define problems</i>	Pernyataan kontroversial Wiranto yang memancing amarah warga.
<i>Diagnose causes</i>	Pernyataan kontroversial Wiranto mengenai kondisi di Riau akibat karhutla yang menurutnya tidak separah apa yang diberitakan media.
<i>Make moral judgement</i>	Pemerintah tidak tanggap dalam menyelesaikan persoalan karhutla.
<i>Treatment recommendation</i>	Wiranto diminta rehat daripada membuat pernyataan kontroversial.

Sumber: Data olahan peneliti

***Define problems:*** Pendefinisian masalah yang dilakukan oleh Tirto.id adalah pernyataan kontroversial Wiranto yang memancing amarah warga, yaitu ditantangnya Wiranto untuk tinggal lebih lama di Riau oleh warga karena pernyataannya yang kontroversial. Kunjungannya yang hanya berlangsung selama sehari meremehkan apa yang dirasakan oleh masyarakat terdampak karhutla. Tirto.id mengutip salah satu narasumber

wawancara, Laras, seorang mahasiswa Universitas Islam Riau yang mengatakan bahwa Wiranto lancang sebagai pejabat negara karena tidak mengakui parahnya keadaan yang sebenarnya terjadi di Riau.

Selain itu, Laras juga menantang Wiranto untuk tinggal lebih lama di Riau untuk merasakan apa yang sebenarnya terjadi di Riau akibat karhutla. Masih mengutip Laras, Tirto.id menyebutkan bahwa langit di Riau tidak lagi biru, melainkan kuning dan keruh. Jarak pandang pun juga menurun. Debu bertebaran bak salju yang membahayakan pernapasan masyarakat.

***Diagnose causes:*** Penyebab yang dibingkai oleh Tirto.id adalah pernyataan kontroversial Wiranto terkait kunjungannya ke Riau yang mengatakan bahwa Riau tidak separah apa yang diberitakan oleh media. Wiranto menyatakan bahwa ketika ia berkunjung ke Riau, ia dapat beraktivitas tanpa masker, jarak pandangnya masih jauh, pesawat masih dapat terbang dan mendarat. Ia mengatakan hal tersebut pada tanggal 18 September 2019, sehari setelah kunjungannya ke Riau.

Padahal kenyataannya, pada tanggal 13 dan 14 September 2019, Laras sebagai salah satu narasumber yang diwawancarai Tirto.id menyatakan bahwa langit dan udara menguning. Hal itu tidak sesuai dengan apa yang diutarakan Wiranto.

***Make moral judgement:*** Penilaian yang diberikan oleh Tirto.id adalah pemerintah dinilai lepas tangan dalam menanggulangi persoalan karhutla. Pernyataan Wiranto juga dinilai tidak sesuai dengan apa yang disebut Jokowi bahwa karhutla merupakan kesengajaan terorganisir. Pelaksanaan salat Istisqa dinilai merupakan kepasrahan pemerintah dalam menangani persoalan karhutla.

**Treatment recommendation:** Penyelesaian yang diberikan oleh Tirto.id dalam hal ini adalah Wiranto untuk segera turun dari jabatan menterinya. Mengutip pernyataan Made Ali yang mengatakan bahwa Wiranto lebih baik rehat, daripada ia membuat pernyataan kontroversial yang jelas-jelas menyakitkan hati rakyatnya.

43. Berita Tirto.id pada 20 September 2019

Judul: Pemerintah Tak Sigap, Akankah Bencana Karhutla 1997-1998 Terulang?

Tabel 46. Analisis *Framing* "Pemerintah Tak Sigap, Akankah Bencana Karhutla 1997-1998 Terulang?"

<i>Define problems</i>	Karhutla kembali melanda sejumlah wilayah di Indonesia, salah satunya Riau yang ditandai dengan adanya asap yang menyelimuti kota tersebut setelah sebelumnya karhutla juga terjadi pada tahun 1997-1998.
<i>Diagnose causes</i>	Pembukaan lahan yang dilakukan dengan cara membakar hutan.
<i>Make moral judgement</i>	Penanggulangan karhutla belum banyak menunjukkan kemajuan besar sejak tahun 1997-1998 oleh pemerintah.
<i>Treatment recommendation</i>	Pemerintah seharusnya sudah menyiapkan solusi karhutla, mengingat karhutla terjadi hampir setiap tahunnya.

Sumber: Data olahan peneliti

**Define problems:** Pendefinisian masalah yang dibingkai oleh Tirto.id adalah karhutla di Indonesia yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia

kembali terjadi di tahun 2019. Indonesia pernah dilanda karhutla besar tahun 1997-1998 silam.

Pada tahun 2019, karhutla kembali terjadi di Indonesia. Salah satu provinsi yang terdampak karhutla adalah Provinsi Riau. Kabut asap menyelimuti Riau berdasarkan data dari BMKG yang dilaporkan pada tanggal 17 September 2019.

***Diagnose causes:*** Penyebab yang dibingkai oleh Tirto.id adalah adanya pembukaan lahan yang dilakukan oleh oknum-oknum melalui metode membakar hutan. Hal ini diperkuat dengan mengutip pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian periode 2016-2019 yang memantaunya lewat helikopter bersama Kepala BNPB dan Panglima TNI.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), akibat kebakaran tersebut, seluas 49,266 hektare area di Riau terbakar habis.

***Make moral judgement:*** Penilaian yang diberikan oleh Tirto.id adalah pemerintah memberikan solusi yang minim dan membiarkan warga terus tersiksa karena asap. Pernyataan-pernyataan kontroversial yang dilontarkan pejabat pemerintah tidak membantu apa-apa dalam menanggulangi persoalan karhutla.

***Treatment recommendation:*** Menurut Tirto.id dalam hal ini adalah seharusnya pemerintah sudah menghadirkan solusi konkret dalam menanggulangi karhutla sejak tahun 1997-1998. Pemerintah jangan lepas tangan dalam persoalan karhutla dan baru membenahinya kembali setelah karhutla kembali terjadi.

Judul: Kualitas Udara Pekanbaru dan 4 Kota Terdampak Asap Kebakaran Hutan

Tabel 47. Analisis *Framing* "Kualitas Udara Pekanbaru dan 4 Kota Terdampak Asap Kebakaran Hutan"

<i>Define problems</i>	Memburuknya kualitas udara di Pekanbaru akibat karhutla yang melanda.
<i>Diagnose causes</i>	Terdapat 187 <i>hotspot</i> tersebar di Riau.
<i>Make moral judgement</i>	Kualitas udara di Pekanbaru, Riau berada dalam kategori Sangat Tidak Sehat.
<i>Treatment recommendation</i>	

Sumber: Data olahan peneliti

***Define problems:*** Pendefinisian masalah yang dibingkai oleh Tirto.id adalah memburuknya kualitas udara di sejumlah wilayah di Indonesia, salah satunya Kota Pekanbaru, Riau. Hal ini disebabkan oleh karhutla yang terjadi dan kemudian memicu bencana kabut asap. Bahkan, kabut asap tersebut menyebar sampai ke Singapura dan Malaysia pada 17 September lalu.

***Diagnose causes:*** Mengutip data dari BMKG, terdapat 187 *hotspot* yang tersebar di Riau sehingga mengakibatkan kabut asap. Namun, *hotspot* ini bersifat fluktuatif. Artinya, jumlah *hotspot* bisa berkurang atau bertambah di lain waktu.

***Make moral judgement:*** Penilaian yang diberikan oleh Tirto.id dalam hal ini adalah memberikan data mengenai kualitas udara di Pekanbaru dari tiga organisasi berbeda, KLHK, BMKG, dan Airvisual. Ketiganya

menunjukkan bahwa kualitas udara di Pekanbaru secara keseluruhan berada dalam kategori Sangat Tidak Sehat, dan bahkan berbahaya.

45. Berita Tirto.id pada 20 September 2019

Judul: Cara Atasi Karhutla di Kalimantan-Sumatera Versi Jokowi hingga BNPB

Tabel 48. Analisis *Framing* "Cara Atasi Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan-Sumatera Versi Jokowi hingga BNPB"

<i>Define problems</i>	Kebakaran hutan dan lahan yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia, salah satunya Riau, berdampak buruk bagi makhluk hidup dan lingkungan sekitar.
<i>Diagnose causes</i>	Korporasi dan perseorangan banyak menciptakan permasalahan lingkungan.
<i>Make moral judgement</i>	Pemerintah jangan hanya memikirkan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga memerhatikan lingkungan.
<i>Treatment recommendation</i>	Adanya upaya preventif dan rehabilitatif dalam menghadapi bencana seperti ini.

Sumber: Data olahan peneliti

***Define problems:*** Kebakaran hutan dan lahan yang melanda di sejumlah wilayah di Indonesia, yang mana salah satunya adalah Riau mengakibatkan kerusakan alam dan menurunnya kualitas udara. Masyarakat kembali terjangkit ISPA serta hewan dan tumbuhan kembali kehilangan tempat hidupnya.

***Diagnose causes:*** Tirto.id membingkai penyebab dari permasalahan ini adalah karena ulah perseorangan dan korporasi. Menurut Tirto.id yang

mengutip pernyataan Dr Agnes Setyowati H., M.Hum, seorang Pengamat Sosial Budaya dari Universitas Pakuan Bogor, Jawa Barat, perusakan lingkungan oleh perseorangan maupun korporasi dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Ulah yang disengaja diperuntukkan untuk lahan konsesi kelapa sawit karena pembersihan lahan paling mudah dan murah dilakukan dengan melalui pembakaran. Sedangkan, ulah yang tidak disengaja maksudnya adalah tersangka yang tidak memikirkan jangka panjang dari adanya perusakan lingkungan, baik itu penebangan dan sebagainya.

***Make moral judgement:*** Masih mengutip pernyataan Dr Agnes Setyowati H., M.Hum, adanya perusakan lingkungan yang kerap terjadi membuat Tirto.id menilai bahwasanya pemerintah hanya acuh mengenai infrastruktur dan ekonomi, sebagaimana yang selama ini mencoba untuk dipertunjukkan kepada khalayak. Hal itu kemudian tergambarkan melalui betapa lalainya pemerintah dalam urusan lingkungan hidup. Akhirnya, kebakaran terjadi lagi dan membahayakan banyak makhluk hidup dan rusaknya ekosistem lingkungan.

***Treatment recommendation:*** Rekomendasi yang diberikan oleh Tirto.id adalah bentuk upaya preventif dan rehabilitatif dari pemerintah untuk masyarakat, mengingat bencana seperti ini kerap terjadi setiap tahunnya. Upaya preventif dimaksudkan untuk menggerakkan masyarakat akan pentingnya mencintai dan merawat lingkungan, yang dikhususkan untuk generasi muda. Sedangkan, upaya rehabilitatif diupayakan untuk melakukan reboisasi setelah tercemarnya lahan akibat kerusakan dan kebakaran.

Judul: Pernyataan-Pernyataan Kontroversial Pejabat Indonesia soal Kebakaran hutan dan lahan

Tabel 49. Analisis Framing "Pernyataan-Pernyataan Kontroversial Pejabat Indonesia soal Karhutla"

<i>Define problems</i>	"Pejabat Jakarta" yang melontarkan pernyataan kontroversial mengenai kebakaran hutan dan lahan Riau.
<i>Diagnose causes</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pernyataan Menteri Ekonomi Politik dan Hukum Wiranto yang mengatakan bahwa keadaan di Riau tidak separah yang diberitakan oleh media.</li> <li>2. Cuitan Kepala Staf Presiden Moeldoko di Twitter yang meminta warga untuk bersabar karena kebakaran hutan dan lahan datang dari Allah.</li> <li>3. Pernyataan Menteri Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo yang mengatakan negara tetangga yang terdampak hanya protes tanpa ada upaya untuk membantu.</li> <li>4. Kampanye #SawitBaik yang didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP), Kemenko Perekonomian, dan Kemenkominfo.</li> </ol>

<i>Make moral judgement</i>	Pemerintah diharapkan mengerahkan upaya penanggulangan bencana, alih-alih berkomentar kontroversial.
<i>Treatment recommendation</i>	Menerima tawaran bantuan dari negara asing, alih-alih mengatakan mampu menanganinya sendiri, namun hasilnya juga minim.

Sumber: Data olahan peneliti

***Define problems:*** Permasalahan yang didefinisikan oleh Tirto.id dalam hal ini adalah “pejabat Jakarta” yang melontarkan pernyataan-pernyataan kontroversial mengenai kebakaran hutan dan lahan Riau. Penggunaan kata “pejabat Jakarta” oleh Tirto.id menunjukkan bahwasanya pejabat ini tinggal di Jakarta, jauh dari pusat bencana kebakaran hutan dan lahan, dan tidak merasakan secara langsung serta berkelanjutan dampak buruk yang dirasakan akibat kebakaran hutan dan lahan. Tirto.id mendefinisikan bahwa “pejabat Jakarta” ini hanya penuh omong kosong dan tidak mengatakan yang sejujurnya.

***Diagnose causes:*** Penyebab permasalahan yang dibingkai oleh Tirto.id dalam pemberitaan ini adalah pernyataan kontroversial milik Wiranto, Moeldoko, dan Eko Putro Sandjojo selaku Menkopolhukam, Kepala Staf Kepresidenan, dan Menteri Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi periode 2014-2019. Pasalnya, Wiranto mengatakan kepada publik setelah melakukan kunjungan ke Riau, bahwa kondisi di Riau tidak separah yang diberitakan media. Beliau mengatakan bahwa Riau dalam kondisi yang baik-baik saja, tidak diselimuti kabut asap yang parah. Padahal, Wiranto hanya melaksanakan kunjungan selama satu hari pada tanggal 17 September 2019 dan pada saat kunjungannya ke Riau, hujan buatan baru sengaja diturunkan sebagai bentuk pencitraan.

Tidak hanya Wiranto, Menteri Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo malah semakin memperkeruh keadaan. Palsunya, pernyataannya yang dinilai Tirto.id tidak solutif malah semakin menunjukkan lalainya pemerintah dalam menangani bencana ini. Eko mengatakan bahwa negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura yang terkena dampak kabut asap hanya menyalahkan Indonesia, tanpa menawarkan bantuan. Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan kenyataan yang ada karena Indonesia menolak tawaran bantuan dari Singapura dan Malaysia terkait penanggulangan bencana kabut asap. Sikap hipokrit Indonesia melalui pernyataan kontroversial pejabatnya kini tidak dapat terbendung lagi.

Cuitan Moeldoko melalui akun Twiternya yang meminta masyarakat untuk berhenti mengeluh dan coba untuk menerima lapang dada kenyataan yang ada. Dalam hal ini, Tirto.id menggunakan kata “kesialan” yang menunjukkan kemalangan yang diderita oleh orang lain, namun tidak dirasakan Moeldoko. Moeldoko digambarkan sebagai figur yang tidak memiliki simpati dan empati kepada korban.

Keadaan semakin keruh karena adanya kampanye #SawitBaik yang secara terang-terangan didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP), Kemenko Perekonomian, dan Kemenkominfo. Mengutip dari Khalisa Khalid selaku Koordinator Desk Politik Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), keadaan yang sudah genting karena kebakaran yang disebabkan oleh pembukaan lahan sawit melalui pembakaran malah semakin menjadi-jadi. Pemerintah dianggap tidak bertanggung jawab atas hal ini karena malah mendukung kampanye #SawitBaik, bukannya membatasi atau malah menolak gerakan ini.

***Make moral judgement:*** Kebakaran yang mengakibatkan kerusakan dan kerugian yang harus ditutup oleh negara malah tidak tertolong karena

pernyataan kontroversial pejabat yang mengesampingkan dampak negatif dari kebakaran. Pejabat seolah-olah lupa kalau bencana ini bisa diatasi dengan pengerahan *water bombing*, penegakan hukum yang lebih tegas, alih-alih hanya berkomentar dan saling melempar batu sembunyi tangan.

***Treatment recommendation:*** Penyelesaian yang ditawarkan oleh Tirto.id adalah berupa penerimaan bantuan dari negara tetangga dalam menanggulangi bencana alam. Alih-alih mengatakan masih mampu menanganinya sendiri, namun hasilnya juga masih nihil, sebaiknya menerima dengan tangan terbuka lebar.

47. Berita Tirto.id pada 21 September 2019

Judul: KLHK Segel 52 Lahan di Kalimantan dan Sumatera Terkait Karhutla

Tabel 50. Analisis *Framing* "KLHK Segel 52 Lahan di Kalimantan dan Sumatera Terkait Karhutla"

<i>Define problems</i>	Penyegelan lahan konsesi di Kalimantan dan Sumatera yang diduga merupakan pembakar hutan. Salah satunya adalah Provinsi Riau.
<i>Diagnose causes</i>	Pemerintah lengah dalam menangani persoalan karhutla sehingga karhutla kembali terjadi.
<i>Make moral judgement</i>	Langkah pemerintah belum membuat jera para tersangka pembakar hutan.
<i>Treatment recommendation</i>	Transparansi mengenai perusahaan yang melakukan pembakaran hutan dan lahan.

Sumber: Data olahan peneliti

***Define problems:*** Pendefinisian masalah yang dibingkai oleh Tirto.id adalah penyegelan lahan konsesi seluas 9.000 hektare yang tersebar di sejumlah provinsi. Salah satu provinsi tersebut adalah Riau. Dalam hal ini, Tirto.id mengutip pernyataan Dirjen Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani mengenai penyegelan 52 lahan konsesi di Kalimantan dan Sumatera atas dugaan pembakaran hutan.

***Diagnose causes:*** Penyebab yang dibingkai oleh Tirto.id adalah pemerintah yang hanya setengah-setengah dalam menangani persoalan karhutla. Mengutip pernyataan Juru Kampanye Greenpeace Arie Rampos yang mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut telah dikenakan sanksi, namun hanya berupa sanksi administratif, bukan sanksi paksaan seperti pencabutan izin.

***Make moral judgement:*** Masih mengutip pernyataan Arie Rampos, Tirto.id menilai bahwasanya langkah pemerintah belum memberikan efek jera kepada pelaku. Perusahaan industri kelapa sawit dan hutan tanaman industry terus mengulangi aksinya setiap tahun sampai karhutla menjadi peristiwa tahunan yang sebenarnya bisa dicegah.

***Treatment recommendation:*** Penyelesaian yang diberikan oleh Tirto.id dalam hal ini adalah mempublikasikan nama-nama perusahaan yang menjadi tersangka karhutla oleh pemerintah. Hal itu tentu saja bertujuan untuk menimbulkan efek jera kepada para tersangka.

48. Berita Tirto.id pada 21 September 2019

Judul: Pembakaran Hutan: Elite yang Untung, Peladang yang Disalahkan

Tabel 51. Analisis *Framing* "Pembakaran Hutan: Elite yang Untung, Peladang yang Disalahkan"

<i>Define problems</i>	Karhutla di Indonesia menguntungkan <i>broker</i> jual beli tanah antara elite lokal dan masyarakat kota serta perusahaan besar.
<i>Diagnose causes</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembukaan lahan yang dilakukan dengan metode membakar dengan alasan mudah dan murah.</li> <li>2. Banyak tanah dijual untuk digunakan sebagai ongkos kampanye politik dan mengambil hati rakyat untuk meningkatkan suara saat pemilihan.</li> </ol>
<i>Make moral judgement</i>	Indonesia akan habis terbakar apabila melanggengkan bisnis jual beli tanah yang menggunakan metode membakar.
<i>Treatment recommendation</i>	Pemerintah memutus rantai bisnis transaksi lahan dari elite bisnis hingga elite lokal.

Sumber: Data olahan peneliti

***Define problems:*** Pendefinisian masalah yang dibingkai oleh Tirto.id dalam hal ini adalah karhutla menguntungkan bisnis jual beli lahan yang terjadi dibalikinya. Ada tiga tipe pembakar lahan, sebagaimana mengutip Herry Purnomo yang meneliti fenomena ini di Riau. Pertama adalah aktor berskala kecil, yaitu peladang yang dianggap tidak memberi dampak besar terhadap karhutla. Namun, dua tipe lainnya, yaitu *broker* jual beli lahan antara pendatang dan pembeli dari kota dan industri yang melakukan pembukaan lahan dengan membakar.

**Diagnose causes:** Penyebab yang dibingkai oleh Tirto.id adalah metode bakar yang dipilih sebagai cara untuk membersihkan lahan dengan alasan menghemat modal. Dari segi bisnis dan ekonomi, metode ini sangat menguntungkan karena aktor menengah maupun korporasi tidak perlu merogoh kocek dalam-dalam untuk membuka lahan. Terlebih, hasil yang diterima setelah tanah yang dibakar tersebut terjual, harganya juga tinggi. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan ini juga erat kaitannya dengan politik. Para pemilik lahan menjual belikan tanahnya untuk kemudian digunakan untuk ongkos kampanye. Selain itu, kegiatan jual beli tanah juga dipermudah karena untuk menarik hati rakyat yang dapat mendongkrak suara pada saat pemilihan.

**Make moral judgement:** Penilaian moral yang diberikan oleh Tirto.id dalam hal ini adalah Indonesia akan terbakar habis akibat langgengnya kegiatan pembukaan lahan yang dilakukan dengan cara membakar hutan dan lahan.

**Treatment recommendation:** Penyelesaian yang diberikan oleh Tirto.id adalah pemerintah hendak memutuskan rantai bisnis transaksi jual beli lahan, dari korporasi sampai elite desa. Pemerintah harus bersikap tegas dalam memerangi adanya kejahatan yang terorganisir ini.

49. Berita Tirto.id pada 22 September 2019

Judul: Greenpeace: Paru-Paru Warga Lebih Kotor daripada Sepatu Jokowi

Tabel 52. Analisis *Framing* "Greenpeace: Paru-Paru Warga Lebih Kotor daripada Sepatu Jokowi"

<i>Define problems</i>	Kehadiran Jokowi di Riau tidak terlalu signifikan dalam menurunkan dampak
------------------------	---

	akibat kebakaran hutan dan lahan.
<i>Diagnose causes</i>	Meningkatnya kabut asap akibat dari titik api yang menjalar di lahan gambut.
<i>Make moral judgement</i>	Jokowi menyakiti hati korban asap karena hanya datang untuk foto-foto dan tidak berani memberikan sanksi terhadap pembakar hutan.
<i>Treatment recommendation</i>	Jokowi diminta mencabut izin perusahaan pembakar hutan.

Sumber: Data olahan peneliti

***Define problems:*** Tirto.id mendefinisikan masalah dari pemberitaan ini sebagai tidak signifikannya kedatangan Jokowi ke Riau untuk meninjau keadaan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Tirto.id menyiratkan bahwa ada atau tidak ada kehadirannya Jokowi di Riau, kabut asap tetap tidak teratasi secara maksimal.

***Diagnose causes:*** Penyebab yang dibingkai oleh Tirto.id dalam pemberitaan ini adalah karena titik api yang sudah menjalar dan menyebar di lahan gambut masih menyala. Hujan yang turun memang mematikan titik api, tetapi malah menjadikannya asap. Sehingga, muncullah kabut asap yang berbahaya bagi kesehatan warga.

***Make moral judgement:*** Kunjungan Jokowi yang fotonya dipublikasikan oleh Pramono Anung dan ramai akan komentar netizen seputar sepatunya yang kotor seolah-olah melupakan kenyataan asli yang diderita oleh korban terdampak asap. Hal tersebut menyakiti hati para korban yang paru-parunya sudah penuh dengan kepulan asap yang selama ini menyelimuti areanya.

**Treatment recommendation:** Tirto.id memberikan penyelesaian berupa gebrakan besar dari Jokowi untuk segera memberikan sanksi tegas kepada tersangka pembakar hutan dan pencabutan izin dari pemerintah. Mengutip pernyataan Arie, yang mengatakan bahwa perlu adanya transparansi mengenai tersangka korporasi pembakaran hutan, sejauh apa penindakan hukumnya.

50. Berita Tirto.id pada 22 September 2019

Judul: BMKG: Kualitas Udara Jambi, Palembang & Pekanbaru Masih Tak Sehat

Tabel 53. Analisis *Framing* "BMKG: Kualitas Udara Jambi, Palembang & Pekanbaru Masih Tak Sehat"

<i>Define problems</i>	Kualitas udara di Pekanbaru berada dalam kategori berbahaya menurut data dari BMKG.
<i>Diagnose causes</i>	Konsentrasi PM10 mencapai angka 516,36 $\mu\text{gram}/\text{m}^3$ dari yang seharusnya hanya 150 $\mu\text{gram}/\text{m}^3$ .
<i>Make moral judgement</i>	1. Buruknya kualitas udara melumpuhkan aktivitas warga. 2. Dapat mengakibatkan gangguan pernapasan.
<i>Treatment recommendation</i>	

Sumber: Data olahan peneliti

**Define problems:** Tirto.id mendefinisikan kualitas udara di Pekanbaru berada dalam kategori berbahaya berdasarkan data yang dilansir dari *website* BMKG. Data tersebut menunjukkan bahwa konsentrasi PM10 melebihi Nilai Ambang Batas (NAB) tidak sehat pada tanggal 22 September 2019.

**Diagnose causes:** Penyebab yang dibingkai oleh Tirto.id adalah melebihinya Nilai Ambang Batas polusi udara di Pekanbaru, yakni mencapai 406,44  $\mu\text{gram}/\text{m}^3$ . Hal ini mengakibatkan kualitas udara di Kota Pekanbaru menjadi berbahaya.

**Make moral judgement:** Tirto.id menilai bahwasanya kualitas udara yang memburuk tersebut mengakibatkan umpuhnya aktivitas warga yang terdampak. Kandungan yang terdapat dalam asap yang pekat di udara tersebut dapat mengakibatkan masalah kesehatan, terutama gangguan pernapasan. Bahkan menyebabkan kematian pada sejumlah warga akibat terserang ISPA.

51. Berita Tirto.id pada 23 September 2019

Judul: Pemprov Riau Tetapkan Status Darurat Pencemaran Udara Kebakaran hutan dan lahan

Tabel 54. Analisis *Framing* "Pemprov Riau Tetapkan Status Darurat Pencemaran Udara Kebakaran hutan dan lahan"

<i>Define problems</i>	Gubernur Riau menetapkan Riau status darurat pencemaran pada Senin, 23 September 2019.
<i>Diagnose causes</i>	Gabungan kabut asap yang ada di Riau dan kiriman dari provinsi lain yang mengalami kebakaran lebih besar.
<i>Make moral judgement</i>	Kabut asap mengakibatkan menurunnya jarak pandang dan mulai menimbulkan bau menyengat.
<i>Treatment recommendation</i>	Menyiapkan tempat evakuasi bagi para korban rentan, seperti ibu-ibu, lansia,

	dan anak-anak.
--	----------------

Sumber: Data olahan peneliti

**Define problems:** Pendefinisian masalah yang dilakukan oleh Tirto.id dengan mengutip Antara adalah ditetapkan status darurat pencemaran udara di Riau oleh Gubernur Riau Syamsuar. Penetapan dilakukan pada 23 September 2019. Tirto.id menyiratkan bahwa kunjungan presiden dan jajarannya kemarin belum membuahkan hasil baik, bahkan minim hasil. Faktanya, Riau ditetapkan darurat pencemaran udara, enam hari setelah kunjungan presiden ke Riau.

**Diagnose causes:** Penyebab yang dibingkai oleh Tirto.id adalah memburuknya kondisi udara di Riau yang telah terjadi dari Jumat, 20 September 2019. Kabut asap yang ada di Riau merupakan gabungan dari kabut asap di Riau dan kiriman dari daerah-daerah lain yang mengalami kebakaran lebih besar. Pusaran angin membawa kabut asap tersebut ke Riau.

Hal itu diperkuat dengan adanya data dari BMKG yang menemukan titik api paling banyak di provinsi Sumatera Selatan dan Jambi. Dibandingkan dua provinsi tersebut, Riau memiliki titik api paling sedikit. Hal ini terlihat dari kutipan berita berikut,

**Make moral judgement:** Kabut asap yang menyelimuti Riau berdampak pada menurunnya jarak pandang dan timbulnya bau menyengat yang mengganggu. Hal ini tentu saja membahayakan aktivitas warga karena rendahnya jarak pandang dapat berakibat kecelakaan. Selain itu, Tirto.id menyiratkan dengan timbulnya bau menyengat, hal tersebut akan berpengaruh kepada kesehatan pernapasan warga di Riau.

***Treatment recommendation:*** Tirto.id mengutip pernyataan dari Syamsuar dalam memberikan rekomendasi terkait hal ini. Tirto.id berharap Gubernur Riau tersebut benar-benar memberikan tempat evakuasi bagi korban, terutama korban rentan seperti ibu hamil, anak-anak, dan lansia.

Namun, di sisi lain, Tirto.id juga menyiratkan adanya harapan mengenai upaya lebih dari pemerintah berupa menurunkan hujan buatan, bukan hanya menunggu hujan turun. Pasalnya, dengan telah ditetapkan status pencemaran udara, berarti kondisi udaranya pun tidak main-main atau membahayakan.

52. Berita Tirto.id pada 7 Oktober 2019

Judul: Tumpulnya Penegakan Hukum Penyebab Karhutla Terulang

Tabel 55. Analisis *Framing* "Tumpulnya Penegakan Hukum Penyebab Karhutla Terulang"

<i>Define problems</i>	Lemahnya penegakan hukum sehingga kebakaran hutan dan lahan kembali terulang setiap tahunnya.
<i>Diagnose causes</i>	Pemerintah abai dalam mengambil kebijakan komprehensif terkait kebakaran hutan dan lahan dan kebakaran hutan dan lahan merupakan kejahatan yang terorganisir oleh pemerintah pula.
<i>Make moral judgement</i>	Gertakan kosong Jokowi mengenai ancaman pencopotan jabatan kapolda dan pangdam apabila gagal mencegah maupun mengatasi kebakaran hutan dan

	lahan.
<i>Treatment recommendation</i>	Mendesak pemerintah untuk bertindak tegas dan menaikkan anggaran penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Sumber: Data olahan peneliti

***Define problems:*** Pendefinisian masalah yang dilakukan Tirto.id adalah lemahnya sikap pemerintah dalam menegakan hukum kebakaran hutan dan lahan sehingga kebakaran hutan dan lahan kembali terulang. Padahal, kenyataan telah menampar Jokowi setelah ia menjabat selama satu tahun, yaitu dilahapnya hutan dan lahan di wilayah Kalimantan dan Sumatera pada tahun 2015. Namun, ternyata hal tersebut tidak ditindaklanjuti secara lebih serius.

***Diagnose causes:*** Penyebab yang dibingkai oleh Tirto.id adalah pemerintah yang serampangan dalam menindaklanjuti persoalan kebakaran hutan dan lahan yang telah menjadi agenda tahunan. Ancaman-ancaman yang ada juga tidak mengecilkan keberanian para pelaku untuk tidak mengulang kejahatan yang sama. Tirto.id menyiratkan bahwa kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh adanya pembersihan lahan untuk keperluan penanaman kelapa sawit dengan mengutip laporan “Di Balik Tragedi Asap: Catatan Kebakaran Hutan dan Lahan”.

Selain itu, Tirto.id juga menyebutkan bahwa ada pihak-pihak yang diuntungkan dari adanya bencana kebakaran hutan dan lahan tersebut. Tirto.id mengindikasikan mengapa agenda ini kerap terulang karena pihak pejabat pemerintah yang ternyata terlibat dalam agenda ini.

***Make moral judgement:*** Penilaian yang diberikan Tirto.id mengenai hal ini adalah omong kosong Jokowi mengenai pencopotan jabatan kapolda dan pangdam apabila tidak mampu mencegah dan mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Pasalnya, kebakaran hutan dan lahan tetap terulang kembali dan tidak ada kapolda maupun pangdam yang dicopot dari jabatannya. Tirto.id menyiratkan bahwa Jokowi hanya ingin menunjukkan persona tegasnya ke publik melalui media, namun tidak merealisasikan seutuhnya.

***Treatment recommendation:*** Tirto.id memberikan penyelesaian berupa mengutip pernyataan Zenzi Suhadi selaku Kepala Departemen Advokasi Walhi mengenai penegasan penindakan hukum bagi tersangka kebakaran hutan dan lahan. Hal itu dapat dilakukan dengan penjatuhan vonis dan pengeksekusian atas vonis yang dijatuhkan. Selain itu, permasalahan kebakaran hutan dan lahan selama ini berada di bawah tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, namun hal tersebut tidak menunjukkan adanya perubahan progresif di bawah kuasa KLHK. Tirto.id masih mengutip dari Zenzi, menyiratkan bahwasanya perlu ada komisi khusus yang menangani kebakaran hutan dan lahan agar bencana ini tidak terulang kembali.

Selain itu, Tirto.id juga memberikan penyelesaian berupa peningkatan anggaran untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Sebagaimana yang diketahui, lahan yang terbakar di sejumlah wilayah di Indonesia jumlahnya tidak main-main. Sayangnya, anggaran penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di tahun 2019 diturunkan dari anggaran penanggulangan tahun lalu.

Judul: Kebakaran hutan dan lahan: Konspirasi Elite dan Dugaan Korupsi Sumur Bor

Tabel 56. Analisis *Framing* "Kebakaran hutan dan lahan: Konspirasi Elite dan Dugaan Korupsi Sumur Bor"

<i>Define problems</i>	Kasus korupsi dalam bencana kebakaran hutan dan lahan di Riau oleh pejabat pemerintah.
<i>Diagnose causes</i>	Ditangkapnya Gubernur dan Bupati di Riau akibat praktik korupsi terkait kehutanan dan sumber daya alam.
<i>Make moral judgement</i>	Maraknya pemberian izin pelepasan hutan dan perkebunan pada saat menjelang dan satu tahun setelah pilkada yang berubah menjadi lahan perkebunan.
<i>Treatment recommendation</i>	Pemutusan mata rantai korupsi oleh negara.

Sumber: Data olahan peneliti

***Define problems:*** Pendefinisian masalah yang dibingkai Tirto.id adalah terciumnya kasus korupsi dalam bencana kebakaran hutan dan lahan di Riau oleh pejabat pemerintah setempat. Hal itu menyiratkan alasan dibalik terus terulangnya kebakaran yang ada di Riau. Tirto.id juga menggunakan data-data dari Greenpeace Indonesia yang memiliki rekam jejak kasus korupsi terkait berkurangnya jumlah hutan.

***Diagnose causes:*** Penyebab dari permasalahan ini adalah ditangkapnya sejumlah pejabat publik di Riau, baik Gubernur maupun Bupati yang tersangkut kasus korupsi terkait penyalahgunaan lahan dan sumber daya alam. Tirto.id menyiratkan bahwa tidak mengherankan

mengapa kebakaran hutan dan lahan terus menjadi momok karena pejabatnya pun bertugas dalam melanggengkan kebakaran hutan dan lahan melalui praktik-praktik yang menyimpang.

***Make moral judgement:*** Menurut penilaian Tirto.id, kebakaran hutan dan lahan akan terus terjadi selama tradisi pemberian izin pelepasan hutan masih terjadi. Tirto.id menilai bahwa apa yang dilakukan ini merupakan bentuk korupsi yang seharusnya dihilangkan karena dampak yang diakibatkan pun tidak main-main.

***Treatment recommendation:*** Penyelesaian yang diberikan Tirto.id adalah memutuskan mata rantai oleh negara yang tentu saja memiliki kekuatan dan kekuasaan besar. Kebakaran hutan dan lahan tidak bisa terselesaikan hanya dengan gertakan dan ancaman kosong dari presiden. Perlu adanya penegakan hukum yang adil dan menyeluruh tanpa pandang bulu. Tirto.id juga menyiratkan kesatiran di dalam pemberian penyelesaian, bahwa apabila memang kebakaran hutan dan lahan ternyata telah menjadi sumber perekonomian sekelompok elit yang tidak pernah merasakan dampak dari kabut asap, maka jangan harap pemutusan mata rantai akan berjalan mulus seperti yang diharapkan.

54. Berita Tirto.id pada 8 Oktober 2019

Judul: Omong Kosong Pejabat Soal Karhutla yang Tak Perlu Dipercaya

Tabel 57. Analisis *Framing* "Omong Kosong Pejabat Soal Karhutla yang Tak Perlu Dipercaya"

<i>Define problems</i>	Dalih pejabat pemerintah mengenai kebakaran hutan dan lahan di Riau.
<i>Diagnose causes</i>	Pernyataan kontroversial Jokowi, Wiranto, dan Moeldoko selaku

	presiden, Menkopolhukam, dan Kepala Staf Kepresidenan yang meremehkan masalah kebakaran hutan dan lahan di Riau.
<i>Make moral judgement</i>	Pemerintah abai dan tidak berempati terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan dan korbannya. Kampanye #SawitBaik muncul saat kebakaran hutan dan lahan sedang meluas.
<i>Treatment recommendation</i>	Penerapan sanksi dan penegakan hukum kepada tersangka korporasi oleh pemerintah.

Sumber: Data olahan peneliti

***Define problems:*** Pernyataan pemerintah yang menutupi kenyataan bahwa kebakaran hutan dan lahan benar-benar terjadi. Pada kenyataannya, kebakaran hutan dan lahan tidak pernah absen dari sejak Jokowi dan jajarannya pertama kali menjabat. Namun, pejabat pemerintah kerap menyangkal kenyataan yang ada dengan melontarkan pernyataan-pernyataan tidak masuk di akal kepada publik. Berbekal dengan pernyataan Jokowi dan membantahnya dengan pernyataan Walhi,

***Diagnose causes:*** Selain daripada pernyataan Jokowi yang tidak sesuai dengan kenyataan lapangan, ternyata hal itu diperkeruh dengan pernyataan Wiranto selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disingkat Menkopolhukam periode 2014-2019. Pernyataan Wiranto yang menyebutkan bahwa keadaan di Riau tidak separah apa yang diberitakan media justru menuai protes. Pasalnya, kunjungan Wiranto yang hanya berlangsung sehari tersebut dibantah oleh data dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika yang mendeteksi

masih adanya sebaran asap yang ada di Riau. Selain itu, penetapan status darurat pencemaran udara oleh Gubernur Riau seolah menjadi tamparan bagi Wiranto setelah beliau mengatakan demikian.

Selain itu, cuitan Moeldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan periode 2014-2019 di akun Twitternya yang meminta masyarakat untuk berdoa dan bersabar. Tirto.id menyiratkan kenyataan bahwa Moeldoko tidak solutif seperti menegaskan penindakan hukum, ia justru hadir sebagai figur yang tidak memiliki empati dan simpati kepada masyarakat terdampak. Menurut Tirto.id, cuitannya malah berusaha menutupi tersangka penyebab kebakaran hutan dan lahan.

Pernyataan Jokowi yang menyebutkan bahwa pada saat kunjungannya ke Riau dan kemudian melangsungkan salat meminta hujan atau Istisqa menunjukkan bahwa Jokowi menutupi kenyataan bahwa kebakaran hutan dan lahan adalah ulah tangan manusia. Jokowi mencoba menutupinya dengan melakukan salat Istisqa, berarti kebakaran hutan dan lahan adalah sebuah bencana alam yang datang dari Tuhan YME. Padahal, tidak sedikit korporasi maupun perorangan yang telah tertangkap akibat membakar hutan dan lahan dengan sengaja untuk kepentingannya sendiri.

***Make moral judgement:*** Penilaian yang diberikan Tirto.id terkait hal ini adalah ketidaktegasan pemerintah dalam memberikan sanksi tegas terkait tersangka korporasi penyebab kebakaran hutan dan lahan. Tirto.id menyiratkan bahwa pemberian sanksi yang dilakukan pemerintah dilakukan secara formalitas tanpa adanya realisasi yang jelas.

***Treatment recommendation:*** Tirto.id memberikan penyelesaian berupa penegakan hukum seperti penyegelan, sanksi administratif yang tegas dan diterapkan kepada perusahaan-perusahaan penyebab kebakaran

hutan. Selain itu, perlu adanya tuntutan pidana yang juga perlu diterapkan kepada tersangka korporasi penyebab kebakaran hutan.

55. Berita Tirto.id pada 9 Oktober 2019

Judul: Cegah Karhutla, Badan Restorasi Gambut Ajak Warga Ternak Lebah

Tabel 58. Analisis *Framing* "Cegah Karhutla, Badan Restorasi Gambut Ajak Warga Ternak Lebah"

<i>Define problems</i>	Badan Restorasi Gambut (BRG) mendorong warga yang tinggal di area bekas karhutla untuk melakukan revitalisasi ekonomi berupa beternak lebah penghasil madu jenis <i>Trigona</i> sp.
<i>Diagnose causes</i>	Lahan bekas terjadi karhutla merupakan lahan kering. Revitalisasi bertujuan untuk membuat lahan tetap basah untuk mencegah terjadinya karhutla.
<i>Make moral judgement</i>	Hasil budidaya lebah madu diharapkan dapat menguntungkan baik masyarakat, pengusaha, dan pemerintah.
<i>Treatment recommendation</i>	Kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pengusaha setempat untuk membudidayakan lebah agar terhindar dari karhutla.

Sumber: Data olahan peneliti

***Define problems:*** Pendefinisian masalah yang dibingkai oleh Tirto.id adalah dorongan Badan Restorasi Gambut (BRG) untuk menggerakkan kelompok masyarakat (Pokmas) di Desa Bukit Timah, Dumai Selatan,

Riau, untuk beternak lebah penghasil madu jenis *Trigona* sp. di area gambut bekas terjadi karhutla.

***Diagnose causes:*** Penyebab yang dibingkai oleh Tirto.id adalah lahan bekas karhutla yang merupakan lahan gambut yang kering mempercepat perluasan kebakaran hutan dan lahan. Revitalisasi ini bertujuan untuk mencegah karhutla dengan menjaga lahan untuk tetap basah. Mengutip pernyataan Nazir Foad yang menyatakan bahwa revitalisasi ini dapat mencegah adanya karhutla karena warga memiliki rasa kepemilikan terhadap lahan tersebut.

***Make moral judgement:*** Penilaian yang diberikan oleh Tirto.id dalam hal ini adalah pembudidayaan lebah penghasil madu dapat menguntungkan masyarakat, baik secara ekonomi maupun lingkungan. Terlebih, sinergi yang hendak dibangun antara pemerintah, masyarakat, dan pengusaha juga akan menguntungkan satu sama lain.

***Treatment recommendation:*** Pembudidayaan lebah penghasil madu harus dilakukan dengan bantuan dari organisasi-organisasi terkait agar dapat berhasil dan nantinya terhindar dari paparan asap akibat karhutla.

56. Berita Tirto.id pada 11 Oktober 2019

Judul: Kabut Asap Pekat Kembali Menyelimuti Beberapa Wilayah di Sumatera

Tabel 59. Analisis *Framing* "Kabut Asap Pekat Kembali Menyelimuti Beberapa Wilayah di Sumatera"

<i>Define problems</i>	Kota Pekanbaru kembali diselimuti kabut asap tebal pada Jumat, 11 Oktober 2019.
------------------------	---

<i>Diagnose causes</i>	15 titik panas yang masih tersebar di Provinsi Riau dan masih terjadi kebakaran hutan dan lahan di daerah pinggiran Pekanbaru sehingga kabut asap kembali menyelimuti Riau.
<i>Make moral judgement</i>	Penanganan belum maksimal sehingga keadaannya memburuk, seperti bau yang menyengat dan asap yang pekat sehingga jalanan tidak terlihat.
<i>Treatment recommendation</i>	Perlu adanya penyiraman dengan menggunakan bom air melalui jalur darat dan udara.

Sumber: Data olahan peneliti

***Define problems:*** Pada tanggal 11 Oktober 2019, pemberitaan yang diangkat adalah mengenai kembali diselimutinya kota Pekanbaru oleh kabut asap tebal. Pemberitaan ini menyiratkan bahwa penanganan yang dilakukan oleh pemerintah belum komprehensif. Memburuknya kabut asap yang terjadi mengakibatkan bau yang menyengat dan asap yang menutupi jarak pandang.

***Diagnose causes:*** Mengutip kepala BMKG Stasiun Pekanbaru Sukisno dari Antara, Tirto.id mengangkat penyebab kembali diselimutinya kota Pekanbaru dengan asap tebal. Hal ini disebabkan karena masih adanya titik api di sejumlah titik di Provinsi Riau dan mengakibatkan kota Pekanbaru terpenuhi asap sepanjang dua kilometer.

Selain itu, kebakaran juga masih terjadi di daerah pinggiran Pekanbaru. Sehingga, asap tersebut terbawa angin dan menyelimuti kota Pekanbaru dan menjadikan kota ini berbau menyengat dan mengganggu pengelihatn.

***Make moral judgement:*** Tirto.id menilai bahwa penanganan yang dilakukan belum komprehensif karena api belum sepenuhnya padam. Hal itu mengakibatkan memburuknya keadaan, seperti bau yang menyengat. Tirto.id menyiratkan bau yang menyengat tersebut mengganggu pernapasan. Selain itu, pengelihatn masyarakat juga terdampak karena asap pekat menyelimuti jalanan sehingga perlu menyalakan lampu mobil.

***Treatment recommendation:*** Tirto.id merekomendasikan untuk mengupayakan pemadaman yang maksimal dari jalur darat dan udara menggunakan *water bombing*, terutama ke daerah yang lahan gambut yang kering. Tirto.id menyiratkan, apabila lahan gambut yang kering belum tersentuh penanganan, kabut asap akan terus menyelimuti Riau.

57. Berita Tirto.id pada 21 Oktober 2019

Judul: Polda Riau Segera Tetapkan Korporasi sebagai Tersangka Karhutla

Tabel 60. Analisis *Framing* "Polda Riau Segera Tetapkan Korporasi sebagai Tersangka Karhutla"

<i>Define problems</i>	Peningkatan status penyidikan sekaligus penetapan PT TI sebagai tersangka korporasi kebakaran hutan dan lahan oleh Polda Riau.
<i>Diagnose causes</i>	Terjadinya kebakaran lahan di areal PT TI yang bergerak di bidang industri kelapa sawit.
<i>Make moral judgement</i>	Pemeriksaan menyeluruh yang

	dilakukan oleh Reskrimsus Polda Riau bersama dengan saksi dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Inhu dan ahli kebakaran hutan dan lahan terhadap PT TI.
<i>Treatment recommendation</i>	Penjeratan pasal terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap terlapor.

Sumber: Data olahan peneliti

***Define problems:*** Pada tanggal 21 Oktober 2019, Tirto.id mengangkat pemberitaan terkait adanya peningkatan status penyidikan sekaligus penetapan tersangka korporasi, dalam hal ini PT TI oleh Polda Riau. Pemberitaan ini membingkai adanya tersangka korporasi kelapa sawit yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan di Riau dan jauh dari apa yang disebut sebagai bencana alam.

***Diagnose causes:*** Penyebab yang dibingkai oleh Tirto.id adalah adanya kebakaran yang terjadi di areal perusahaan PT TI. Tirto.id membingkai bahwa adanya campur tangan manusia, dalam hal ini PT TI sebagai perusahaan kelapa sawit yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan. Hal ini menyiratkan bahwa kebakaran hutan dan lahan diakibatkan oleh kepentingan elit bisnis untuk dijadikan komoditi lain yang mengesampingkan dampak buruk bagi masyarakat.

***Make moral judgement:*** Pemeriksaan bertahap yang dilakukan oleh Reskrimsus Polda Riau, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Inhu dan sejumlah ahli kebakaran hutan dan lahan dalam rangka menentukan status penanganan PT TI. Hal ini mengindikasikan bahwasanya polisi mencoba untuk lebih kritis dan mendalam terkait penetapan PT TI sebagai

dalang penyebab kebakaran hutan dan lahan. Hal ini menyiratkan bahwa PT TI lalai dalam melindungi dan mengelola hutan dan lahan.

***Treatment recommendation:*** Penyelesaian yang direkomendasikan Tirto.id dalam hal ini adalah penegakan hukum berupa penerapan pasal-pasal terkait kepada tersangka penyebab kebakaran hutan dan lahan. Hal itu bertujuan untuk menegakkan hukum agar kebakaran hutan dan lahan tidak terulang kembali dan menjadi momok.

58. Berita Tirto.id pada 22 Oktober 2019

Judul: 345 Orang dan 17 Korporasi Ditetapkan Sebagai Tersangka Karhutla

Tabel 61. Analisis *Framing* "345 Orang dan 17 Korporasi Ditetapkan Sebagai Tersangka Karhutla"

<i>Define problems</i>	Penetapan ratusan tersangka perorangan dan korporasi penyebab karhutla oleh polisi, salah satunya Polda Riau.
<i>Diagnose causes</i>	PT PI dan PT SSS merupakan tersangka korporasi penyebab karhutla di Riau.
<i>Make moral judgement</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kabut asap di Indonesia menyebar sampai ke Singapura dan Malaysia.</li> <li>2. Terganggunya kesehatan, ekonomi, dan aktivitas warga.</li> <li>3. Diliburkannya sekolah akibat buruknya kualitas udara.</li> </ol>
<i>Treatment recommendation</i>	Kerjasama antara Bareskrim Polri dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan penyidikan Polda Riau untuk memudahkan koordinasi

	<i>stakeholder.</i>
--	---------------------

Sumber: Data olahan peneliti

***Define problems:*** Pendefinisian masalah yang dibingkai oleh Tirto.id adalah penetapan tersangka perorangan dan korporasi penyebab karhutla di Indonesia oleh pihak kepolisian. Penanganan karhutla dilakukan oleh Bareskrim kepada enam Polda lain yang provinsinya terdampak karhutla, salah satunya adalah Riau.

***Diagnose causes:*** Penyebab yang dibingkai oleh Tirto.id adalah terjadinya karhutla yang diduga disebabkan oleh dua korporasi berinisial PT SSS dan PT PI yang berpusat di Riau. Kedua korporasi ini sekarang berada dalam penyidikan Polda Riau.

***Make moral judgement:*** Penilaian moral yang diberikan oleh Tirto.id dalam hal ini adalah karhutla banyak menimbulkan kerugian. Pertama, bencana karhutla yang mengimplikasikan bencana kabut asap berakibat pada diselimutinya sejumlah provinsi di Indonesia, termasuk juga terselimutinya negara Singapura dan Malaysia akibat kabut asap di Indonesia. Selain itu, aktivitas dan perekonomian warga terganggu. Kesehatan warga pun terganggu karena asap tersebut mengandung partikel-partikel bahaya yang dapat mengganggu pernapasan apabila terhirup. Sekolah-sekolah juga terpaksa ditutup karena pekatnya kabut asap yang ada.

***Treatment recommendation:*** Penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian terkait tersangka karhutla dilakukan dengan membangun kerjasama untuk memudahkan koordinasi dengan *stakeholder*. Hal ini kemudian berarti setiap Polda yang provinsi nya terdampak karhutla melakukan penyidikan sendiri untuk kemudian dibawa ke Kejaksaan Tinggi di daerah masing-masing sehingga lebih terorganisir.

59. Berita Tirto.id pada 22 Oktober 2019

Judul: Polri Tetapkan 4 Orang dan 2 Korporasi Tersangka Karhutla

Tabel 62. Analisis *Framing* "Polri Tetapkan 4 Orang dan 2 Korporasi Tersangka Karhutla"

<i>Define problems</i>	Penetapan kembali 4 orang tersangka dan 2 korporasi kasus karhutla oleh polisi.
<i>Diagnose causes</i>	PT PI dan PT SSS menjadi tersangka korporasi di Riau.
<i>Make moral judgement</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terganggunya aktivitas, kegiatan perekonomian, dan kesehatan warga.</li> <li>2. Diliburkannya sekolah-sekolah.</li> <li>3. Kabut asap menyebar sampai negara Singapura dan Malaysia</li> </ol>
<i>Treatment recommendation</i>	Koordinasi antara Bareskrim dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Polda di enam wilayah lain.

Sumber: Data olahan peneliti

***Define problems:*** Pendefinisian masalah yang dibingkai Tirto.id adalah adanya penetapan tersangka kembali atas 4 orang dan 2 korporasi oleh pihak kepolisian. Sejauh ini, polisi telah menetapkan 368 tersangka kasus karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Tirto.id menyiratkan bahwa pihak kepolisian secara gencar menangani persoalan karhutla dengan menangkap oknum-oknum penyebab karhutla.

**Diagnose causes:** Penyebab yang dibingkai oleh Tirto.id dalam hal ini adalah PT SSS dan PT PI yang berpusat di Riau merupakan tersangka korporasi penyebab karhutla. Kedua korporasi ini sudah dalam penyidikan Polda Riau dan hendak ditindaklanjuti kasusnya.

**Make moral judgement:** Banyak aspek yang terganggu akibat dari bencana kabut asap. Singapura dan Malaysia ikut kena imbas dari bencana karhutla dan kabut asap yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Selain itu, aktivitas, kegiatan ekonomi, dan kesehatan masyarakat juga terganggu akibat pekatnya kabut asap yang melanda. Beberapa sekolah di Sumatera dan Kalimantan juga terpaksa diliburkan karena kualitas udaranya yang buruk.

**Treatment recommendation:** Penyelesaian yang diberikan oleh Tirto.id dalam hal ini adalah koordinasi antara Bareskrim Polri dan sejumlah Polda di Kalimantan dan Sumatera dalam menangani tersangka karhutla. Hal ini bertujuan untuk memudahkan penyidikan di setiap daerah.

#### **a. Hasil dan Pembahasan**

Entman melihat *framing* dalam dua konsep besar, yaitu seleksi isu dan penonjolan aspek tertentu dari suatu realitas. Ketika sebuah isu telah diseleksi, terdapat beragam strategi untuk menonjolkan aspek dari isu tersebut dengan menggunakan grafis untuk menonjolkan isunya, *labelling*, serta pengulangan kata (Eriyanto, 2002). Hal ini dapat dilihat sebagai berikut,

##### 1) Pemakaian grafis

Pemberitaan mengenai karhutla di Riau tahun 2019 yang dituliskan oleh Tirto.id pun tidak luput dari penggunaan grafis. Hal ini dilakukan oleh Tirto.id dengan menggunakan grafis-grafis seperti foto-

foto terkait pemadaman, keadaan kondisi di Riau, ilustrasi yang menggambarkan daruratnya karhutla di Riau. Fakta yang diangkat oleh Tirto.id ditekankan dengan penggunaan grafis untuk memperkuat penonjolan. Tirto.id dalam hal ini berpeluang untuk mempengaruhi bagaimana khalayak memaknai realitas yang ada melalui grafis yang digunakan.

Pemberitaan pada tanggal 7 Oktober 2019 yang berjudul “Tumpulnya Penegakan Hukum Penyebab Karhutla Terulang” menyisipkan ilustrasi Jokowi yang sedang mengajarkan tentang karhutla melalui media papan tulis dengan latar belakang hutan yang sedang terbakar. Ilustrasi ini menggambarkan bahwa Jokowi hanya melontarkan pernyataan-pernyataan teoritis dan tidak diseimbangkan dengan praktik yang sesuai. Apa yang diilustrasikan Tirto.id dalam pemberitaan ini merupakan salah satu bentuk kritik terhadap Jokowi yang selalu mengutarakan omong kosong sehingga karhutla kerap terulang.

Gambar 2. Ilustrasi Jokowi dalam pemberitaan "Tumpulnya Penegakan Hukum Penyebab Karhutla Terulang" oleh Tirto.id

Tumpulnya Penegakan Hukum Penyebab  
Karhutla Terulang



Sumber: tirto.id, 2019

Tidak hanya itu, pemberitaan yang berjudul “Karhutla: Konspirasi Elite dan Dugaan Korupsi Sumur Bor” pada tanggal 7 Oktober 2019 juga menyisipkan ilustrasi terkait karhutla. Dalam pemberitaan ini, Tirto.id mengilustrasikan sebuah keluarga kecil yang menggunakan masker lengkap anti asap, kebingungan hendak pergi ke mana di tengah-tengah api yang membara hutan dan lahan di sekitarnya. Ilustrasi ini menyiratkan bahwa masyarakat merupakan pihak yang paling terdampak dari adanya karhutla yang melanda karena buruknya keadaan yang mengelilinginya membuat mereka terisolasi. Hal ini dapat dilihat dari ilustrasi berita berikut,

Gambar 3. Ilustrasi pemberitaan "Karhutla: Konspirasi Elite dan Dugaan Korupsi Sumur Bor"

Karhutla: Konspirasi Elite dan Dugaan Korupsi  
Sumur Bor



Sumber: tirto.id, 2019

Pemberitaan lain dari Tirto.id terkait karhutla di Riau yang juga menggunakan ilustrasi adalah berita “Omong Kosong Pejabat Soal Karhutla yang Tak Perlu Dipercaya” pada tanggal 8 Oktober 2019. Ilustrasi itu menggambarkan Jokowi yang berjalan menjauhi

hutan yang terbakar dengan menggunakan masker. Tirto.id menyiratkan bahwa Jokowi seolah-olah berusaha tidak mengindahkan fakta di mana karhutla terus membara. Hal ini dapat dilihat dari ilustrasi berikut,

Gambar 4. Ilustrasi pemberitaan "Omong Kosong Pejabat Soal Karhutla yang Tak Perlu Dipercaya"

Omong Kosong Pejabat Soal Karhutla yang Tak Perlu Dipercaya



Sumber: tirto.id, 2019

## 2) *Labelling*

Dalam membingkai pemberitaan, Tirto.id juga melakukan *labelling* yang diberikan Tirto.id kepada para sekelompok pejabat, seperti Menteri Ekonomi Politik dan Hukum Wiranto, Kepala Staf Presiden Moeldoko, Menteri Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, dan Presiden Joko Widodo sebagai “pejabat Jakarta” dalam pemberitaan “Pernyataan-Pernyataan Kontroversial Pejabat Indonesia soal Kebakaran hutan dan lahan” pada tanggal 20 September 2019. “Pejabat Jakarta” menyiratkan sekelompok pejabat yang tinggal dan bekerja di Jakarta yang jauh dari area kebakaran di Riau, sok tahu dengan kondisi kebakaran di Riau.

Menurut Tirto.id, pejabat-pejabat tersebut hanya mengutarakan omong kosong belaka mengenai kondisi Riau yang baik-baik saja kepada publik, padahal kenyataannya bertolak belakang.

### 3) Pengulangan kata

Tirto.id terlihat dalam beberapa kali memberitakan peristiwa karhutla di Riau tahun 2019 kerap menggunakan kata ‘berdalih’ untuk menjelaskan pernyataan pemerintah dalam mengemukakan persoalan terkait karhutla di Riau tahun 2019. Penggunaan kata ‘berdalih’ menunjukkan bahwa Tirto.id membingkai pemerintah dan aparatnya hendak mencari-cari suatu alasan tertentu untuk menutupi suatu kesalahan. Hal ini terlihat dalam pemberitaan pada tanggal 15 Agustus 2019 yang berjudul “Polisi Tak Tahan Bos PT Sumber Sawit Sejahtera”. Pada pemberitaan ini, Tirto.id menggunakan kata ‘beralih; untuk menjelaskan bahwa Polisi sedang menutupi kenyataan terkait karhutla yang dilakukan oleh PT Sumber Sawit Sejahtera, dengan alasan bahwa PT SSS ini masih berada dalam penyidikan pihak kepolisian. Sehingga, penahanan bos PT SSS dianggap masih belum diperlukan oleh Polisi.

Tirto.id juga menggunakan kata ‘berdalih’ pada berita “BNPB Sebut Minim Peran Pemda Jadi Hambatan Penanganan Karhutla” pada tanggal 14 September 2019. Tirto.id menyiratkan bahwasanya Danjen Kopassus dianggap tidak sensitif terkait peristiwa karhutla yang jelas banyak membawa dampak buruk dibandingkan dampak positif. Tirto.id menjelaskan bahwa Danjen Kopassus mengatakan bahwa hutan dan lahan yang terbakar dapat dijadikan lahan usaha, mengesampingkan kenyataan bahwa kebakaran hutan dan lahan menimbulkan banyak kerugian.

Berita terakhir yang menggunakan kata ‘berdalih’ adalah berita yang berjudul “Wiranto Klaim Asap Akibat Karhutla Tak Separah Pemberitaan di Media” pada tanggal 18 September 2019. Dalam hal ini, Tirto.id menyiratkan bahwa Wiranto terus membohongi publik terkait keadaan sebenarnya di Riau dengan mengatakan bahwa Riau dalam kondisi yang baik-baik saja, tidak separah apa yang diberitakan di media. Padahal kenyataannya, jumlah pengidap penyakit ISPA di Riau terus bertambah akibat kabut asap yang dihasilkan oleh karhutla.

Selain itu, dalam konsepsi *framing* milik Entman, terdapat empat elemen *framing* yang dibentuknya. Hal tersebut terdiri atas *define problems*, *diagnose causes*, *make moral judgement*, dan *treatment recommendation* (Eriyanto, 2002). Dalam hal ini, peneliti telah menganalisis 59 dari 62 berita mengenai kebakaran hutan dan lahan di Riau dan telah melihat kecenderungan dengan menggunakan empat perangkat *framing* milik Entman yang digunakan oleh Tirto.id sebagai berikut,

#### 1) *Define problems*

Dari tabel nomor 63 mengenai *define problems*, Tirto.id cenderung mendefinisikan permasalahan berita tersebut pada penangkapan tersangka penyebab kebakaran hutan dan lahan di Riau tahun 2019. Dari 59 berita yang telah dianalisis oleh peneliti, terdapat 15 berita yang ditemukan peneliti memiliki kemiripan pendefinisian masalah, yakni mengenai persoalan penangkapan tersangka kebakaran hutan dan lahan di Riau, mulai dari penetapan tersangka, penyegelan lahan, sampai ancaman yang diberikan oleh menteri LHK kepada tersangka kasus pembakaran. Hal ini terlihat dalam pemberitaan yang berjudul “Polri: PT Sumber Sawit Sejahtera Jadi Tersangka Karhutla Riau” pada tanggal 12 Agustus 2019. Dalam pemberitaan itu, terlihat bahwasanya Tirto.id mendefinisikan PT Sumber Sawit Sejahtera sebagai tersangka karhutla Riau oleh Polisi sebagai masalahnya. Hal

ini menunjukkan bahwa karhutla bukanlah semata-mata disebabkan oleh bencana alam, melainkan ulah manusia yang serakah. Ditetapkannya PT SSS sebagai tersangka pun menyiratkan bahwa aparat penegak hukum tidak tinggal diam dalam menangani persoalan karhutla di Riau.

Berita berjudul “Polri Kini Tangani 100 Kasus Karhutla dengan 87 Tersangka” pada tanggal 15 Agustus 2019 juga merupakan berita yang pendefinisian masalahnya dibingkai oleh Tirto.id sebagai bertambahnya jumlah kasus dan tersangka yang diproses oleh pihak kepolisian. Artinya, pihak kepolisian tidak main-main dalam menindaklanjuti persoalan karhutla yang sedang terjadi.

Pada tanggal 22 Oktober 2019, Tirto.id memberitakan mengenai adanya penetapan tersangka baru terkait penyebab karhutla di Riau. Selain daripada korporasi, tersangka perorangan baru pun juga ditetapkan oleh pihak kepolisian. Penetapan tersangka mengindikasikan adanya penanganan yang serius yang dilakukan oleh pihak kepolisian Tirto.id meringkai bahwasanya kebakaran hutan dan lahan di Riau tidak lepas dari adanya praktik pembakaran oleh sejumlah tersangka perorangan maupun korporasi. Selain itu, Tirto.id meringkai bahwa aparat penegak hukum tidak tinggal diam dalam memberantas tersangka penyebab karhutla di Riau.

Sedangkan, pendefinisian masalah mengenai *hotspot* yang dideteksi oleh BMKG di Riau dalam berita yang berjudul “BMKG: 260 Titik Panas tersebar di Sumatera pada Senin Pagi” pada tanggal 19 Agustus 2019, kemudian pemberitaan pada tanggal sikap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyayangkan sikap Singapura yang tidak objektif dalam memandang persoalan karhutla pada tanggal 11 September 2019 dalam pemberitaan yang berjudul “Menteri Siti Nurbaya Protes ke Malaysia Soal Kabut Asap Karhutla”,

lalu 13 September 2019 yang mendefinisikan meningkatnya biaya hidup masyarakat di Riau akibat bencana karhutla yang melanda sebagai permasalahannya dalam berita yang berjudul “Kabut Asap Bikin Biaya Hidup Warga Pekanbaru Meningkat”, dan restorasi lahan gambut dalam pemberitaan yang berjudul “Cegah Karhutla, Badan Restorasi Gambut Ajak Warga Ternak Lebah” pada tanggal 9 Oktober 2019. Peneliti menemukan keempatnya masing-masing hanya berjumlah satu dari 59 berita yang ada terkait karhutla di Riau dan tidak memiliki kemiripan dengan berita yang lainnya.

## 2) *Diagnose causes*

Berdasarkan tabel nomor 64 mengenai *diagnose causes*, Tirto.id memiliki kecenderungan untuk membingkai ulah serakah manusia, baik perseorangan maupun korporasi sebagai penyebab dari persoalan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Riau. Peneliti menemukan sebanyak 22 dari 59 berita yang membahas mengenai ulah serakah manusia sebagai penyebab karhutla di Riau tahun 2019 oleh Tirto.id. Tirto.id membingkai bahwasanya manusia, baik itu korporasi maupun peladang perseorangan dengan sengaja membakar lahan untuk membuka lahan tersebut dan menjadikannya lahan konsesi kelapa sawit. Alasan yang mendasari dibukanya lahan dengan cara dibakar adalah metodenya yang mudah dan harganya yang murah. Hal ini terlihat dari pemberitaan Tirto.id yang berjudul “Tersangka Karhutla di Sumatera dan Kalimantan Jadi 218 Orang” pada tanggal 17 September 2019 mengenai bertambahnya jumlah tersangka kasus karhutla di Riau. Polisi yang sebelumnya telah menetapkan 185 tersangka perorangan dan 4 tersangka korporasi, kini kembali menetapkan 33 orang dan satu korporasi sebagai tersangka kasus karhutla. Salah satu tersangka korporasi yang disebutkan oleh Tirto.id

yakni PT Sumber Sawit Sejahtera yang berlokasi di Riau. Tirtoid menyiratkan bahwa karhutla tidak lepas dari adanya ulah manusia yang dengan sengaja membakar lahan untuk kepentingannya.

Pemberitaan berjudul “Cara Atasi Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan-Sumatera Veri Jokowi hingga BNPB” pada tanggal 20 September 2019. Tirtoid membingkai korporasi maupun perseorangan pembakar karhutla dengan sengaja maupun tidak disengaja membakar lahan dan hutan. Pembukaan lahan yang diperuntukkan untuk lahan konsesi kelapa sawit dengan metode pembakaran merupakan ulah yang disengaja oleh para tersangka. Sedangkan, ulah yang tidak disengaja adalah para tersangka tidak memikirkan efek jangka panjang dari adanya kerusakan lingkungan yang telah diperbuatnya.

Selain itu, pernyataan-pernyataan kontroversial yang diutarakan pemerintah malah memperkeruh suasana yang ada. Salah satu pemberitaan yang ditulis oleh Tirtoid yang berjudul “Polda Riau Segera Tetapkan Korporasi sebagai Tersangka Karhutla” pada tanggal 21 Oktober 2019. Terjadinya kebakaran di area lahan PT TI, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri kelapa sawit dan berlokasi di Riau diindikasikan oleh Tirtoid merupakan kebakaran yang disengaja oleh pihak perusahaan untuk kepentingan bisnis.

Tirtoid cenderung jarang membingkai api sebagai penyebab kebakaran hutan dan lahan di Riau. Hal ini terlihat dari pemberitaan yang dibingkainya disebabkan karena api hanya berjumlah satu berita, yaitu berita yang berjudul “Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera” pada tanggal 7 Agustus 2019. Selain itu, Tirtoid juga hanya sekali membingkai partikel berbahaya yang terkandung dalam asap akibat karhutla dapat memicu penyakit. Hal itu disebutkan dalam pemberitaan yang berjudul “Kabut Asap Pekanbaru Makin Tebal, Ratusan Warga Jatuh Sakit” pada tanggal 13 September 2019. Pada

tanggal 16 September 2019, Tirto.id juga membingkai area kebakaran yang jauh dari air, lahan yang kering sehingga rawan terbakar, polusi udara, sebagai penyebab kebakaran hutan dan lahan di Riau dalam pemberitaan yang berjudul “Kendala Pemadaman Karhutla versi Polri: Air dan Lokasi”, dan Tirto.id juga membingkai revitalisasi lahan gambut sebagai penyebab karhutla agar lahan tersebut tetap basah dan tidak memicu adanya karhutla. Masing-masing yang telah disebutkan sebelumnya merupakan penyebab yang dibingkai oleh Tirto.id yang hanya berjumlah satu dari 59 berita yang ada.

### 3) *Make moral judgment*

Dari tabel nomor 65 mengenai *make moral judgment* menunjukkan Tirto.id menilai pemerintah abai dalam menangani persoalan karhutla di Riau.sebagai penyebab dari persoalan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Riau. Peneliti menemukan sebanyak 16 dari 59 berita memiliki kesamaan pembingkai mengenai kelalaian pemerintah dalam menanggulangi persoalan karhutla, baik preventif maupun represif, khususnya di Riau tahun 2019. Selain itu, pemerintah dinilai oleh Tirto.id juga tidak serius dalam melakukan penindakan hukum kepada tersangka penyebab karhutla sehingga pada akhirnya karhutla kembali terulang. Hal ini terlihat dari pemberitaan Tirto.id yang berjudul “Saat Wiranto Ditantang Tinggal Lebih Lama di Lokasi Karhutla” pada tanggal 19 Oktober 2019. Dalam pemberitaan ini, Tirto.id menilai bahwasanya pemerintah lepas tangan dalam menangani persoalan karhutla. Pelaksanaan shalat Istisqa yang tidak dibarengi dengan adanya kegiatan pemadaman dari pihak terkait menunjukkan bahwa pemerintah sudah buntu mengenai solusi-solusi terkait penanganan persoalan karhutla.

Pemberitaan yang berjudul “Cara Atasi Karhutla di Kalimantan-Sumatera Versi Jokowi hingga BNPB” yang diunggah pada tanggal 20 September 2019 berisikan penilaian Tirto.id mengenai pemerintah yang selama ini hanya mengawatirkan persoalan ekonomi dan infrastruktur, serta mengesampingkan persoalan lingkungan hidup. Pemerintah membiarkan ekosistem semakin rusak akibat ulah serakah manusia. Pemerintah abai akan hukum-hukum yang seharusnya ditegakkan kepada tersangka karhutla sehingga tersangka pembakar hutan tidak jera dan mengulangi aksinya kembali setiap tahunnya. Minimnya penegakan hukum yang jelas menjadikan karhutla terus terulang setiap tahunnya. Tirto.id menilai bahwa pemberian sanksi yang dilakukan oleh pemerintah hanya sebatas formalitas. Hal ini dapat dilihat dari pemberitaan Tirto.id pada tanggal 8 Oktober 2019 yang berjudul “Omong Kosong Pejabat Soal Karhutla yang Tak Perlu Dipercaya.”

Tirto.id juga memberikan argumentasi berupa menurunnya jumlah *hotspot* yang berada di kawasan karhutla pada pemberitaan yang berjudul “Polri Kini Tangani 100 Karhutla dengan 87 Tersangka” pada tanggal 15 Agustus 2019. Kemudian, Tirto.id juga menilai bahwa kebakaran semakin meluas karena area yang terbakar tersebut jauh dari air sehingga lahan tersebut rawan kebakaran. Hal itu dijelaskan dalam pemberitaan yang berjudul “Tersangka Karhutla di Sumatera dan Kalimantan” pada tanggal 17 September 2019. Selanjutnya, Tirto.id juga menilai perlu adanya kerjasama antara masyarakat, pengusaha, dan pemerintah dalam membudidayakan lebah madu untuk revitalisasi lahan gambut dalam pemberitaan yang berjudul “Cegah Karhutla, Badan Restorasi Gambut Ajak Warga Ternak Lebah” pada tanggal 9 Oktober 2019. Namun, ketiga penilaian

tersebut tidak memiliki kemiripan antara satu sama lain maupun dari 59 berita yang telah dianalisis peneliti.

#### 4) *Treatment recommendation*

Berdasarkan tabel nomor 66 mengenai *treatment recommendation*, Tirto.id menawarkan sejumlah penyelesaian mengenai persoalan karhutla di Riau. Peneliti menemukan sebanyak 17 dari 59 berita memiliki kemiripan penyelesaian yang diberikan oleh Tirto.id, yaitu kecenderungan untuk turun langsung ke lapangan agar dapat melihat kondisi yang sebenarnya, menegakkan hukum yang berimbang kepada tersangka penyebab kebakaran hutan dan lahan. Contohnya seperti pemberian sanksi pidana maupun denda, bahkan sanksi administratif berupa pencabutan izin perusahaan. Hal ini dapat dilihat dalam pemberitaan tanggal 8 Agustus 2019 yang berjudul “Polisi Cari Keterkaitan 23 Terduga Pelaku Karhutla dengan Korporasi.”

Pemberitaan Tirto.id pada tanggal 21 Agustus 2019 yang berjudul “Wiranto: Penanganan Karhutla Tak Hanya Tanggung Jawab Pusat” menyiratkan bahwasanya sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum diperlukan untuk menangani persoalan karhutla. Seperti contohnya yaitu pencabutan izin korporasi penyebab karhutla. Koordinasi aktif di antara keduanya akan memberikan hasil baik terhadap persoalan karhutla yang selama ini belum menemukan titik terang.

Pada tanggal 14 September 2019, Tirto.id juga memberikan penyelesaian melalui beritanya yang berjudul “Wiranto: Penanganan Karhutla Tak Hanya Tanggung Jawab Pusat” berupa pendirian komisi khusus yang menindaklanjuti hukum lingkungan agar payung hukum

yang ada di Indonesia dipraktikkan sesuai dengan hukum yang tertera. Apabila payung hukum sudah dituliskan, namun praktiknya tidak dijalankan, maka hal itu akan sia-sia dan karhutla akan terus terulang.

Tirto.id juga memberikan beberapa penyelesaian lain seperti kembali memastikan luas lahan yang terbakar antara KLHK dan BNPB agar karhutla bisa segera teratasi. Penyelesaian yang disebutkan tersebut hanya berjumlah satu dari 59 berita yang dianalisis oleh peneliti. Hal itu dapat dilihat dari pemberitaan yang berjudul “Beda Data Kebakaran Hutan BNPB vs. KLHK: Riau Paling Terdampak” pada tanggal 10 September 2019.

Sepanjang bulan Agustus-Oktober 2019, peneliti menemukan Tirto.id menuliskan sebanyak 62 berita mengenai peristiwa karhutla di Riau tahun 2019. Namun, peneliti hanya menganalisis sebanyak 59 berita. Tiga berita yang tidak dianalisis oleh penulis merupakan berita-berita yang berjudul “Padamkan Karhutla, Tim KLHK Dikirim ke Riau Hingga Kalbar” tanggal 1 Agustus 2019; “Bantuan Pemadaman Karhutla Ditolak Riau, Anies: Kami Serahkan BNPB” tanggal 18 September 2019, dan “BMKG Sebut Kualitas Udara di Daerah Terdampak Asap Masih Tak Sehat” tanggal 24 September 2019. Pemberitaan tanggal 1 Agustus 2019 hanya berisikan laporan pemberitaan mengenai pengiriman tim pemadam kebakaran ke sejumlah wilayah terdampak karhutla, yang salah satunya adalah Riau dan tidak menjelaskan adanya kecenderungan untuk menyalahkan aktor dari peristiwa tersebut. Selain itu, pemberitaan tidak menjelaskan keadaan korban yang terdampak. Pemberitaan tanggal 18 September 2019 tidak menjelaskan adanya kecenderungan untuk menyalahkan pihak atau aktor yang bertugas di dalamnya. Sehingga berita tersebut dianggap tidak layak untuk dianalisis. Pemberitaan tanggal 24 September 2019 juga tidak menjelaskan keadaan korban terdampak dan kecenderungan untuk menyalahkan aktor dari suatu peristiwa.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Sepanjang bulan Agustus-Oktober tahun 2019, Tirto.id memberitakan sebanyak 62 berita mengenai peristiwa kebakaran hutan dan lahan di Riau tahun 2019. Dari 62 berita yang ada, peneliti menganalisis 59 berita dengan menggunakan metode analisis *framing* milik Robert Entman. Peneliti mendapatkan pembingkai yang dilakukan Tirto.id mengenai kebakaran hutan dan lahan di Riau tahun 2019 seperti berikut:

1. Pendefinisian masalah (*define problems*) yang dibingkai oleh Tirto.id terkait kebakaran hutan dan lahan di Riau tahun 2019 cenderung menonjolkan pemberitaan terkait penetapan tersangka penyebab karhutla di Riau tahun 2019 oleh pihak kepolisian.
2. Penyebab masalah (*diagnose causes*) yang cenderung ditonjolkan oleh Tirto.id dari pemberitaan terkait karhutla di Riau tahun 2019 adalah ulah manusia yang dengan sengaja membakar lahan dan hutan untuk kepentingannya membuka lahan dengan metode yang mudah dan biayanya yang murah.
3. Penilaian moral (*make moral judgement*) yang dibingkai oleh Tirto.id terkait pemberitaan karhutla di Riau tahun 2019 adalah pemerintah yang abai dalam mengenai persoalan karhutla di Riau. Tirto.id menilai bahwasanya pemerintah hanya memperdulikan persoalan ekonomi dan infrastruktur dan mengesampingkan permasalahan lingkungan.
4. Penyelesaian masalah (*treatment recommendation*) yang diberikan oleh Tirto.id mengenai pemberitaan karhutla di Riau tahun 2019 adalah penegakkan hukum yang setimpal bagi para tersangka penyebab karhutla. Hal

itu seperti pendirian komisi khusus hukum lingkungan agar praktik hukum dijalankan

sesuai dengan apa yang tertulis di dalam undang-undang, pemberian sanksi, serta pencabutan izin lahan.

Hal ini menyiratkan kepedulian dari Tirto.id kepada masyarakat yang terdampak dari adanya peristiwa karhutla di Riau yang tidak kunjung menemukan titik terang. Tirto.id juga kerap mengkritik para pemilik lahan sebagai penyebab terjadinya karhutla di Riau. Selanjutnya, Tirto.id sebagai sebuah media juga menjalankan kontrolnya terhadap pemerintah. Hal itu konsisten dengan tagline awal Tirto.id yang mengatakan bahwa ia berdiri untuk semua golongan dan tidak memiliki kepentingan politik.

## **1.2 Saran**

Penelitian ini menggunakan analisis *framing* milik Robert Entman dengan alasan bahwa model analisis *framing* milik Entman mampu melihat bagaimana peristiwa kebakaran hutan dan lahan dilihat dan dipahami oleh jurnalis Tirto.id. Untuk melihat peristiwa karhutla di Riau secara lebih utuh, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut yang menggunakan model analisis *framing* lain, seperti model analisis *framing* milik Pan dan Kosicki. Hal itu bertujuan untuk melihat apakah hasil akhirnya nanti akan memberikan hasil yang sama dengan hasil penelitian yang telah diteliti oleh peneliti sekarang atau malah justru sebaliknya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adom, D., Yeboah, A., & Ankrah, A. K. (2016). Constructivism Philosophical Paradigm: Implication For Research, Teaching and Learning. *Global Journal of Arts Humanities and Social Sciences*.
- Allan, S. (2006). *Online News: Journalism and the Internet*. Berkshire: Open University Press.
- Amanda, Y. (2014). Analisis Framing Sosok Jokowi Pascarakernas PDIP dalam Rubrik Laporan Utama Majalah Tempo Edisi 9-15 September 2013.
- American Press Institute. (2019). *What is journalism?* Retrieved from <https://www.americanpressinstitute.org/journalism-essentials/what-is-journalism/>
- Anggraeni, T. R. (2014). Analisis Framing dalam Artikel Berita Mengenai Citra Kepemimpinan Prabowo Subianto Pada Republika Online Selama November 2014.
- Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika. (2020, February 2). *Kualitas Udara Informasi Konsentrasi Partikulat (PM10)*. Retrieved from Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika: <https://www.bmkg.go.id/kualitas-udara/informasi-partikulat-pm10.bmkg>
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, vol. 9, no. 2.
- Cahyono, E. (2019). “Krisis Ekosistem (KarHutLa) dalam Kuasa Politik dan Pengetahuan; Soal Kedaulatan dan Keadilan-nya, dimana?”. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.
- Carmenta, R., & Porter-Jacobs, L. (2017). *Indonesia’s Peatland Fires and Toxic Haze: media discourses across scales of governance*. Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR).
- Chairani, D., & Kania, D. (2014). Kkonstruksi Realitas Dalam Pemberitaan Pelantikan Presiden Joko Widodo Analisis Framing pada Laporan Utama Majalah TEMPO dan Majalah GATRA. *Journal Communication Spectrum*.
- CNN Indonesia. (2019, September 24). *KLHK: 14 Perusahaan Asing Disegel Diduga Penyebab Karhutla*. Retrieved from CNN Indonesia:

- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190923200217-20-433158/klhk-14-perusahaan-asing-disejel-diduga-penyebab-karhutla>
- CNN Indonesia. (2019, August 13). *VIDEO: Karhutla di Riau Semakin Meluas*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/tv/20190813152428-407-420923/video-karhutla-di-riau-semakin-meluas>
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*. California: SAGE Publications.
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication*.
- Eriyanto. (2002). *Analisis Framing Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*.
- Evans, J. A. (2012). Why Study Journalism? In *Journalism*. New York: Mashall Cavendish Corporation.
- Eyes On The Forest. (2015). *Pemantauan Pembakaran Hutan dan Lahan di Perkebunan Teso Indah*.
- Fianto, L., & Aminulloh, A. (2014). Analisis Framing Berita Kasus Korupsi Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar di Vivanews.com dan Detik.com. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.
- Fleming, C., Hemmingway, E., Moore, G., & Welford, D. (2006). *An Introduction To Journalism*. London: SAGE.
- Foust, J. (2005). *Online Journalism: Principles and Practices of News for the Web*.
- Frankenberg, E., & Thomas, D. M. (2004). Health Consequences of Forest Fires in Indonesia.
- Glencoe. (2005). *Journalism Today*. The McGraw-Hill Companies, Inc.
- Guest, G., Namey, E. E., & Mitchell, M. L. (2013). Qualitative Research: Defining and Designing. In *Collecting Qualitative Data: A Field Manual for Applied Research*.
- Hall, J. (2001). *Online Journalism A Critical Primer*. London: Pluto Press.
- Hamad, I. (2004). *Konstruksi realitas politik dalam media massa: sebuah studi critical discourse analysis terhadap berita-berita politik*.

- Hancock, B., Ockleford, E., & Windridge, K. (2009). An Introduction to Qualitative Research . *The NIHR RDS for the East Midlands / Yorkshire & the Humber 2009 Qualitative Research*.
- Handayani, F. I. (2019). *Analisis Framing Pemberitaan Kasus Tindak Pidana Korupsi Oleh Setya Novanto pada Majalan Mingguan Tempo*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Indrayani, I. I., Sari, Y. D., & Vidyarini, T. N. (2016). Studi Komparasi Konstruksi Pemberitaan Bencana Kabut Asap di Kompas.Com dan Website Kementerian Kesehatan . *Jurnal SCRIPTURA*.
- iNews.id. (2019, September 17). *Karhutla Riau, Greenpeace Sarankan Jadi Bencana Nasional*. Retrieved from iNews.id: <https://www.inews.id/news/nasional/karhutla-riau-greenpeace-sarankan-jadi-bencana-nasional>
- Junaidi. (2013). Coverage Framing Haze On Online Media Selected In Indonesia, Malaysia, and Singapore.
- Karomani, H. (2004). Pengaruh Ideologi terhadap Wacana Berita dalam Media Massa.
- Katadata. (2019). *databoks*. Retrieved from Katadata: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/11/persebaran-kebakaran-hutan-dan-lahan-2019>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019, September 15). Retrieved from <https://www.depkes.go.id/article/view/19091600001/korban-karhutla-diminta-manfaatkan-pos-kesehatan.html>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2019, December 21). *Data Kualitas Udara dalam Indeks Standar Pencemar Udara*. Retrieved from Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: <http://iku.menlhk.go.id/aqms/>
- Kivunja, C., & Kuyini, A. B. (2017). Understanding and Applying Research Paradigms in Educational Contexts. *International Journal of Higher Education*.
- kompas.com. (2019, September 14). *Terjadi Hampir Setiap Tahun, Karhutla Bisa Jadi Bencana Nasional?* Retrieved from kompas.com: <https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/14/152616465/terjadi-hampir-setiap-tahun-karhutla-bisa-jadi-bencana-nasional?page=all>

- kompas.com. (2019, September 14). *Terjadi Hampir Setiap Tahun, Karhutla Bisa Jadi Bencana Nasional?* Retrieved from kompas.com: <https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/14/152616465/terjadi-hampir-setiap-tahun-karhutla-bisa-jadi-bencana-nasional?page=all>
- Laili, N. R. (2018). Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Riau dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan.
- Mahdi, A. (2015). Berita Sebagai Representasi Ideologi Media.
- Mason, J. (2002). *Qualitative Researching*. SAGE Publications.
- McKane, A. (2006). *News Writing*. SAGE Publications.
- McQuail, D. (2010). *McQuail's Mass Communication Theory*. London: Sage Publications.
- Metrotvnews.com. (2019, September 13). *Padamkan Karhutla, Petugas Lakukan Hujan Buatan di Riau*. Retrieved from Metrotvnews.com: <https://www.metrotvnews.com/play/b2lCZ2rG-padamkan-karhutla-petugas-lakukan-hujan-buatan-di-riau>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2013). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. California: SAGE Publications.
- Mohajan, H. (2018). Qualitative Research Methodology in Social Sciences and Related Subjects. *Journal of Economic Development, Environment and People*.
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches Seventh Edition*. Harlow: Pearson Education Limited.
- Pawito, H. P. (2014). Meneliti Ideologi Media: Catatan Singkat.
- Purnomo, H., Okarda, B., Shantiko, B. A., Kartodihardjo, H., & Dewayani, A. A. (2019). Forest and land fires, toxic haze and local politics in Indonesia. *International Forestry Review*.
- Purnomo, H., Shantiko, B., Gunawan, H., Sitorus, S., Salim, M. A., & Achdiawana, R. (2015). Ekonomi Politik Kebakaran Hutan dan Lahan: Sebuah pendekatan analitis.
- Rosul, P. (2015). *Analysis Of Policy Effectiveness On Forest Fires In Riau, Indonesia*. Duke University.

- Saragih, A. O. (2012). Analisis Framing dalam Pemberitaan Reshuffle Kabinet Bersatu Jilid II di situs detiknews.
- Scheufele, D. A. (1999). Framing as a Theory of Media Effects. *Journal of Communication*.
- SiPongi. (2019, November 7). *SiPongi Karhutla Monitoring Sistem*. Retrieved from SiPongi: [http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas\\_kebakaran](http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran)
- SiPongi Karhutla Monitoring Sistem. (2019, December 20). *Data Matrik Titik Panas TERRA/AQUA (LAPAN)  $\geq$  80% Tahun 2019*. Retrieved from SiPongi Karhutla Monitoring Sistem: [http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/matrik\\_tahunan](http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/matrik_tahunan)
- tempo.co. (2019, August 7). *Sepanjang 2019, Kebakaran Hutan dan Lahan Terjadi di 28 Provinsi*. Retrieved from tempo.co: <https://nasional.tempo.co/read/1232980/sepanjang-2019-kebakaran-hutan-dan-lahan-terjadi-di-28-provinsi/full&view=ok>
- The World Bank. (2016). Kerugian dari Kebakaran Hutan Analisa Dampak Ekonomi dari Krisis Kebakaran tahun 2015. *Laporan Pengetahuan Lanskap Berkelanjutan Indonesia*.
- tirto.id. (2016, May 12). *Tentang Kami*. Retrieved from tirto.id: <https://tirto.id/insider/tentang-kami>
- tirto.id. (2018, May 3). *Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)*. Retrieved from tirto.id: <https://tirto.id/insider/faq>
- tirto.id. (2018, January 25). *Setelah Lolos Verifikasi IFCN, Tirto.id Raih Penghargaan Adinegoro*. Retrieved from tirto.id: <https://tirto.id/setelah-lolos-verifikasi-ifcn-tirto-id-raih-penghargaan-adinegoro-cDNx>
- tirto.id. (2019, October 11). *Kabut Asap Pekat Kembali Menyelimuti Beberapa Wilayah di Sumatera*. Retrieved from tirto.id: <https://tirto.id/kabut-asap-peat-kembali-menyelimuti-beberapa-wilayah-di-sumatera-ejqz>
- tirto.id. (2019, September 14). *KLHK Segel 42 Perusahaan Diduga Pelaku Pembakaran Hutan*. Retrieved from tirto.id: <https://tirto.id/klhk-segel-42-perusahaan-diduga-pelaku-pembakaran-hutan-eh49>
- tirto.id. (2019, October 8). *Omong Kosong Pejabat Soal Karhutla yang Tak Perlu Dipercaya*. Retrieved from <https://tirto.id/omong-kosong-pejabat-soal-karhutla-yang-tak-perlu-dipercaya-ejnY>

- tirto.id. (2019, September 20). *Pemerintah Tak Sigap, Akankah Bencana Karhutla 1997-1998 Terulang?* Retrieved from tirto.id: <https://tirto.id/pemerintah-tak-sigap-akankah-bencana-karhutla-1997-1998-terulang-eijQ>
- tirto.id. (2019, October 2019). *Polda Riau Segera Tetapkan Korporasi sebagai Tersangka Karhutla.* Retrieved from <https://tirto.id/polda-riau-segera-tetapkan-korporasi-sebagai-tersangka-karhutla-ej8L>
- tirto.id. (2019, October 7). *Tumpulnya Penegakan Hukum Penyebab Karhutla Terulang.* Retrieved from tirto.id: <https://tirto.id/tumpulnya-penegakan-hukum-penyebab-karhutla-terulang-eiD3>
- Trinirmalaningrum, Dalidjo, N., Siahaan, F. R., Widyanto, U., Achsan, I. A., Primandari, T., & Wadana, K. W. (2015). *Di Balik Tragedi Asap: Catatan Kebakaran Hutan dan Lahan 2015.* The Asia Foundation.
- Yahya, S. R. (2016). *Analisis Framing Pemberitaan Mengenai Kabut Asap Riau dalam Surat Kabar The Straits Times Periode Agustus-Oktober 2015.* Tangerang: Universitas Multimedia Nusantara.
- Yılmaz, M., & Kirazoluğu, O. (2014). The Effect of Dominant Ideology on Media: The Syria Case. *The European Journal of Social & Behavioural Sciences.*

